

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Konsep dan Aplikasinya



OLEH:

Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.

Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si

Dr. Ni Ketut Riska Dewi Prawita, S.S., M.Hum.

UNHI PRESS, 2023

ANGGOTA IKAPI

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Konsep dan Aplikasinya

Oleh:

Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.

Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si

Dr. Ni Ketut Riska Dewi Prawita, S.S., M.Hum.

ISBN: 978-623-7963-56-1

Hak Cipta © Penulis, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Isi diluar tanggung jawab penerbit.

Tata Letak: Team Japa

Desain Sampul: Team Japa

Cetakan: Januari, 2023

Diterbitkan oleh:

UNHI PRESS

(Anggota IKAPI)

Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur. 80238

(0361) 464700/ 464800

unhipress@unhi.ac.id

www.unhi.ac.id

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Pertama-tama penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Hyang Widhi Wasa), karena atas asung waranugraha-Nya buku dengan judul “Sosiologi Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berbicara sosiologi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari cakupan ilmu sosiologi secara umum. Sosiologi sebagai cabang Ilmu Pengetahuan Sosial sebenarnya memiliki berbagai pembedangan, antara lain, ada sosiologi agama, sosiologi korupsi, sosiologi kesehatan, sosiologi pedesaan, dan juga ada sosiologi pendidikan. Sosiologi sebagai cabang Ilmu Pengetahuan Sosial lahir pada abad ke-18 dengan tokoh utamanya adalah Aguste Comte (1798—1857). Secara spesifik buku ini, mengulas sosok scientific organism yang bernama sosiologi dilihat dari dimensi pendidikan dan juga sedikit bersinggungan dengan persoalan agama.

Sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial tentu mencakup beragam perspektif sosial, yang kemudian difokuskan ke dalam satu lanskap pemikiran, yakni perspektif Sosiologi Pendidikan. Kemudian dalam pembahasannya penulis sedikit mengaitkan aspek sosiologi pendidikan ini dengan persoalan agama, mengingat buku ini diarahkan untuk bisa dijadikan buku refrensi oleh para mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, khususnya mahasiswa di Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Ketika Sosiologi Pendidikan dikaitkan dengan persoalan agama, maka hal menarik yang perlu dicermati adalah pengalaman beragama pada manusia yang cenderung bersifat ambivalen. Artinya, di satu sisi pendidikan agama sangat dibutuhkan sebagai pegangan dalam menuju kehidupan yang harmoni, sementara di sisi lain dicurigai, karena sifat irasionalnya. Menurut Haniah (2001:ix) pada kebudayaan kuno, religiusitas (agama) dianggap sebagai sesuatu yang biasa, spontan, dan vital. Sementara

pada kebudayaan modern, religiusitas tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang ada dengan sendirinya. Atau dalam bahasa lainnya dapat dikatakan religiusitas sudah menjadi sebuah persoalan. Hal ini disebabkan karena proses rasionalisasi yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat telah berhasil menerangi sudut-sudut gelap irasionalisme yang meliputi diri manusia itu sendiri.

Dalam proses penyusunannya, isi buku ini bukanlah sekadar kajian dan hasil pergulatan pemikiran individu semata, akan tetapi sudah melalui mekanisme diskusi, dan dialog dengan teman sejawat yang di dalamnya juga mengandung aspek eksplorasi dan dialektika pemikiran yang kemudian berujung pada upaya untuk melakukan critical review secara reflektif atas apa yang ditulis sebelum akhirnya masuk ke dalam tahap penerbitan. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku yang penulis hadirkan dihadapan sidang pembaca yang terhormat ini, belumlah dapat memberikan perspektif atau diskursus yang dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu, saran kritik, dan sanggahan yang bersifat konstruktif tetap penulis harapkan dari dewan pembaca yang terhormat. Selain itu, terbitnya buku ini juga tidak dapat dilepaskan dari motivasi, dorong, dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Dengan demikian ijin melalui kesempatan ini tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Universitas Hindu Indonesia, Bapak Kolonel Purn. Dr. Drs. Dewa Ketut Budiana, M.Fil beserta staf atas dibiayainya penerbitan buku ini;
2. Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia Bapak Prof. Dr. drh., I Made Damriyasa, M.S., beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi, dorongan dan juga pembiayaan penerbitan buku ini, sehingga bisa terbit seperti adanya sekarang ini;
3. Teman-teman dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya yang tidak mungkin disebut namanya satu persatu yang juga telah menyemangati penulis dalam menerbitkan buku ini;

4. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin juga penulis sebut namanya satu-persatu yang telah memberi dorongan, baik moral maupun material atas terbitnya buku ini juga penulis haturkan banyak-banyak terima kasih.
5. Demikian pula kepada UNHI Press yang telah memberi kesempatan dan berkenan menerbitkan buku ini, penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Akhir kata harapan dan doa tim penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi teman-teman yang bergerak di bidang akademik, para mahasiswa, dan mungkin juga bermanfaat bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti bidang sosiologi pendidikan.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, Juli 2023
Tim Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I CAKUPAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN	1
A. SOSIOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBIDANGANYA	1
B. PENGERTIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN	3
B. SEJARAH LAHIRNYA SOSIOLOGI PENDIDIKAN	9
BAB II SOSIOLOGI PENDIDIKAN DARI BERBAGAI PERSPEKTIF	21
A. SOSIOLOGI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKIF VEDA	21
B. PENDIDIKAN DALAM DINAMIKA MASYARAKAT	34
BAB III HUBUNGAN PENDIDIKAN DENGAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT	44
A. STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENDIDIKAN	44
B. STRATIFIKASI SOSIAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN	49
C. PROSES MUNCULNYA STRATIFIKASI SOSIAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN	52
BAB IV FENOMENA PENDIDIKAN DEWASA INI DAN MUNCULNYA BERBAGAI LABELING TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN	56
A. FENOMENA PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT DEWASA INI	56
B. MUNCULNYA BERBAGAI MACAM LABELING TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN	63
C. PENDIDIKAN SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT	68
D. PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT	74

E. PENDIDIKAN SEBAGAI AGEN SOSIALISASI KEBUDAYAAN BANGSA	79
BAB V PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT ...	84
A. REALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA SAAT INI	84
B. KEKERASAN YANG TERJADI DALAM DUNIA PENDIDIKAN	90
C. PENDIDIKAN GRATIS HANYA KOMODITAS POLITIK	97
D. MOBILITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT	101
E. HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN TERJADINYA PRASANGKA	117
BAB VI STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH, TUJUAN, PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU	136
A. PENGERTIAN STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH	136
B. TUJUAN DIBENTUKNYA STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH	141
C. KEDUDUKAN DAN PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH	147
D. KEDUDUKAN DAN PERAN GURU DALAM STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH	152
BAB VII PENUTUP	182
DAFTAR PUSTAKA	184

BAB I

Cakupan Sosiologi Pendidikan

A. Sosiologi Pendidikan dan Pembidangnya

Telah dipahami bahwa sosiologi sebagai cabang ilmu sosial sebenarnya memiliki berbagai pembedangan, antara lain, ada sosiologi agama, ada sosiologi korupsi, sosiologi kesehatan, sosiologi pedesaan, dan juga ada sosiologi pendidikan. Sebelum cabang-cabang dan ranting-ranting ilmu pengetahuan itu lahir, maka segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini cenderung dipecahkan oleh ilmu yang bernama filsafat. Oleh karenanya filsafat sering disebut sebagai induknya ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, manusia mulai memikirkan tentang ilmu falak dan masalah kemanusiaan yang lebih bersifat praktis. Misalnya, Aristoteles (384—322 SM) dan Plato (429—347 SM) dua orang filsuf Yunani ini telah memberikan dasar sistematis bagi ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan selanjutnya yang mempunyai pengaruh kuat dalam perkembangan pemikiran Barat (Abdullah Idi, 2014: 2).

Dalam perkembangannya, tepatnya pada abad ke-18 munculah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Aguste Comte (1798—1857), oleh karena itu Comte sering disebut sebagai bapaknya sosiologi. Mengapa demikian, sebab hal ini tidak

dapat dilepaskan dari jasanya dalam memberikan nama “sosiologi” terhadap bidang ilmu sosial kemasyarakatan. Sebenarnya semula Auguste Comte ingin memberikan nama cabang ilmu pengetahuan tersebut dengan nama *social physical* dengan harapan sosiologi dapat meniru model ilmu fisika (Sumadiria, dalam Anantawikrama Tungga Atmadja, dkk., 2019:2). Namun, kemudian dia megurungkan niatnya tersebut, karena istilah itu telah dipakai oleh tokoh lainnya, yakni Saint Simon (Sunarto, 2000).

Pertimbangan lainnya kenapa Comte tidak jadi memakai istilah *social physical* sebagai nama dari ilmu sosiologi tersebut, karena istilah itu juga sudah pernah digunakan oleh ahli matematika Belgia, yakni Quetelet sebagai mana dikatakan oleh Duverger, (1981:1) yakni dengan mengacu pada studi statistika tentang gejala moral. Pertimbangan mendasar mengapa akhirnya Comte memakai istilah “sosiologi”, karena istilah sosiologi mengacu pada masalah kehidupan yang mencakup pengaruh dan interaksi sosial di antara sesama manusia (Roucek dan Warren, 1984:4).

B. Pengertian Sosiologi Pendidikan

1. Pengertian Sosiologi

Sebelum masuk pada pengertian sosiologi pendidikan, tampaknya penting dikemukakan terlebih dahulu beberapa pandangan ahli tentang pengertian sosiologi, di antaranya:

1. Roucek dan Warren dalam *Sociology an Introduction* menegaskan bahwa "sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok".
2. Pitrim Sorokin, dalam karyanya *Contemporary Sociological Theory* menyatakan bahwa "sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: (1) hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial; (2) hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial; dan (3) ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial" (Sorokin dalam Soekanto, 1991:20).
3. Selanjutnya, sosiolog Indonesia, yakni Selo Soemardjan dan Soelaeman Sumardi menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.
4. Berangkat dari ketiga pandangan ahli tentang sosiologi di atas, maka sosiologi dalam konteks buku ini dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari proses komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan proses komunikasi antara individu dengan kelompok dalam struktur sosial masyarakat, sehingga dapat dibangun hubungan yang baik antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat.

2. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan secara normatif dapat mengacu pada ketentuan pasal 1 (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Fuad Hassan (dalam Widiastono, *ed.*) 2004:52—66) mengatakan bahwa dalam arti luas pendidikan terjadi melalui tiga upaya utama, yakni pembiasaan, pembelajaran, dan peneladanan. Ketiga pemahaman ini penting dalam konteks pendidikan agar tidak terjadi penafsiran yang terlalu sempit mengenai arti pendidikan, yakni hanya sebatas persekolahan (*schooling*).

Ketika manusia diberi julukan sebagai *animal educandum* dan sekaligus sebagai *animal educandus*, yakni sebagai makhluk yang bisa dididik dan sekaligus mampu mendidik, maka pengertian pendidikan jelas lebih luas dibandingkan sekadar persekolahan. Dalam pandangan tersebut, juga terkandung makna bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain, maupun terhadap dirinya sendiri.

Jadi, pendidikan dalam konteks ini dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu anak-anak yang belum dewasa menuju tingkat kedewasaannya, melalui tiga kegiatan utama, yakni dengan cara membiasakan anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat menuntun anak-anak menuju tingkat kedewasaannya,

kemudian melakukan aktivitas belajar untuk memahami sesuatu, dan anak-anak pun diberikan ruang untuk meneladani pola-pola sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh guru atau orang tuanya di dalam proses pembelajaran tersebut.

3. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Dengan mengacu pada pengertian sosiologi dan pengertian pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pengertian sosiologi pendidikan atas dua pengertian sebagai berikut. *Pertama*, sosiologi pendidikan merupakan sebuah kajian yang membahas hubungan antarmasyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Artinya, dalam konteks sosiologi pendidikan terlihat secara jelas bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa sosiologi pendidikan membahas persoalan masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dalam hubungannya dengan pelaksanaan pendidikan.

Hal senada disampaikan oleh Damsar (2015:9) yang mengatakan bahwa sosiologi pendidikan mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan pendidikan. Di mana hubungan yang terjadi dilihat dalam posisi yang saling memengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan pendidikan, di mana pendidikan itu dilakukan. Tuntunan ini biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum, ideologi, dan agama.

Misalnya, dalam pandangan Hindu ada semacam pandangan budaya yang mengatakan bahwa masyarakat jika mau pergi ke tempat suci (pura) harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Bagi yang perempuan memakai kain dan kebaya rambut dipusung atau diikat, sedangkan bagi yang laki-laki harus memakai kain, *kampuh*, kemeja, dan destar (*udeng*). Pakaian semacam ini sering juga dipakai saat menghadiri upacara keagamaan lainnya, seperti upacara *mepandes* (upacara potong gigi), pernikahan, upacara *telu bulanan*, dan upacara lainnya yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Akan tetapi pola dan model busana yang dikenakan untuk upacara ke pura dengan menghadiri upacara pernikahan, *mepandes*, *telu bulanan*, dan upacara *manusa yadnya* lainnya tentu sedikit berbeda dari segi warna, bahan, dan modelnya. Misalnya, warna yang umum digunakan untuk pakaian ke pura adalah warna putih, kuning, merah muda, dan warna natural lainnya. Sedangkan warna dan model pakaian yang digunakan untuk menghadiri upacara pernikahan, *mepandes*, dan upacara *manusa yadnya* lainnya, biasanya menggunakan warna-warna cerah dan model pakaian yang *fashionable* (modis). Jadi, dalam konteks pendidikan, pola busana semacam ini menjadi rujukan bagi anggota masyarakat dalam memilih pola, warna, dan model pakaian yang cocok digunakan pada setiap moment sesuai situasi dan kondisi kehidupan sosial dalam masyarakat. Proses sosialisasinya terjadi melalui pola peneladanan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa, dan hal ini terjadi secara alamiah. Pola peniruan semacam inilah dimaksudkan mengandung unsur pendidikan yang terjadi melalui transmisi nilai-nilai (*transmission of values*).

Kedua, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan dalam rangka mengkaji persoalan pendidikan. Dalam

konteks ini pendekatan sosiologis dimaksudkan adalah sebuah pendekatan yang mencakup konsep, variabel, teori, dan metode-metode sosiologi yang digunakan untuk memahami realitas sosial, khususnya mengenai kompleksitas aktivitas masyarakat dalam bidang pendidikan (Damsar, 2015:11). Terkait dengan persoalan konsep ada perbedaan antara orang kebanyakan dengan para sosilog (ahli sosiologi) mengenai konsep kemasyarakatan. Dalam melihat sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat orang kebanyakan cenderung melihatnya dari aspek sosial secara realitas. Sementara bagi kalangan sosiolog dalam melihat sesuatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat acapkali menggunakan konsep-konsep sosiologis. Artinya, orang kebanyakan ketika melihat suatu persoalan dalam masyarakat cenderung menggunakan konsep-konsep sosial secara umum, sedangkan para sosiolog dalam melihat berbagai masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat cenderung menggunakan konsep-konsep atau teori-teori sosiologi secara akademik.

Konsep dimaksudkan dalam konteks ini adalah pengertian-pengertian atau batasan-batasan mengenai sesuatu hal atau peristiwa. Sedangkan teori merupakan abstraksi dari kenyataan yang menjelaskan hubungan sistematis antara fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Misalnya, seorang sosiolog ketika melihat ada perbedaan antara petani, pedagang, dan guru dalam memberikan sosialisasi tentang sesuatu nilai, norma, atau dalil tentang kehidupan yang mereka jalani kepada anak-anak mereka, maka dia akan berkata "ternyata ada stratifikasi sosial orang tua dalam mensosialisasikan sesuatu kepada anak-anak mereka dilihat dari profesi orang bersangkutan". Contoh jika profesi orang tuanya adalah seorang petani, maka mereka akan menggunakan cara atau metode yang berbeda dalam mensosialisasikan sesuatu kepada anak-

anaknya jika dibandingkan dengan orang tua yang profesinya sebagai guru. Demikian pula mungkin cara dan metode yang digunakan akan berbeda jika orang tuanya berprofesi sebagai pedagang, dan begitu seterusnya. Apa yang dikatakan oleh sosiolog di atas dapat dipandang sebagai sebuah teori.

Berangkat dari gambaran tersebut dan jika dikaitkan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat dideskripsikan bahwa teori-teori sosiologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari pemikiran Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, George Herbert Mead, sampai pada pemikiran sosiolog era post modernisme, seperti Jaques Derrida, Jurgen Habermas, Antony Giddens, dan tokoh-tokoh sosiologi kontemporer lainnya. Dari basis pemikiran tokoh-tokoh inilah kemudian berkembang teori-teori sosiologi modern, bahkan teori-teori sosiologi postmodern (teori-teori sosial kritis) yang selanjutnya dijadikan landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial melalui penelitian-penelitian ilmiah yang dikembangkan oleh institusi-institusi yang memiliki lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Perkembangan teori-teori sosial semacam ini tidak saja mencakup bidang-bidang ilmu sosial, tetapi merambah pula bidang-bidang ilmu pendidikan, oleh karenanya munculah ilmu sosiologi pendidikan. Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud sosiologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan permasalahan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dalam arti memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori sosiologi.

B. Sejarah Lahirnya Sosiologi Pendidikan

1. Sekilas Latar Belakang Munculnya Ilmu Sosiologi Pendidikan

Berbicara kelahiran sosiologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Negara Amerika Serikat sebagai tempat lahirnya ilmu pengetahuan sosiologi. Meski kelahirannya sebagai bidang ilmu telah mencapai usia lebih dari satu abad, namun sampai saat ini belum bisa dirumuskan definisi tentang sosiologi pendidikan yang dapat memuaskan semua kalangan. Hal ini menurut Nasution (2009:1) disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) sulitnya membatasi bidang studi di antara bidang pendidikan dengan bidang sosiologi; (2) kurangnya penelitian dalam bidang ini; dan (3) belum nyata sumbangan sosiologi pendidikan terhadap pendidikan pada umumnya dan pendidikan guru pada khususnya.

Bila dilihat secara historis perkembangan sosiologi pendidikan sebenarnya bermula dari adanya perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan masyarakat setelah berakhirnya perang dunia II. Pada saat itu masyarakat dunia menginginkan adanya perkembangan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk tatanan dalam kehidupan dunia pendidikan. Untuk melakukan pembenahan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan dalam konteks pendidikan, maka ilmu sosiologi pendidikan inilah yang dianggap mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karenanya ilmu sosiologi pendidikan yang sebelumnya sempat tenggelam dibangkitkan kembali sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang penting untuk melakukan pembenahan terhadap struktur sosial dan sistem kelembagaan pendidikan.

Sosiologi pendidikan sebenarnya berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro (*micro sociology*) yang muncul pada abad ke-18. Ilmu pengetahuan ini mulai berdiri sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri pada abad ke-19. Menurut Nasution (2009:1) kuliah dalam bidang sosiologi pendidikan pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1907. Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1914 mata kuliah sosiologi pendidikan telah disajikan pada 16 lembaga pendidikan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Spesifik terhadap bidang ilmu sosiologi pendidikan, setelah perang dunia ke-2 barulah ada sebuah lembaga pendidikan guru yang mendirikan "*department of educational sociology*" atau jurusan sosiologi pendidikan.

2. Tujuan Mempelajari Sosiologi Pendidikan

Terkait dengan kelahiran sosiologi pendidikan, Lester Frank Word (1841-1913) adalah salah seorang sosiolog berkebangsaan Amerika yang dianggap sebagai pencetus pertama gagasan tentang sosiologi pendidikan. Tujuannya tiada lain untuk membentuk suatu sistem sosiologi yang dapat menyempurnakan kesejahteraan umat manusia. Teori Frank Word ini kemudian dikenal dengan istilah evolusi sosial yang menekankan peranan pendidikan sosial dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya "*Applied Sociology*" (sosiologi terapan) yang sasaran utamanya adalah mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri.

Akantetapi secara formal munculnya sosiologi pendidikan pertama kali dipelopori oleh John Dewey yang ditandai dengan diterbitkannya buku *School and Society* pada tahun 1899. Dalam buku itu ditekankan bahwa sekolah merupakan institusi sosial. Oleh

karenanya beberapa ilmuwan sosial dan ilmuwan pendidikan menekankan betapa pentingnya sosiologi bagi pendidikan. Berangkat dari pandangan para ilmuwan tersebut, John Dewey kemudian melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara dunia pendidikan dengan kehidupan masyarakat. Untuk membuktikan pandangannya tersebut Dewey kemudian melakukan penelitian mengenai kehidupan anak-anak perkotaan yang secara faktual terlihat sangat acuh dan tidak mepedulikan berbagai produk yang digunakannya setiap hari.

Misalnya, anak-anak itu memakai pakaian, peralatan belajar, mainan, dan lain-lain, tetapi mereka sama sekali tidak mau tahu tentang bagaimana cara membuat pakaian yang dipakainya, proses pembuatan mainan yang dipakainya bermain, dan juga peralatan belajar yang digunakannya untuk belajar. Mereka tinggal memakai begitu saja, tanpa pernah memikirkan bagaimana barang-barang yang dipakainya itu dibuat, dimana dibuat, dari bahan apa barang itu dibuat, dan seterusnya. Hal demikian menurut Dewey anak-anak sudah tidak akrab lagi dengan konteks kehidupan sosialnya karena kehidupan sosial kemasyarakatan sudah sedemikian kompleksnya. Untuk menjembatani adanya paradoksal kehidupan anak-anak perkotaan inilah kemudian John Dewey berpandangan bahwa sosiologi pendidikan ini dapat membenahi karakter kehidupan anak-anak perkotaan yang sudah demikian acuhnya terhadap konteks kehidupan sosialnya (<https://zayyinlidinillah.wordpress.com/>). (diakses, 21 September 2020).

Meski pun pada awalnya pengembangan bidang ilmu sosiologi pendidikan ini mendapat dukungan yang sangat kuat dari berbagai kalangan, namun antara 1926—1947 perkembangan bidang ilmu sosiologi pendidikan tampak mengalami kemunduran.

Hal ini dikarenakan ada anggapan yang berkembang dalam masyarakat akademik bahwa bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu keguruan, lebih baik bila diberikan mata kuliah sosiologi umum dibandingkan dengan diberikan mata kuliah khusus mengenai sosiologi pendidikan. Terhadap persoalan ini Lee (1927) melakukan sebuah penelitian dan menemukan bahwa mata kuliah sosiologi pendidikan yang diberikan di berbagai perguruan tinggi memiliki persamaan yang sangat kecil. Demikian pula buku-buku sosiologi pendidikan yang dijadikan referensi pada lembaga-lembaga pendidikan guru juga mempunyai persamaan yang relatif kecil.

Namun, dalam perkembangannya dengan memperhatikan tujuan dari sosiologi pendidikan tersebut, maka para ahli sosiologi dan ahli pendidikan kemudian memandang bahwa mata kuliah sosiologi pendidikan itu sangat penting diberikan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa calon guru. Ada pun beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Sosiologi Pendidikan sebagai Analisis Proses Sosialisasi;

Hal ini mengandung arti bahwa melalui mata kuliah sosiologi pendidikan para mahasiswa dapat memahami dan menganalisis bagaimana kelompok-kelompok sosial mempengaruhi kelakuan seorang individu. Misalnya, melalui interaksi di dalam sebuah kelompok perilaku anak-anak akan terpengaruh oleh kelakuan teman-teman sepermainannya di dalam kelompok tersebut. Jadi, ketika anak-anak bermain dalam kelompoknya, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh anak bersangkutan lama-kelamaan akan terpengaruh pula oleh kelakuan teman-teman kelompoknya, jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Francis Brown sebagaimana dikutip oleh Nasution (2009:2) menegaskan bahwa "sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai

sebuah tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya”. Berangkat dari gagasan Francis Brown tersebut dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa sosiologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang berusaha memahami dan mendalami cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian anak-anak yang lebih baik.

b. Sosiologi Pendidikan sebagai Analisis Kedudukan Pendidikan dalam Masyarakat

Dalam konteks ini sosiologi pendidikan mempunyai peran penting dalam hal menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana hubungan sosial yang terjadi antara lembaga pendidikan dengan lembaga keluarga sebagai segmen dari unit sosial terkecil dalam masyarakat. Demikian pula bagaimana hubungan sosial antara lembaga pendidikan dengan organisasi kesenian yang ada dalam masyarakat, dengan lembaga pemerintahan desa, dan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan-hubungan inilah yang akan dianalisis dan direkonstruksi oleh ilmu sosiologi pendidikan, sehingga dapat dikembangkan konsep-konsep atau teori-teori yang terkait dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini nantinya dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa yang mempelajari bidang ilmu sosiologi pendidikan untuk memecahkan berbagai persoalan menyangkut sikap permisif anak-anak muda sekarang terhadap berbagai dinamika sosial dan dinamika budaya yang berkembang di sekitar diri mereka.

Misalnya, bagaimana hubungan keluarga dengan lembaga pendidikan (sekolah). Dalam konteks ini keluarga sebagai unit sosial

terkecil dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lembaga pendidikan sekolah. Dikatakan demikian sebab keluargalah yang merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak sebelum memasuki dunia sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Khairuddin (1985:59—60) bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam usaha pengembangan potensi anak-anak. Menurutnya ada tiga fungsi utama yang dimiliki keluarga dalam rangka pengembangan potensi anak-anak antara lain: (1) fungsi biologis, yakni keluarga harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan segala kebutuhan fisik anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dan ideal sesuai dengan perkembangan usianya; (2) fungsi afeksi, artinya keluarga harus mampu menciptakan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan kepribadian anak-anak di lingkungan keluarga, dengan cara menjalin hubungan sosial yang penuh kemesraan atas dasar cinta kasih, sehingga anak-anak yang tinggal di dalamnya memiliki rasa aman atas situasi sosial yang berkembang di lingkungan keluarga mereka sendiri; (3) fungsi sosialisasi, yakni keluarga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi proses sosialisasi berbagai nilai dan norma kehidupan dalam rangka pembentukan kepribadian (karakter) anak-anak. Artinya, melalui interaksi sosial yang terjadi di lingkungan keluarga inilah anak-anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, tata nilai, dan sopan santun dalam pergaulan guna membentuk keperibadian (karakter) anak-anak itu sendiri (Suda, 2008:7).

Hubungan antara lembaga pendidikan sekolah dengan lembaga kesenian yang ada dalam masyarakat juga bisa dijadikan sebagai objek analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Misalnya, melalui aktivitas berkesenian anak-anak dapat mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilakunya

terhadap nilai seni yang mereka lakoni. Contoh, anak-anak yang terlibat dalam seni melukis, tanpa disadari keterlibatannya dalam aktivitas melukis ternyata dapat mempengaruhi pengetahuan mereka, baik dalam hal teknik melukis, maupun dalam memaknai setiap objek yang dilukisnya. Kemudian tanpa disadari ternyata hal demikian berpengaruh pula terhadap sikap dan perilaku anak-anak tersebut.

Hal ini mengandung arti bahwa, ketika anak-anak memperoleh pemahaman tentang teknik melukis dan mampu memahami setiap objek yang dilukisnya dan dengannya mereka mampu membuat lukisan sendiri, maka hal itu dapat membangun sikap kemandirian pada diri anak-anak, sebab lukisan yang mereka hasilkan dapat mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal demikian ternyata berimplikasi terhadap munculnya sikap disiplin, dan suka bekerja keras sebagai landasan pembangunan karakter yang baik. Dari gambaran tersebut dapat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa terbentuknya pengetahuan yang positif ternyata berimplikasi terhadap terbentuknya sikap yang positif pula, dan pada akhirnya bermula pada terbangunnya perilaku yang baik (Suda, 2018:146).

c. Sosiologi Pendidikan sebagai Analisis Interaksi Sosial di Sekolah dan Antar Sekolah dengan Masyarakat.

Dalam konteks ini, ilmu sosiologi pendidikan dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok yang lain, baik di lingkungan intrasekolah maupun antarsekolah dengan masyarakat. Berbicara soal pendidikan, termasuk institusinya, menurut pandangan beberapa ahli sebenarnya telah hadir mengiringi perkembangan

peradaban manusia sejak tahun 900-an SM. Sistem dan model institusi pendidikan yang ada pada saat itu, mula-mula dikembangkan di Kota Sparta (sebagaimana dikatakan Thomson, 1951:1; Smith, 1979:1; dan Wahono, 2001:2).

Hal ini mengandung arti bahwa hakikat pendidikan sebagai transformasi menuju perubahan-perubahan telah diyakini oleh umat manusia sebagai alat yang efektif sejak dahulu kala. Menurut Wahono (dalam Susetyo, 2005:137) berbagai usaha yang dilakukan manusia dalam menyelenggarakan pendidikan di masa lampau lambat laun telah melahirkan institusi dan sistem pendidikan yang mulai mengarah pada institusi dan sistem pendidikan yang ada saat ini. Berbagai model institusi pendidikan yang ada pada jaman dulu meliputi sistem *Academia* di Yunani, sistem *Gurukula* di India, *Monastery* di kalangan Gereja, *Madrassah* bagi kalangan Muslim, sistem *Padepokan* di Jawa, sistem *pasraman* bagi umat Hindu, dan lain-lain. Berbagai institusi pendidikan yang ada pada saat itu diyakini oleh masyarakat secara umum akan dapat mengubah karakter manusia menjadi lebih baik, lebih beradab, dan lebih berbudaya. Misalnya, pergumulan manusia dengan lingkungan alam yang keras telah membentuk karakter dan watak manusia yang keras pula.

Oleh karena itulah pendidikan hadir untuk membentuk karakter manusia menjadi lebih lembut, lebih bersahaja, dan lebih bersahabat dengan manusia lainnya serta mampu memperlakukan lingkungan alamnya secara manusiawi pula. Di sinilah pentingnya interaksi sosial itu dibangun, baik antarindividu dengan individu, antarindividu dengan kelompok, dan antarkelompok dengan kelompok lainnya. Proses interaksi model ini bisa berlangsung di lingkungan intrasekolah, antarsekolah, dan antarsekolah dengan masyarakat. Melalui ilmu sosiologi pendidikan inilah para mahasiswa

diajarkan untuk mampu menganalisis pola-pola interaksi sosial yang terjadi, baik di lingkungan sekolah itu sendiri, antarsekolah, maupun interaksi yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sekolah dengan orang-orang atau kelompok-kelompok sosial yang ada di luar sekolah. Berangkat dari gagasan di atas, maka secara ideal dapat dideskripsikan bahwa fungsi pendidikan (persekolahan) sesungguhnya adalah untuk menggugah kesadaran kritis para siswa atau peserta didiknya agar mampu berpikir dewasa, logis, serta mampu menganalisis berbagai fenomena sosial dan fenomena budaya yang terjadi di sekitar diri mereka. Namun, dalam realitasnya tujuan mulia pendidikan sebagaimana digambarkan di atas, sering kandas karena adanya kepentingan kekuasaan yang sangat hegemonik dengan cara mengemas pendidikan dan diorientasikan untuk kepentingan kekuasaan. Realitas pendidikan semacam itu umumnya terjadi di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Menurut Susetyo (2005:140) polarisasi pendidikan yang sangat hegemonik dan diorientasikan demi kepentingan kekuasaan dapat dilihat pada rezim kekuasaan otoriter di era pemerintahan Orde Baru. Rezim otoriter ini sengaja mempolitisasi pendidikan sebagai salah satu cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan alasan pembangunan dan dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang tinggi sistem pendidikan nasional acapkali diabdikan untuk kepentingan status *quo* (untuk melanggengkan kekuasaannya). Pada waktu yang bersamaan pendidikan direduksi menjadi pembelajaran yang sangat pragmatis, dalam arti pendidikan hanya diorientasikan untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai (pendidikan berparadigma instrumentalisme). Akibatnya, esensi pendidikan telah melenceng jauh dari tujuan yang diidealkan. Politik penyeragaman melalui pakaian seragam dan sentralisasi kurikulum, dengan roh

militeristik telah membuat masyarakat Indonesia teralienasi dari kemanusiaannya. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa pemerintahan Orde Baru selama kekuasaannya telah berhasil memandulkan potensi-potensi kritis masyarakat. Diskursus pendidikan yang menghendaki pendidikan berbasis pada cinta kasih, humanistik, pembebasan, pemerdekaan, telah direduksi ke dalam pola yang despotik dengan ideologi *developmentalisme*-teknokratis.

d. Sosiologi Pendidikan sebagai Alat Analisis Kemajuan dan Perkembangan Sosial

Sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, pendidikan seharusnya mampu menumbuhkembangkan kesadaran individu atau peserta didik untuk bisa membaca berbagai realitas sosial dan realitas budaya yang berkembang di sekitar diri mereka. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Romo Mangunwijaya sebagaimana dikutip Benny Susetyo (2005:145) bahwa pendidikan merupakan proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar diri mereka. Oleh karenanya menurut Romo Mangun, perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir masing-masing individu yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada.

Terkait dengan esensi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, maka para ahli pendidikan sosial beranggapan bahwa pendidikan sosial merupakan bidang studi yang memberikan dasar bagi kemajuan sosial, dan dianggap mampu memecahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Artinya, pendidikan ilmu sosial dianggap mampu berperan sebagai badan

yang sanggup memperbaiki kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya, sekolah sebagai institusi pendidikan sering dipandang sebagai alat kontrol sosial yang mampu membawa kebudayaan masyarakat ke titik puncak yang tertinggi. Namun, ironisnya keserakahan ekonomi, keserakahan kekuasaan otoriter politik, dan ketidakadilan hukum, justru merajalela ketika pendidikan berada pada puncak "kemajuannya". Menurut Suhartono (2008:27) bahwa teknologi dan industri sebagai produk pendidikan berhasil mendorong dinamika kehidupan melaju begitu cepat. Tetapi di tengah kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pula kejahatan yang dilakukan manusia juga begitu tingginya. Contoh, jika jaman dahulu seorang peternak bisa menjadi kaya harta setelah dengan sabar menunggu puluhan tahun ternaknya beranak pinak secara alami, tetapi kini dengan teknologi canggih si peternak tersebut tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk bisa menjadi kaya harta, karena dengan rekayasa teknologi reproduksi, dalam waktu yang relatif singkat ternaknya bisa berlipat ganda, apalagi peralatan teknologi itu digunakan secara amoral. Contoh lain, hanya dengan satu unit komputer dan dalam hitungan menit, seseorang bisa menjadi kaya raya, ketika orang tersebut berhasil memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut secara amoral. Misalnya, seseorang dengan menggunakan kecanggihan teknologi komputer bisa saja melakukan pembobolan Bank, sehingga dalam waktu sekejap dia bisa mendapatkan uang milyaran, bahkan triliunan rupiah.

Melihat realitas sosial semacam ini mengingatkan kita semua, bahwa sesungguhnya betapa pentingnya pendidikan itu untuk mengawal teknologi sampai pada tingkat pemberdayaannya. Ketika teknologi tidak dikawal secara ketat oleh pendidikan, maka ketika itu pula bisa terjadi berbagai tindakan kejahatan dengan

memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai produk ilmu pengetahuan untuk peralatannya. Oleh karena itu, manusia hendaknya tidak gegabah melepaskan pendidikan dari sistem pemberdayaan teknologi. Sebab hal demikian bukan tidak mungkin dapat memberi keleluasaan bagi berkembangnya moral keserakahan, yang pada ujungnya akan bermuara pada suburnya perkembangan ekonomi kapitalistik, kekuasaan politik militer, dan ketidakadilan hukum. Berangkat dari gagasan tersebut di sinilah letak pentingnya pendidikan, terutama bidang ilmu sosiologi pendidikan sebagai alat analisis kemajuan dan perkembangan sosial yang terjadi di lingkungan peserta didik. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan para peserta didik diharapkan mampu melakukan analisis terhadap berbagai kemajuan yang terjadi di sekitar diri mereka, apakah kemajuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif atau sebaliknya justru digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.

BAB II

Sosiologi Pendidikan dari Berbagai Perspektif

A. Sosiologi Pendidikan dalam Perspektif Veda

1. Masa Muda adalah Masa Menuntut Ilmu

Dalam pandangan Aristoteles perkembangan anak terjadi melalui tiga fase, yakni (1) Fase I: umur 0,0—7,0 disebut masa anak kecil. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan anak-anak umumnya hanya bermain; (2) Fase II: umur 7,0—14,0 disebut masa anak atau masa sekolah di mana anak-anak pada usia ini sudah mulai memasuki bangku sekolah dasar. Pada masa ini kegiatan anak adalah bermain dan belajar; (3) Fase III: umur 14—21 disebut masa remaja atau masa pubertas atau sering pula disebut masa peralihan (transisi) dari anak-anak menuju orang dewasa (Ahmadi, 1991:37).

Jika mengacu pada fase perkembangan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan jika dikaitkan dengan kenyataan secara faktual, maka dari tiga fase perkembangan yang ada, maka fase ketiga ini paling menentukan perkembangan anak selanjutnya. Dikatakan demikian sebab pada fase peralihan atau dalam bahasa psikologinya disebut masa *adolesence* kondisi anak-anak sangat labil disebabkan pada masa ini anak merasa telah besar (puer = anak besar) mereka

sudah ingin berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya belum siap memasuki kelompok orang dewasa.

Gambaran ringkasnya adalah sebagai berikut, pada masa pra pubertas dalam diri anak-anak telah terjadi kematangan kelenjar seksual yang sesungguhnya, bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologik yang berhubungan dengan matangnya sistem kelenjar *endokrin*. Secara biologis sistem kelenjar *endokrin* merupakan sistem kelenjar yang bermuara langsung ke dalam saluran darah. Melalui pertukaran zat yang ada di antara jaringan kelenjar dengan pembuluh rambut, darah mengeluarkan zat yang disebut hormon yang kemudian hormon-hormon ini memberikan stimulasi pada tubuh anak, sehingga anak-anak merasakan adanya rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan-rangsangan hormonal semacam inilah kemudian menyebabkan munculnya perasaan tidak tenang pada diri anak, yang tidak pernah dialami pada fase sebelumnya.

Suatu hal yang perlu juga dipahami terkait proses kematangan kelenjar *endokrin* adalah, bahwa pada anak-anak perempuan kecenderungan terjadinya kematangan kelenjar tersebut lebih awal dibandingkan pada anak laki-laki. Terjadinya kematangan kelenjar *endokrin* pada anak perempuan ditandai oleh menstruasi pertama (datang bulan pertama), sedangkan kematangan kelenjar ini pada pria ditandai dengan keluarnya sperma pertama yang biasanya dialami anak lewat mimpi. Secara psikologi pada masa ini, anak-anak juga mengalami berbagai permasalahan yang diakibatkan tingkat emosionalnya tidak stabil. Pada masa ini biasanya rasa ingin mencoba-coba sesuatu yang baru pada diri anak sangat tinggi. Jika anak dalam kondisi demikian tidak diimbangi dengan aktivitas-aktivitas positif untuk menyalurkan emosional yang menggebu-gebu

tersebut, maka bukan tidak mungkin mereka bisa terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Misalnya, bisa saja anak-anak terlibat dalam *gank* motor, menyalahgunakan obat-obat terlarang, melakukan sex bebas, berjudi, dan berbagai tindakan menyimpang lainnya.

Ketika anak-anak sedang mengalami fase seperti ini, maka peran orang tua sebagai *guru rupaka* sebenarnya mempunyai arti yang amat penting dalam mengarahkan anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam berbagai perbuatan menyimpang. Dalam konteks ini orang tua harus memahami fase-fase perkembangan anak, sehingga dapat memberikan tuntunan atau ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, teruatom nilai-nilai dan norma-norma agama. Dalam pandangan Hindu fase kehidupan anak-anak sampai remaja disebut dengan masa *brahmacharya* (masa menuntut ilmu pengetahuan).

Menurut Sandika (2011:13) tahapan dalam kehidupan *brahmacharya* dimulai dari proses *upanayana*, yang secara filosofi mengandung makna sebagai tanda kelahirannya yang kedua. Artinya, upacara *upanayana* dapat dimaknai sebagai upaya para remaja dalam mempersiapkan diri untuk menerima berbagai bentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan *paramidya* (pengetahuan spiritual) dan ilmu pengetahuan *aparamidya* (ilmu pengetahuan sains) yang akan diberikan oleh *dang acarya* (para guru). Misalnya, mereka harus membiasakan diri bangun pagi, kemudian membersihkan diri (mandi), kemudian sembahyang (melakukan *japa gayatri*), dan yang lebih penting lagi adalah mereka mampu mengendalikan segala hawa nafsu (keinginan) dengan cara hidup dalam kesederhanaan, tidak mudah mengeluh, tabah mengalami segala cobaan, tidak bersifat konsumtif, dan sabar dalam memenuhi segala keinginannya. Hal

yang tidak kalah pentingnya yang harus dipahami dan dipelajari oleh para remaja dalam menjalani masa *brahmacarya*-nya adalah upaya memurnikan pikiran, perkataan, dan perbuatan (*tri kaya pari sudha*). Hal ini penting sebab keberhasilan seseorang dalam menjalani hidupnya menurut pandangan Hindu sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut, yakni pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terkait hal tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pikiran yang baik dapat melahirkan perkataan yang baik, demikian pula pikiran yang baik dan perkataan yang baik dapat melahirkan perbuatan yang baik dan begitu sebaliknya. Selain itu, hal penting yang harus dipahami dan dilakukan oleh seorang *brahmacarya* adalah menghormati dan melayani guru serta orang yang lebih tua. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Veda yang mengatakan "*Acarya Devo Bhava*" yang artinya guru dipandang sebagai wujud Tuhan, yang layak dihormati mendapat pelayanan dari murid-muridnya.

Selain itu, secara sosiologis anak muda yang masih dalam upaya menuntut ilmu yang dalam konteks Hindu disebut masa *brahmacarya* harus mampu menahan diri dari berbagai perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi minuman keras, melakukan sublimasi seksual, berjudi, dan lain-lain. Jadi, menurut pandangan Hindu manusia pada saat menempuh kehidupan *brahmacarya* (semasa menuntut ilmu) mereka harus banyak melibatkan diri dalam aktivitas belajar, baik belajar tentang ilmu pengetahuan yang bersifat *aparawidya* (sains) maupun pengetahuan yang bersifat *parawidya* (ilmu pengetahuan spiritual). Setelah mengakhiri masa belajarnya, seorang *brahmacarya* secara periodik kemudian akan memasuki dunia *grehastha asrama*, yakni masa untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Fase ini diawali dengan sebuah upacara yang disebut upacara *wimaha samskara* (upacara perkawinan) sebagai tanda sahnya sebuah perkawinan menurut pandangan agama Hindu.

Setelah seseorang memasuki kehidupan *grehastha asrama*, maka orang bersangkutan secara sosiologis telah memiliki kewajiban untuk (1) meneruskan keturunan; (2) melaksanakan berbagai kegiatan upacara keagamaan; dan (3) melakukan kegiatan sosial lainnya. Menurut Bagus (dalam Koentjaraningrat, 1995:294) perkawinan merupakan momen yang sangat penting bagi kehidupan orang Bali. Sebab dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali, hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota kekerabatan (*banjar, desa, subak*, atau *dadia*) baru diakui setelah mereka memasuki masa *grehastha asrama* (setelah mereka kawin). Lebih lanjut menurut Bagus, dalam adat lama yang dipengaruhi oleh sistem klen (*dadia*) dan sistem kasta (*wangsa*), maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan di antara warga masyarakat yang masih berada di lingkungan klen masing-masing atau yang sederajat dalam kaitannya dengan kasta. Oleh karena itu, perkawinan adat di Bali yang berlangsung selama bertahun-tahun cenderung bersifat *endogami klen*, yakni perkawinan yang dilakukan di antara anak-anak yang masih satu klen (*tunggal kawitan, tunggal dadia, tunggal sanggah*). Keadaan ini memang agak menyimpang jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya di Indonesia yang menganut sistem stratifikasi sosial, yang secara umum bersifat *exogami*.

Berbicara masalah keluarga yang akhirnya menimbulkan adat perkawinan, ada beberapa teori tentang perkembangan keluarga manusia yang disebut teori evolusi keluarga. Salah satunya dikemukakan oleh Bachopen dalam bukunya "*Das Mutter Recht*" (1861) yang menegaskan bahwa keluarga manusia di seluruh dunia telah berkembang melalui empat tingkat evolusi. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut meliputi, *pertama*, disebut masa *promiskuitas*, yakni suatu masa di mana manusia hidup menyerupai sekawanan binatang berkelompok, di mana antara laki-laki dan perempuan bebas

melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Pada masa kehidupan seperti ini keluarga inti sebagai satu kesatuan sosial dalam masyarakat belum dikenal. Dengan sistem semacam ini anak-anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas ibu dan anak-anak tanpa mengetahui siapa ayahnya. Lama-kelamaan manusia mulai menyadari hubungan antara ibu dengan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat dan anak-anak hanya mengenal ibunya tanpa mengenal siapa ayahnya. Dengan demikian dalam menjalani kehidupan keluarga ibulah yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya atau bertindak sebagai kepala keluarga dan perkawinan antara ibu dengan anak laki-lakinya dihindari dengan demikian lahirlah adat perkawinan *exogami*.

Kedua, tahap *matriarchate*, yakni suatu tahap perkembangan kehidupan keluarga manusia, di mana dalam menjalani kehidupan segala sesuatunya diperhitungkan melalui garis keturunan ibu. Misalnya, menyangkut sistem pewarisan, penerusan berbagai tata nilai, adat, budaya, dan sistem sosial lainnya senantiasa diperhitungkan menurut garis keturunan ibu. Namun, dalam perkembangannya para laki-laki merasa tidak puas dengan sistem kekerabatan semacam ini, lalu ketika laki-laki dewasa mulai memasuki kehidupan berumah tangga, maka mereka mengambil calon-calon istri mereka dari kelompok-kelompok lain dan membawa gadis-gadis yang akan dijadikan istrinya ke dalam kelompok keluarga mereka. Dengan sistem semacam ini untuk selanjutnya anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut juga tetap tinggal di lingkungan keluarga laki-laki dan garis keturunan selanjutnya ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah. Keadaan ini secara evolusi menyebabkan timbulnya kelompok keluarga inti di

mana laki-laki berperan dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sistem semacam ini kemudian dikenal dengan istilah *patriarchat*.

Kemudian tingkat keempat dan sekaligus tingkat terakhir dari perkembangan evolusi keluarga manusia menurut Bachopen adalah berubahnya sistem perkawinan *eksogami* menjadi sistem *endogami* karena anak-anak sekarang senantiasa berhubungan langsung baik dengan anggota keluarga ayah maupun dengan anggota keluarga ibu. Dengan demikian sistem kekerabatan *patriarchat* pun lama-kelamaan juga berubah menjadi sistem *parental*. Dari sejarah perkembangannya, teori evolusi keluarga ini kemudian diterapkan terhadap aneka warna kebudayaan Indonesia oleh seorang ahli antropologi Belanda, yang bernama Wilken (1847—1861) yang menegaskan bahwa tingkat-tingkat evolusi keluarga menurut Bachopen yang meliputi sistem *promiskuitas*, *matriarchat*, *patriarchat*, dan *parental* berlaku juga di Indonesia (Koentjaraningrat, 1980:39—40). Dengan mengikuti teori Bachopen dan Wilken di atas, maka dapat dipahami bahwa sampai saat ini beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Bali masih memegang teguh sistem kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan melalui garis laki-laki (*patriarchat*).

2. Penerapan Desiplin Rohani bagi Generasai Muda

Sebagaimana digambarkan Piliang (2004:97) bahwa kapitalisme global kini tidak hanya mempunyai ilmu untuk berkembang dan bertumbuh, tetapi juga mempunyai ilmu untuk tumbuh dan berkembang dengan tempo yang sangat cepat yang disebut *dromologi* atau ilmu percepatan. Menurut Virilio (dalam Piliang, 2004:98) bahwa kecepatan merupakan ciri dari sebuah kemajuan, oleh karenanya ia membentuk kemajuan-kemajuan dalam

tempo yang sangat tinggi. Namun, dalam konteks pendidikan masuknya sistem kapitalisme ke dalam dunia pendidikan telah menciptakan sebuah kondisi bertautnya loka pendidikan dengan logika kapitalisme (*logics of capitalism*). Pendidikan kemudian menjelma menjadi sebuah mesin kapitalisme (*capitalist machine*), yaitu mesin untuk mencari keuntungan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga menjadi mesin citra kapitalisme, yakni mesin yang menciptakan citra-citra (lembaga, individu, pengetahuan) yang sesuai dengan citra kapitalisme itu sendiri (Piliang, 2004:355).

Akibatnya, dunia pendidikan yang seharusnya dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivitas, keilmiah (*scientific*), dan kebijaksanaan (*virtue*), sebagai nilai dasar dalam pencarian pengetahuan kini dimuati oleh nilai-nilai komersial, sebagai refleksi dari keberpihakan pendidikan pada kekuasaan kapital. Menghadapi dunia yang serba kapitalis dewasa ini, membuat masyarakat, khususnya para remaja (generasi muda) sangat sulit untuk menghindarkan diri dari jeratan sistem kapitalisme tersebut yang ujung-ujungnya senantiasa bermuara pada pencarian keuntungan secara ekonomi. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini berdimensi ekonomi. Oleh karenanya nilai-nilai kearifan lokal yang dulu menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat Bali, kini mulai bergeser dari nilai-nilai yang bersifat lokal tradisional ke nilai-nilai global yang bersifat pragmatis. Misalnya, nilai tolong-menolong dan gotong-royong yang dulu lumrah ditemukan dalam kehidupan masyarakat lokal tradisional, kini bergeser ke sistem upah, kehidupan kebersamaan yang dalam istilah Balinya disebut *sagilik-sagululuk salunglung sabayantaka paras-paros sarpenaya*, kini juga telah bergeser ke sistem kehidupan *“mati iba idup kae”* (biarlah kamu mati yang penting saya tetap bisa hidup) dan begitu seterusnya. Menghadapi dinamika kehidupan sosial budaya

yang begitu kompleksnya di era kapitalisme global dewasa ini, maka pendidikan sosial keagamaan menjadi sangat penting, terutama bagi kalangan generasi muda. Bagi masyarakat modern menghadapi dunia semacam ini diperlukan disiplin rohani yang dalam konteks Hindu disebut *sadhana spiritual* yang tinggi. Sebab melalui disiplin rohani inilah manusia akan mendapatkan kedamaian, baik dalam kehidupan dunia spiritual maupun dalam kehidupan dunia material. Menurut Sandika (2011:22) kedamaian merupakan sifat *atma* yang hanya dapat dicapai dalam hati yang termurnikan, dalam arti hati yang jauh dari rasa dengki, iri hati, sombong, serakah, dan banyak diliputi oleh hawa nafsu. Sementara pada diri seseorang yang hatinya penuh diliputi oleh keserakahan, rasa dengki, iri hati, sombong, penuh keinginan, dan nafsu sangat sulit untuk mencapai kedamaian.

Agar mampu menerapkan disiplin spiritual (*sadhana spiritual*) ini, maka seseorang harus dididik dari sejak dini, agar sifat-sifat kedewataan bisa tumbuh pada diri orang tersebut dari sejak kecil. Hal menarik yang perlu dipahami oleh para *brahmacharya* terkait dengan *sadhana spiritual* ini adalah melalui penerapan *sadhana spiritual*, generasi muda yang jiwanya dipenuhi oleh sikap-sikap vitalitas, seperti pergolakan antara rasa suka *vs* tidak suka, rasa cinta *vs* rasa benci, rasa sedih *vs* rasa gembira, dan seterusnya akan dapat dikendalikan dengan baik. Ketika seorang *brahmacharya* mampu menjalankan disiplin rohani dengan baik, maka mereka akan mampu menghindarkan diri dari berbagai kesulitan hidup yang telah menghadang di depan mata. Untuk bisa menerapkan disiplin rohani bagi generasi muda sebagaimana digambarkan di atas, pendidikan sosial keagamaan (sosiologi agama) dan sosial kependidikan (sosiologi pendidikan) memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian sebab melalui sosiologi pendidikan dan sosiologi agama perubahan dan perkembangan kelakuan anak didik

dapat diarahkan kepada hal-hal yang bertalian dengan ajaran agama yang dianutnya dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan secara universal yang berkembang dalam masyarakat.

Pendidikan dalam konteks ini bertalian dengan transfer pengetahuan dan transmisi nilai sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Berangkat dari gambaran tersebut dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa pendidikan pada esensinya merupakan proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia, sesuai dengan fungsi dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Nasution (2009:10) kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dapat dipelajari melalui interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang diketahui seseorang merupakan hasil hubungan orang bersangkutan dengan orang lain, di rumah, di sekolah, tempat permainan, di tempat bekerja, dan lain sebagainya yang selanjutnya disebut pengetahuan empiris. Sementara dalam konteks pendidikan Hindu dikenal adanya pengetahuan tentang *atma (atma vidya)* yang dalam konteks ilmu pengetahuan modern disebut ilmu pengetahuan spiritual. *Atama vidya* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat dari diri kita sendiri (ilmu pengetahuan tentang diri sejati). Ilmu tentang diri sejati (*atma vidya*) sebenarnya sangat penting dipelajari oleh generasi muda, karena ilmu ini nantinya bisa menjadi basis dari keyakinan kita terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Logikanya seperti ini, ketika seseorang mulai kehilangan jati diri dan kepercayaannya terhadap diri sendiri, maka ketika itu pula orang bersangkutan akan kehilangan kepercayaannya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi sangat logis, sebab bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri. Hal ini

menjadi semakin logis, sebab kita sangat meyakini bahwa di dalam setiap makhluk hidup ada Tuhan (*Sarvam Kaluvidam Brahman*), sementara jika kita percaya pada diri sendiri itu berarti kita juga percaya pada *Brahman* yang ada dalam diri kita.

Namun, dalam kenyataannya banyak orang yang lebih senang mengejar pengetahuan duniawi dibandingkan pengetahuan tentang diri sejati (*atma vidya*), padahal pengetahuan duniawi justru membuat seseorang semakin terikat oleh kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Sebaliknya, dengan menguasai pengetahuan tentang diri sejati (*atma vidya*) seseorang diyakini akan dapat mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan abadi (*anandam*) yang merupakan sifat dan hakikat manusia yang sesungguhnya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pengetahuan mengenai sang diri sejati (*atma vidya*) dengan pengetahuan tentang Tuhan (*brahma vidya*) adalah sama. Artinya, baik pengetahuan tentang *atma* (*atma vidya*) maupun pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa (*brahma vidya*) merupakan suatu pengetahuan yang berada dalam satu garis kontinum, yakni pengetahuan spiritual.

Dasar pengetahuan *atma vidya* dan *brahma vidya* ini adalah penyucian pikiran, yang dapat ditempuh dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan suci. Dalam pandangan Hindu sebenarnya pada masa muda (*brahmacharya*) inilah saat yang paling baik untuk memulai melakukan penyucian pikiran dengan melakukan disiplin rohani (*sadhana spiritual*). Sangat keliru, jika ada orang yang menganggap bahwa belajar penyucian pikiran dimulai saat seseorang memasuki usia tua. Mengapa demikian sebab pada masa tua sangat sulit untuk memurnikan pikiran, karena pikiran seseorang telah diliputi oleh berbagai persoalan yang sangat kompleks. Sementara pada masa muda pikiran kita masih tajam, kecerdasan intelektual juga masih

cemerlang, sehingga memudahkan seseorang dalam upaya mencari kebenaran atau kesejatan dirinya. Untuk mendalami pengetahuan tentang kesejatan diri (*atma vidya*), seseorang bisa dimulai dari pertanyaan “adakah sesuatu yang dapat terus hidup di dalam badan manusia, ketika seseorang telah mengalami kematian? Setelah manusia itu mati kemanakah roh mereka itu pergi atau apakah roh yang bersemayam di dalam badan kasar manusia juga ikut mati?”

Dengan mempelajari dan mendalami hakikat dari jati diri seseorang, akhirnya Maharsi pada zaman *Upanisad* menemukan zat yang disebut *atman* atau sang diri sejati sebagai jiwa yang bersemayam di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Menurut para Maharsi *atman* ini tidak mengalami kelahiran dan kematian seperti yang dialami oleh badan kasar manusia. Akan tetapi mereka tidak dilahirkan dan bersifat abadi, hal ini dijelaskan dalam kitab Bhagavadgita sebagai berikut.

*avināsi tu tad viddhi yena sarvam idam tatam,
vināśam avyayasayāsyā na kascit karum arhati.*
(Bhagavadgītā, 2.17)

Artinya:

Hendaknya engkau mengetahui bahwa apa yang ada dalam seluruh badan tidak dapat dimusnahkan. Tidak seorang pun dapat membinasakan sang roh yang tidak dapat dimusnahkan itu (Prabhupāda, 1986:92).

Di dalam Bhagavadgita 2.20 disebutkan pula sebagai berikut.

*na jāyate mriyate vā kadācin
nāyam bhūtvā bhavitā vā na bhūyah
ajo nityaḥ śāśvato 'yam purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre*

Artinya:

Tidak ada kelahiran maupun kematian bagi sang roh pada saat manapun. Dia tidak diciptakan pada masa lampau, ia tidak diciptakan pada masa sekarang, dan dia tidak akan diciptakan pada masa yang akan datang. Dia tidak dilahirkan, berada untuk selamanya dan bersifat abadi. Dia tidak akan terbunuh apabila badan dibunuh (Prabhupāda, 1986:96).

Berangkat dari kedua isi sloka Bhagavadgita di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *atman* yang bersemayam dalam tubuh setiap makhluk hidup bersifat kekal dan abadi. Dia tidak dapat dibunuh oleh siapa pun, dan dia yang abadi tersebut tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Akan tetapi perwujudan dari roh itulah yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.

B. Pendidikan dalam Dinamika Masyarakat

1. Jenis-Jenis Pendidikan dalam Masyarakat

Berbicara tentang jenis-jenis pendidikan, maka landasan argumentasinya harus mengacu pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan pada jalur sekolah merupakan pendidikan yang berjenjang, yakni tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keleluasaan, dan kedalaman materi ajar, dan metode pengajarannya (Depdikbud, 1992:36). Berbicara jalur pendidikan sekolah di Indonesia dikenal ada beberapa jenjang antara lain, jenjang pendidikan prasekolah (PAUD), jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan prasekolah (PAUD) adalah jenjang pendidikan anak usia dini, yang dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani peserta didik, di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya pendidikan dasar adalah pendidikan umum, dengan lama masa studi adalah sembilan tahun, yakni selama enam tahun di jenjang sekolah dasar dan 3 tahun di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama, atau satuan pendidikan yang sederajat. Sedangkan pendidikan menengah menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.

Kemudian pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan model ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU No.20 tahun 2003). Jenis pendidikan non-formal yang berkembang dalam masyarakat saat ini dapat berupa kursus-kursus, lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat), dan kelompok belajar lainnya yang semua ini mempunyai tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, profesi, dan untuk belajar bekerja secara mandiri.

Sedangkan pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang biasanya dilakukan tanpa terikat pada ruang dan waktu, serta tidak diatur oleh aturan-aturan yang ketat, sebagaimana yang dilakukan pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan informal biasanya diselenggarakan di lingkungan keluarga, di mana anak-anak untuk pertama kalinya mendapatkan pendidikan kemudian dalam konteks pendidikan ini ayah dan ibu dapat berperan sebagai pendidik. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan unit sosial yang terbentuk karena adanya perkawinan. Oleh karenanya, keluarga merupakan kelompok sosial yang terikat oleh hubungan darah (biologis) maupun oleh hubungan perkawinan (Arsana, dalam Dhana, *ed.*, 1994:56).

Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat keluarga mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang sulit digantikan oleh pihak atau orang lain. Fungsi pokok keluarga menurut Khairuddin

(1985:59—60) meliputi: (1) fungsi biologis; (2) fungsi afeksi; dan (3) fungsi sosialisasi. Dengan mengikuti Khairuddin (1985) dapat ditegaskan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat penting dalam upaya pengembangan potensi anak antara lain sebagai berikut. *Pertama*, fungsi biologis mengandung arti bahwa keluarga yang di dalamnya ada orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemenuhan kebutuhan fisik anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, dan ideal, sesuai tingkat perkembangan usia mereka; *Kedua*, fungsi afeksi artinya anak-anak di lingkungan keluarga berhak mendapat perlindungan dari orang tuanya, sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia hidup di lingkungan keluarga mereka. Oleh karena itu, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhkembangnya anak-anak di lingkungan keluarga. Selain itu, orang tua di lingkungan keluarga juga harus senantiasa berusaha untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis di antara anggota keluarga yang diliputi rasa kemesraan, atas dasar hubungan cinta kasih, sehingga dapat memberikan kesejahteraan pada anak, baik secara psikhis maupun emosional; *Ketiga*, adalah fungsi sosialisasi, yakni orang tua di lingkungan keluarga harus mampu mengembangkan intelektual anak melalui penanaman pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Dengan demikian melalui pendidikan keluarga inilah anak-anak dapat mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, tata nilai dalam kehidupan, sopan santun dalam pergaulan, dalam rangka pengembangan kepribadian mereka.

Jika mengacu pada Ade Irawan, dkk., (2006:12) dapat dideskripsikan bahwa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat telah dimaklumi sejak zaman kuno, seperti di zaman

Sparta dan Athena kuno. Di negara kota tersebut, pendidikan diletakan sebagai pondasi dan dijadikan prioritas bagi tumbuhkembangnya peradaban manusia. Namun, dalam pengembangan pendidikan di kedua negara tersebut tampak ada perbedaan yang sangat mencolok, yakni Sparta dalam mengembangkan pendidikan lebih mengutamakan kemampuan jasmani sedangkan negara Athena dalam mengembangkan pendidikan warga negaranya lebih menekankan keselaran antara perkembangan jasmani dan rohani.

Demikian halnya di zaman modern saat ini, pendidikan mempunyai peran yang semakin penting, sebab kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya pendidikan warga negara dari negara bersangkutan. Misalnya, kebangkitan negara Jepang pasca-Perang Dunia II, kemajuan ekonomi yang dicapai Korea Selatan, dan menggeliatnya perekonomian Cina beberapa tahun belakangan ini, merupakan bukti nyata betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, dalam perkembangan dunia yang semakin kapitalistik saat ini, posisi pendidikan terhadap pranata sosial, politik, dan ekonomi, telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal ini dimulai dari negara-negara maju, seperti Inggris, Amerika, Jepang, dan Selandia Baru misalnya, paradigm pendidikan telah bergeser mengikuti hembusan kekuatan pasar. Dengan pola perubahan seperti itu, tidak mengherankan jika pendidikan yang semula bertujuan untuk meningkatkan derajat kehidupan warganegara dalam aspek kesejahteraan sosialnya, persamaan hak (*equality*) dan solidaritas sosial, kini tidak lebih dari sekadar instrument untuk memberikan sinyal pada pasar akan kemampuan seseorang (*credential*). Hal ini mengandung arti bahwa paradigma pendidikan telah bergeser dari sebelumnya berparadigma pencerahan kemudian bergeser ke

paradigma instrumentalisme. Artinya, pendidikan dalam konteks ini tidak lagi dipandang sebagai alat pembebasan untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia yang terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan, sebagaimana dikatakan Paulo Freire (dalam Yunus, 2007:1), melainkan pendidikan hanya dipandang sebagai sebuah mesin pencipta tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Kondisi demikian tentu dapat mengesampingkan rasa keadilan antar kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat, baik dalam hal etnis, ras, agama, maupun gender.

Menurut Irawan, dkk., (2006:13) perubahan paradigme pendidikan semacam itu terjadi, karena negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dibangun dalam kerangka ekonomi nasional dipandang sebagai biang keladi munculnya inflasi, pengangguran yang tinggi, resesi ekonomi, dan ketidakstabilan sosial. Di sisi lain ketidakmampuan negara kesejahteraan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu akibat terlalu besarnya campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Salah satu argument yang dibangun untuk menguatkan logika ini adalah tingginya pembayaran pajak oleh masyarakat belum mampu memberikan insentif bagi orang-orang untuk bekerja lebih giat lagi.

2. Pendidikan dan Lingkungan Sosial

Pendidikan dalam posisinya sebagai cabang ilmu pengetahuan, ternyata sangat bergantung pada peta klasifikasi rumpun ilmu secara keseluruhan. Oleh karenanya, pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Dengan demikian tidak berlebihan jika John Dewey (1961:2) mengatakan "*education is the means of social continuity of life*" artinya, pendidikan adalah alat kontinuitas sosial kehidupan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan,

pendidikan pada esensinya selalu melakukan pembenahan diri dari waktu ke waktu. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana penemuan dan pengembangan berbagai konsep dan teori baru dalam konteks pendidikan.

Dalam rangka pengembangan kepribadian anak-anak, pendidikan sebagai aspek lingkungan sosial berperan sangat penting *dalam* pembentukan karakter anak itu sendiri. Dikatakan demikian sebab, lingkungan khususnya lingkungan sosial sebagai unsur eksternal akan saling mempengaruhi dengan faktor bawaan (*hereditet*) sebagai unsur internal dan bersatu padu (*interdependence*) di antara keduanya. Artinya, perkembangan kepribadian anak-anak akan dapat tumbuh dengan baik jika didukung oleh lingkungan (baca:lingkungan sosial) yang baik pula. Misalnya, seorang anak yang lahir dan berkembang di lingkungan pelukis, ketika mereka secara inten dan terus-menerus hidup dan bergaul di lingkungan orang-orang yang biasa melakukan aktivitas melukis, maka setidaknya anak itu juga bisa tumbuh menjadi pelukis yang baik. Tetapi, ketika anak itu tidak memiliki bakat sebagai seorang pelukis, maka kemampuan mereka dalam hal melukis tidak akan bisa maksimal.

Sebaliknya, ketika seorang anak mempunyai bakat sebagai seorang pelukis dan kemudian mereka hidup dan berkembang di lingkungan orang-orang yang kesehariannya melakukan aktivitas melukis, maka anak demikian akan dapat berkembang menjadi pelukis yang hebat. Namun, jika seorang anak yang berbakat sebagai pelukis lalu mereka tidak dibentuk oleh lingkungan pelukis, maka anak bersangkutan tidak akan berkembang menjadi pelukis yang hebat dan begitu seterusnya. Kondisi demikian seirama dengan terminologinya Wiliam Stern sebagaimana dikutip Abu Ahmadi (1991:21) dalam teorinya yang disebut teori Konvergensi. Teori ini

menegaskan bahwa perkembangan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor bakat dan lingkungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan (*interdependence*), yakni satu sama lainnya seolah-olah memadu atau bertemu dalam satu titik bagaikan dua sisi mata uang logam yang tidak mungkin dipisahkan.

Jadi, menurut pandangan Wilam Stern faktor lingkungan mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan faktor bawaan anak dalam membentuk kepribadiannya. Pandangan Wiliam Stern ini secara pedagogisme merupakan sintesa dari pandangan nativismenya Schopenhower yang beranggapan bahwa anak-anak begitu dilahirkan telah memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang dibawanya dari sejak lahir dengan pandangan John Locke dalam teori empirismenya yang mengatakan bahwa anak dilahirkan bagaikan kertas putih bersih yang kemudian kertas inilah yang diisi oleh pendidikan melalui pengaruh lingkungan (Tilaar,1999:19).

Pandangan yang sedikit berbeda terkait hakikat pendidikan adalah pandangan sosiologisme pendidikan. Pandangan ini menekankan bahwa pada hakikatnya pendidikan itu menekankan keperluan hidup bersama dalam masyarakat. Jika dicermati secara seksama pandangan sosiologisme pendidikan ini cenderung berlawanan dengan pandangan pedagogisme. Jika pandangan pedagogisme ini memberikan penghormatan yang berlebih kepada hakikat anak, sehingga melahirkan *child centered education* dan cenderung melupakan bahwa anak itu hidup dalam masyarakat tertentu dan mempunyai cita-cita hidup bersama pula. Tetapi tidak demikian dengan pandangan sosiologisme, menurut pandangan ini anak-anak sebagai anggota masyarakat memiliki keperluan hidup bersama, oleh karenanya mereka harus dididik agar tumbuh menjadi anggota masyarakat yang baik.

Namun demikian, secara filosofis seluruh tuntutan kehidupan bersama dalam masyarakat belum tentu dapat dibenarkan secara etis. Sebab pada realitasnya banyak terjadi dalam kehidupan nyata tuntutan masyarakat didominasi oleh kepentingan sekelompok orang yang terorganisir dalam struktur masyarakat tertentu yang acapkali dibungkus dengan ideologi tertentu yang bersifat menindas kebebasan individu. Dengan demikian tidak jarang pendidikan dijadikan sebagai alat penindasan oleh kaum berkuasa dalam masyarakat sosialis atau dalam masyarakat totaliter lainnya. Dalam masyarakat yang menganut paham sosialis atau totaliterime, pendidikan dipandang tidak lebih dari sebuah proses indoktrinasi untuk mencetak manusia-manusia robot, dalam arti manusia yang menjadikan kata hati, moralitas, etika, dan lain-lain hanya sebagai pertimbangan kedua. Hal ini disebabkan masyarakat yang menganut paham tersebut selalu berusaha untuk mempertahankan status quo, karena mereka memperoleh manfaat dari sistem yang sedang dijalkannya.

Versi yang sedikit berbeda dari pandangan sosiologisme terkait dengan hakikat pendidikan adalah pandangan developmentalisme. Menurut Fakih (dalam Tilaar, 1999:26) pandangan developmentalisme beranggapan bahwa hakikat pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan (*development*). Pandangan ini dilandasi oleh sebuah cita-cita untuk mempercepat pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan. Akibat pandangan demikian orang-orang menjadi terobsesi untuk mencapai perkembangan secepat mungkin, agar mampu bersanding dan bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semuanya diabdikan kepada pencapaian target, yang umumnya merupakan target ekonomi, sehingga

dimensi-dimensi humanis dari sebuah proses pendidikan cenderung dimarginalisasikan.

Sementara nilai-nilai komersial dari sebuah proses pendidikan justru lebih ditonjolkan, sehingga dalam pandangan developmentalisme pendidikan dianggap sebagai alat kebenaran untuk mencari keuntungan ekonomi. Akibatnya, muncullah jargon-jargon pendidikan yang berbasis nilai-nilai komersial, yang tidak jarang dikemas dalam bahasa *advertising*, untuk disosialisasikan melalui media massa, baik elektronik, maupun media cetak. Dengan demikian secara faktual pendidikan telah berubah status dari sebelumnya bukan merupakan barang komoditas, kini telah dianggap sebagai barang komoditas yang layak "dijual-belikan" di pasar.

Terkait dengan keberadaan pendidikan sebagai barang komoditas, Suda (2009) dalam artikelnya yang berjudul "Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual" menegaskan bahwa masuknya sistem komersialisasi ke dalam institusi pendidikan dapat berimplikasi negatif terhadap proses pendidikan itu sendiri. Artinya, komersialisasi yang terjadi di dunia pendidikan cepat atau lambat dapat menggeser visi mulia dari lembaga pendidikan itu sendiri, yakni dari visi pencerahan menjadi sekadar alat untuk meraup keuntungan ekonomi. Dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa terjadinya komersialisasi pendidikan dapat berakibat munculnya akumulasi kapital yang dapat memposisikan pendidikan sebagai komoditi ekonomi. Ketika pendidikan menjadi sebuah akumulasi kapital, maka proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah formal, tidak lebih dari sebuah ritual pengajaran yang tidak bermakna apa-apa.

Dikatakan demikian sebab ketika prinsip-prinsip bisnis telah merambah dunia pendidikan, maka tidak tertutup kemungkinan guru sebagai seorang pendidik tidak lagi berperan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pendewasaan peserta didik, tetapi lebih berperan sebagai broker berbagai produk industri yang siap "memangsa" siapa saja, termasuk peserta didiknya sendiri. Jika kondisi ini yang melanda dunia pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi kanibalisme intelektual dalam bidang pendidikan. Keadaan ini sangat bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia tempo dulu, yakni karakter yang bersifat teposalero, mengedepankan musyawarah mufakat, suka bergotong-royong, telong-menolong, dan sikap kebersamaan (komunalisme).

BAB III

Hubungan Pendidikan dengan Struktur Sosial Masyarakat

A. Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Hubungannya dengan Pendidikan

Dengan mengacu pada Sanderson (1993:60) dapat dipahami bahwa sistem sosiokultural masyarakat secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian besar, yakni infrastruktur material, struktur sosial, dan superstruktur ideologis. Jika dilacak lebih dalam lagi infrastruktur material menurut Sanderson berisi bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Infrastruktur material sebuah masyarakat merupakan komponen yang paling dasar, artinya tanpa komponen-komponen tersebut manusia tidak mungkin dapat bertahan secara fisik. Selanjutnya struktur sosial merujuk pada pola-pola perilaku aktual manusia sebagai lawan dari konsepsi-konsepsi mental yang dimiliki orang tentang pola-pola tersebut. Contoh struktur sosial berisi apa yang dilakukan orang secara aktual, bukan apa yang mereka katakan mereka lakukan, bukan pula apa yang mereka pikirkan mereka lakukan atau yang mereka pikir harus mereka lakukan. Sedangkan superstruktur ideologis meliputi cara-cara yang telah terpolakan, yang dengannya anggota masyarakat

berpikir, melakukan konseptualisasi, menilai dan merasakan sesuatu, sebagai lawan dari apa yang mereka lakukan secara aktual.

Berbicara soal stratifikasi sosial dalam masyarakat, maka dapat mengacu pada adanya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang tidak sama. Terjadinya stratifikasi sosial (difrensiasi sosial) dalam kehidupan masyarakat, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, pada masyarakat Bali ketika mata pencaharian penduduk sebagian besar bergantung pada kehidupan sektor pertanian, maka stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat Bali saat itu didasarkan atas *wangsa* dan *sorob*. Pelapisan masyarakat Bali berdasarkan *wangsa* terkonfigurasi dalam bentuk *tri wangsa*, yakni *Brahmana*, *Kastrya*, dan *Wesya* ditambah *Jaba Wangsa*. Sedangkan pelapisan sosial masyarakat berdasarkan *sorob* terbagi ke dalam beberapa jenis antara lain, ada sorob pasek, yakni (Pasek Gelgel, Pasek Tangkas, Pasek Pegatepan, Pasek Kayu Selem, dan lain-lain), demikian pula pada *wangsa Brahmana* (ada Brahman Mas, Brahmana Manuaba, Brahmana Keniten, dan lain-lain) (Dwipayana, 2001).

Selain pelapisan masyarakat yang didasarkan atas *wangsa* atau *sorob* ada juga pelapisan masyarakat yang didasarkan atas kelas-kelas dalam masyarakat. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh keberhasilan anggota masyarakat dalam meningkatkan jenjang pendidikan formalnya. Misalnya, keberhasilan anggota masyarakat di daerah pedesaan untuk meningkatkan jenjang pendidikan formalnya, ternyata berimplikasi terhadap munculnya pelapisan sosial masyarakat yang didasarkan atas jenis pekerjaan yang digelutinya. Hal ini disebabkan, banyak anggota masyarakat pedesaan setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai ke

jenjang pendidikan tinggi, tidak mau lagi mengambil pekerjaan di sektor pertanian, yang telah bertahun-tahun digeluti oleh orang tuanya atau leluhurnya. Namun, banyak diantara mereka yang lebih memilih pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti menjadi pegawai negeri, pegawai kantor, menjadi pengusaha, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya di luar pekerjaan sebagai petani. Mereka-mereka ini akhirnya banyak yang berhasil meraih harta kekayaan yang banyak, sehingga melahirkan kelas-kelas baru dalam masyarakat berdasarkan kekayaan atau kekuasaan (Magnes-Suseno, dalam Atmadja, 2010:48).

Dalam perkembangannya mereka-mereka inilah yang kemudian disebut kelas menengah baru atau orang kaya baru yang sering disebut (OKB) yang senantiasa mendasarkan hidupnya pada tradisi non-pertanian (baca: tradisi masyarakat modern). Stratifikasinya dalam struktur sosial masyarakat agraris berada pada posisi yang sebelumnya ditempati oleh orang-orang kaya lama (OKL) yang mendasarkan hidupnya dari kehidupan sektor pertanian (baca:tuan tanah). Karena keberhasilannya dalam menempuh jenjang pendidikan formal yang tinggi, akhirnya banyak anggota masyarakat desa yang melakukan mobilitas sosial dan mobilitas geografi, yakni pindah ke kota dengan maksud untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang diraihnya.

Ada hal menarik yang perlu dicermati dari kemunculan orang-orang kaya baru atau kelas menengah baru yang diakibatkan oleh terjadinya mobilitas sosial vertikal, karena mereka berhasil menempuh jenang pendidikan yang tinggi. Mereka-mereka yang berhasil melakukan mobilitas sosial vertikal, tidak saja berasal dari kelas menengah baru, melainkan banyak juga yang berasal dari

orang-orang kaya lama (OKL). Hal ini bisa terjadi, karena kecerdikan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang tergolong orang kaya lama, yakni mereka tidak mau ketinggalan dalam mengikuti jenjang pendidikan formal yang tinggi. Akibatnya, posisi sosial mereka tetap eksis, bahkan menjadi semakin kokoh. Hal menarik lainnya dari adanya mobilitas sosial vertikal dan mobilitas geografi ini adalah adanya dukungan revolusi transportasi (dalam bentuk sepeda motor, dan mobil) serta revolusi komunikasi seperti (TV, *handphone*, surat kabar, radio dan lain-lain) membuat banyak masyarakat pedesaan yang menjadi semakin kosmopolitan.

Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan jenjang pendidikannya, sampai ke jenjang pendidikan tinggi, dan atas berbagai pengetahuan yang dimilikinya mereka berhasil meraih materi yang banyak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, berhasilnya masyarakat dalam melakukan mobilitas penduduk, baik mobilitas sosial maupun mobilitas geografi, dapat berakibat terjadinya perubahan sosial dan perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menurut Arta, dkk., (2020:129) disebabkan banyaknya warga desa, yang karena tingkat pendidikan formalnya meningkat lalu mereka mencari pekerjaan ke kota, dan tinggal menetap untuk sementara di kota. Mereka-mereka inilah yang kemudian mempunyai keinginan untuk mengubah tradisi masyarakat desanya, sesuai dengan tradisi yang dialaminya di tempat mereka bekerja. Sementara kelompok lain yang tinggal dan menetap di desa, ingin mempertahankan tradisinya, karena mereka menganggap tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakatnya masih tetap relevan atau sesuai dengan kepentingannya.

Keadaan ini acapkali menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat pedesaan itu sendiri. Perpecahan yang terjadi sering pula berakibat munculnya konflik antar warga desa, yang tidak jarang diwarnai oleh konflik antar *soroh* antar *wangsa*, antar kelas, dan antar keanggotaan partai. Hal inilah yang membuat dinamika perubahan sosial budaya masyarakat pedesaan mejadi sangat kompleks. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk, baik mobilitas sosial vertikal, maupun mobilitas geografi yang disebabkan karena keberhasilannya dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata dapat mempengaruhi munculnya pelapisan masyarakat (stratifikasi sosial) dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

B. Stratifikasi Sosial dalam Dunia Pendidikan

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan pengembangan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terkait dengan amanat UU tersebut, maka mata pelajaran yang mengemban tugas untuk membentuk sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia bagi para peserta didik, seperti Pelajaran Agama, Budi Pakerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seharusnya disekala prioritaskan. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah semua mata pelajaran yang terkait dengan pembentukan kepribadian anak justru dimarginalkan (dipinggirkan).

Sebenarnya, munculnya pandangan yang menganggap pendidikan agama dan humaniora lainnya sebagai mata pelajaran yang tidak terlalu penting (termarginalkan) di kalangan peserta didik adalah bermula dari dikeluarkannya Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Oprasional Standar (POS) ujian nasional tahun 2013. Di dalam peraturan tersebut pelajaran agama, kesenian, olahraga, bahasa daerah dan lain-lain tidak dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan nasional. Adanya kebijakan semacam itu, secara struktural dan sistemik telah membuat mata pelajaran agama, kesenian, olah raga, bahasa daerah dan yang lainnya terpinggirkan. Pasalnya, dengan tidak dimasukkannya mata ajar tersebut ke dalam kelompok mata ajar yang diujikan nasional, maka para siswa akan beranggapan bahwa mata ajar tersebut tidak akan menentukan lulus

atau tidaknya para siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya.

Dengan pola kebijakan seperti itu, penulis berasumsi bahwa dari situlah munculnya stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat akademik. Dalam arti di kalangan siswa muncul anggapan bahwa mata pelajaran yang diujikan nasional harus diberikan skala prioritas untuk dipelajari, sebab mereka takut kalau-kalau nilai yang diperoleh untuk mata ajar yang diujikan nasional itu jelek, sehingga dapat berakibat dirinya tidak lulus. Sebaliknya mata ajar yang tidak diujikan nasional hanya dianggap sebagai mata ajar prasyarat atau mata ajar pelengkap (Suda, 2017:57). Hal ini berbarengan dengan merebaknya paham modernisme melanda dunia ini dengan begitu kuatnya. Di mana dalam kehidupan modern paham kapitalisme demikian kuatnya mendominasi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memunculkan dikotomi antara yang modern dengan yang tradisional. Kehidupan kapitalisme semacam ini juga terjadi di kalangan para siswa sekolah, sehingga di lingkungan sekolah pun muncul dikotomi-dikotomi semacam itu.

Misalnya, anak perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan anak laki-laki, jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pandangan dari para penganut aliran positivisme, yang beranggapan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif (*sains*), yakni ilmu pengetahuan yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Oleh karena itu, bagi ilmu pengetahuan yang tidak melakukan verifikasi dan pengukuran secara ketat terhadap objek garapannya dianggap kurang ilmiah, sehingga harus dipinggirkan. Akibat adanya

pandangan semacam ini, wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan merupakan objek garapan ilmu pengetahuan alam pun ikut disasar. Akibat lainnya, ruang-ruang kehidupan sosial humaniora pun tidak urung dijadikan objek garapan ilmu pengetahuan sains.

Jika dicermati secara lebih dalam, ternyata iklim kultural tersebut bersumber dari munculnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 yang mengakibatkan munculnya gelombang optimisme kalangan ilmuwan yang beranggapan bahwa kemajuan umat manusia akan dicapai melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baca: ilmu pengetahuan sains). Perlu juga dikemukakan di sini bahwa tokoh utama dari aliran positivisme ini adalah Saint Simon (1760—1825) dan muridnya Aguste Comte (1798—1857). Sebenarnya dasar pemikiran Comte untuk mengembangkan aliran positivisme ini adalah keinginannya untuk melawan para pemikir pencerahan yang tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran metafisika yang menurut Comte diyakini sebagai aliran filsafat destruktif atau negatif. Hal ini didorong pula oleh sebuah keyakinan bahwa ilmu pengetahuan positif-ilmiah adalah pengetahuan yang pasti, nyata, dan sangat berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia. Dengan melacak akar perkembangan ilmu pengetahuan positif ini, maka dapat dikatakan bahwa dari sinilah awal mula munculnya stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat akademik, yang secara historis anggapan-anggapan semacam itu, masih tampak adanya sampai saat ini.

C. Proses Munculnya Stratifikasi Sosial dalam Dunia Pendidikan

Jika mengacu pada pandangan Sanderson (1993:61), maka istilah stratifikasi sosial dapat merujuk pada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tidak sama. Sedangkan menurut Marx di dalam masyarakat kapitalis terdapat dua kelas yang satu sama lainnya memiliki karakter yang berbeda, yakni kelas borjuis (memiliki modal dan alat produksi) dan kelas proletar (yang hanya memiliki tenaga dan keterampilan seadanya/kelas buruh). Lebih lanjut menurut Marx bahwa kelas proletar (buruh) senantiasa dituntun untuk membayangkan tentang pengalaman sosialnya, hubungan sosial, dan bahkan tentang diri mereka sendiri melalui seprangkat ide yang bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari kelas yang tidak hanya memiliki kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dengan mereka, tetapi juga sangat bertentangan (Prawacana Penerbit, Buku Tentang Ideologi oleh Althusser, tt:x).

Meski pun Marx mengakui bahwa banyak kemajuan yang dicapai dengan adanya transisi masyarakat dari pra modern menuju ke masyarakat modern (baca: masyarakat kapitalis), namun karya-karya Marx lebih banyak diarahkan untuk mengkritisi sistem ekonomi kapitalis, dibandingkan melihat sisi positif yang ditimbulkan oleh era modernisme itu sendiri. Sebab menurutnya, sistem ekonomi kapitalis telah banyak menimbulkan keterasingan (alienasi) dan eksploitasi, khususnya bagi masyarakat kelas proletar (golongan buruh) di mana sistem ekonomi tersebut diberlakukan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut stratifikasi sosial. Di era yang sangat kapitalis saat ini, ternyata stratifikasi sosial tidak hanya

melanda kehidupan masyarakat pada umumnya, tetapi juga telah menyasar kehidupan masyarakat akademik, yakni dunia sekolah.

Stratifikasi sosial yang terjadi di lingkungan dunia sekolah tidak semata-mata didasarkan atas kepemilikan uang dan kekuasaan, melainkan lebih didasarkan atas kepemilikan modal budaya dalam bentuk modal kultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk pengetahuan. Menurut Bourdieu (sebagaimana dikutip Hasbulah, 2006:7) terminologi modal mencakup tiga bentuk, yakni (1) modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang-barang, dan yang sejenisnya yang dapat digunakan bagi keperluan investasi; (2) modal budaya (kultural) yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan; dan (3) modal sosial yang terdiri atas kewajiban-kewajiban sosial di antaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan. Jadi stratifikasi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah banyak ditentukan berdasarkan kepemilikan pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai bidang ilmu mainstream. Misalnya, anak-anak yang menguasai bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika (kelompok MIPA) dianggap menduduki posisi struktur sosial yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang menguasai bidang ilmu sosial humaniora (kelompok IPS dan Bahasa). Demikian pula mata pelajaran yang tergolong mata pelajaran yang diujikan ujian nasional, juga dianggap mempunyai posisi lebih tinggi dari mata pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok mata uji yang diujikan dalam ujian nasional.

Hal ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 002/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) ujian nasional (UN) tahun

2013, yang menegaskan bahwa mata pelajaran yang diujikan nasional untuk jenjang pendidikan SMA/MA dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kelompok SMA/MA Program IPA meliputi mata uji (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Matematika; (4) Fisika; (5) Kimia; dan (6) Biologi. Sementara untuk kelompok SMA/MA Program IPS meliputi, mata uji (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Matematika; (4) Ekonomi; (5) Sosiologi; dan (6) Geografi. Sedangkan untuk mata pelajaran tertentu seperti Agama, Kesenian, Olahraga, Bahasa Daerah dan lain-lain tidak dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan ujian nasional.

Adanya kebijakan untuk tidak memasukan beberapa mata pelajaran ke dalam kelompok mata pelajaran yang diujikan nasional inilah merupakan sebuah proses penguatan adanya stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat sekolah. Memang jauh sebelum ditetapkannya beberapa mata pelajaran, masuk ke dalam mata uji ujian nasional telah ada pandangan mainstream di lingkungan masyarakat akademik yang memandang bahwa kelompok mata pelajaran MIPA memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok mata pelajaran Ilmu Sosial dan Humaniora. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang menganggap bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif (ilmu-ilmu sains). Ilmu pengetahuan positif adalah ilmu pengetahuan yang berangkat dari fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan diukur secara ketat. Sementara ilmu pengetahuan yang tidak melakukan verifikasi dan pengukuran secara ketat terhadap fenomena yang menjadi objek garapannya dianggap berada pada posisi di bawahnya.

Dari kenyataan tersebut, maka kemunculan ilmu pengetahuan positif tidak bisa dilepaskan dari iklim kultural yang

memungkinkan berkembangnya gerakan untuk menerapkan cara kerja ilmu pengetahuan sains dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Jika dilacak lebih jauh lagi akar permasalahan ini, maka akan ditemukan bahwa anggapan tentang pengetahuan positif merupakan puncak pengetahuan manusia, bermula dari adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 yang mengakibatkan timbulnya gelombang optimisme menganggap bahwa kemajuan umat manusia hanya dapat dicapai melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gelombang optimisme ini oleh Comte kemudian dijadikan dasar gerakannya untuk melawan para pemikir pencerahan yang tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran metafisika yang oleh Comte diyakini sebagai filsafat destruktif atau negatif. Hal ini dilandasai oleh keyakinan Comte bahwa pengetahuan positif-ilmiah adalah pengetahuan yang pasti, nyata, dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia. Dari situlah sebenarnya awal munculnya imperialisme pengetahuan sains terhadap ilmu pengetahuan sosial-humaniora, yang dalam perkembangannya memunculkan "kasta" baru dunia pendidikan. Dalam arti, kelompok mata pelajaran yang termasuk kelompok ilmu-ilmu positif-ilmiah dipandang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kelompok mata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Munculnya pandangan semacam itu, dapat pula dipandang sebagai awal mula munculnya stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat akademik atau masyarakat sekolah.

BAB IV

Fenomena Pendidikan Dewasa Ini dan Munculnya Berbagai Labeling terhadap Lembaga Pendidikan

A. Fenomena Pendidikan dalam Masyarakat Dewasa Ini

Pendidikan dalam pandangan Freire (2002:12—13) merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan. Sedangkan menurut Kneller (dalam Manan,1989:10) pendidikan seharusnya dapat dijadikan sebuah enkulturasi, bagi proses pembentukan karakter anak-anak, dalam arti sebuah proses pembudayaan. Selain, Freire dan Kneller, Jean Prancois Lyotard dalam bukunya *"The Postmodern Condition: A Report on Knowledge"* (1984), juga banyak menyoroti pendidikan dalam kaitannya dengan filsafat, teori, dan kebijakan pendidikan. Lyotard dalam kajiannya tersebut lebih banyak membahas tentang status pengetahuan yang telah mengalami perubahan, ketika masyarakat mulai memasuki era post industrial. Dalam konteks ini Lyotard berpendapat bahwa pengetahuan di era post industri telah menjadi kekuatan penting dari proses produksi, dalam arti pendidikan telah merubah komposisi tenaga kerja di negara-negara maju.

Selain tokoh-tokoh tersebut, Pierre Bourdieu seorang ahli Sosiologi Pendidikan berkebangsaan Prancis, dalam bukunya "*Habitus X Modal + Ranah = Praktik*" (1984) menegaskan bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan tempat perwujudan kelompok dominan yang mengontrol sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik yang nantinya akan bekerja sebagai strategi reproduksi bagi kelompok dominan. Jika dilacak akar pemikiran Bourdieu mengenai sekolah yang dipandang sebagai tempat perwujudan kebudayaan kelompok dominan, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa, institusi-institusi pendidikan yang ada di era post industrial ini, telah terstruktur untuk menguntungkan mereka-mereka yang telah memiliki modal budaya dalam bentuk habitus fraksi budaya dominan. Misalnya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor yang duduk dalam struktur lembaga pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pihak yayasan untuk kasus sekolah swasta sebagai kaum dominan, dalam melakukan permainan dan upaya saling mempertaruhkan dan memperebutkan modal, baik modal ekonomi, modal budaya, maupun modal sosial, dalam rangka mendominasi kalangan subordinat yang dalam hal ini adalah para orang tua siswa.

Terminologi modal menurut Bourdieu yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh *marxist sociology* dapat diklasifikasi menjadi tiga bentuk, yakni (1) modal ekonomi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, barang, atau kepemilikan benda-benda yang dapat dipandang dan digunakan untuk keperluan investasi; (2) modal kultural, adalah segala sesuatu yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan; dan (3) modal sosial, yakni berupa kewajiban-kewajiban sosial, dan diantaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan (Hasbullah, 2006:7).

Berangkat dari gambaran tentang sosiologi pendidikan secara konseptual sebagaimana digambarkan beberapa tokoh sosiologi pendidikan di atas, dan jika dikaitkan dengan fenomena pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia, pasca munculnya era industrialisasi, maka dapat dinarasikan sebagai berikut. Sebagaimana dipahami bersama bahwa tahun 1998, di Indonesia terjadilah gerakan reformasi di bidang politik dan pemerintahan yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan rezim Orde Baru. Menurut Darmaningtyas (2005:37) selama pemerintahan Orde Baru, bahkan sampai era pemerintahan transisi B.J. Habibie, pendidikan di Indonesia tidak pernah ditempatkan sebagai program utama yang harus diprioritaskan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama tiga dasawarsa terakhir sebelum terjadinya reformasi politik dan pemerintahan, yakni sebelum tahun 1998, tidak ada perdebatan paradigmatis menyangkut persoalan pendidikan nasional. Kalau toh terjadi perbedaan pandangan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan dengan Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie mengenai persoalan pendidikan, itu hanya berkutat pada persoalan pendidikan siap pakai dan tidak siap pakai. Atau dalam bahasa lainnya, perdebatan yang terjadi antara Menteri Fuad Hassan dengan Menteri B.J. Habibie mengenai pendidikan nasional dapat dibidang secara involutif hanya berkutat pada masalah kecilnya anggaran pendidikan.

Lebih lanjut menurut Darmaningtyas, keluhan tentang kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia, seakan meniadakan faktor-faktor lain, yang justru berpengaruh besar terhadap buruknya sistem pendidikan yang ada selama ini. Misalnya, tidak pernah ada perdebatan yang berarti terhadap lemahnya kemampuan mengelola pendidikan nasional secara profesional, demikian pula tidak pernah kedenagaran adanya perdebatan yang berarti tentang lemahnya

kemampuan manajerial dalam bidang keuangan, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Munculnya gerakan reformasi di bidang politik dan pemerintahan tahun 1998, ternyata berimbas pula pada reformasi kehidupan bidang pendidikan. Akibatnya, banyak orang yang mulai tertarik untuk berdiskusi tentang reformasi pendidikan yang tidak hanya menyangkut reformasi institusi pendidikan, melainkan juga menyangkut otonomi guru dan otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak kurang dari Moctar Buchori dalam bukunya "*Transformasi Pendidikan*" (1999) telah menyerukan pentingnya otonomi guru, agar guru lebih profesional dan independen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Demikian pula Benny Susetyo dalam bukunya "*Politik Pendidikan Penguasa*" (2005:33) menegaskan bahwa manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistik, sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Berangkat dari pernyataan Buchori dan Susetyo tersebut, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa betapa pentingnya otonomi pendidikan itu diselenggarakan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sebab dalam sistem pendidikan yang bersifat sentralistik, telah berakibat timbulnya keseragaman dalam pengambilan kebijakan pendidikan, sehingga sistem pendidikan yang diterapkan selama ini tidak mampu mengakomodasi perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat nusantara, dan juga tidak mampu mengakomodasi kepentingan daerah, sekolah, dan peserta didik, serta sekaligus mematikan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Kemudian di era pemerintahan Joko Widodo, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, sebagaimana dilansir Kompas.com/24/06/2021 telah mengeluarkan konsep merdeka belajar yang sesungguhnya bertujuan untuk menjawab segala tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di era sebelumnya (diakses, 2 Januari 2022). Menurut Makarim konsep merdeka belajar ini dikeluarkan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik agar para siswa dapat mendalami, minat dan bakatnya masing-masing. Jadi, menurut konsep merdeka belajar anak-anak tidak boleh dipaksa untuk mempelajari sesuatu hal yang sebenarnya mereka tidak sukai. Berangkat dari konsep tersebutlah pendidikan harus memerdekakan peserta didik, dalam arti pendidikan harus memberikan keleluasaan kepada setiap anak untuk mempelajari apa yang benar-benar menjadi minat dan bakatnya.

Misalnya, sebagai orang tua atau guru tidak boleh memaksa anaknya atau peserta didiknya untuk mempelajari bidang ilmu komputer, jika anak itu memang tidak berbakat atau berminat terhadap bidang ilmu tersebut. Demikian sebaliknya, jika anak-anak memang berminat dan berbakat dalam bidang seni misalnya, mereka harus diberi keleluasaan dan didukung untuk mempelajari bidang seni sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Tetapi dalam realitasnya banyak orang tua atau masyarakat yang menafsirkan secara keliru esensi dari konsep merdeka belajar yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Ada orang tua atau masyarakat yang menafsirkan bahwa konsep merdeka belajar itu, adalah anak bebas melakukan apa pun berkaitan dengan proses belajar. Mislanya, anak bebas mau belajar atau tidak, anak juga dibebaskan untuk mengerjakan tugas atau tidak, dan berbagai macam kebebasan lainnya. Padahal esensi dari konsep

merdeka belajar itu, sesungguhnya adalah memberi kebebasan kepada setiap peserta didik untuk mendalami minat dan bakat mereka terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Jadi, konsep merdeka belajar itu dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai peserta didik, bukan atas dasar kebutuhan guru sebagai pendidik. Oleh karena itu, melalui konsep merdeka belajar guru-guru didorong untuk merancang model pembelajaran berbasis proyek, sehingga dengan model pembelajaran seperti itu, membuat proses pembelajaran di sekolah dapat memacu peserta didik untuk kreatif dalam mencari dan menemukan materi ajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan penganut aliran konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh dua hal yang saling mendukung (*interdependence*) satu dengan yang lainnya, yakni antara bakat/minat dengan lingkungan (baca:pendidikan) di mana anak-anak itu tumbuh dan berkembang (Ahmadi, 1991: 21). Misalnya, ketika anak-anak memiliki bakat dan minat di bidang seni, kemudian mereka diberi sentuhan pendidikan seni, maka niscaya bakat dan kemampuan mereka akan tumbuh secara maksimal. Demikian sebaliknya, ketika anak-anak memiliki minat dan bakat di bidang komputer, lalu dipaksa untuk mempelajari masalah seni, tentu mereka akan mengalami kesulitan dalam hal perkembangan bakatnya.

Dengan memberikan kemerdekaan kepada setiap peserta didik untuk menentukan bakat dan minatnya dalam mempelajari suatu bidang ilmu tertentu, maka kelak mereka diharapkan dapat memiliki pola-pola perilaku, sikap, pengetahuan, dan keyakinan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma sosial maupun norma agama. Hal ini sejalan dengan gagasan Erich Fromm (1987) yang menegaskan bahwa esensi manusia dapat

pula dilihat dari perspektif *homo esparan*, yakni manusia adalah makhluk yang selalu berharap. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan untuk memiliki pengetahuan yang lebih sempurna dalam bidang tertentu dan lain-lain. Hal ini menjadi sangat penting sebab ketika manusia menghentikan harapannya, maka ketika itu pula manusia telah memasuki pintu neraka, apakah disadari atau tidak mereka juga telah mengenyahkan kemanusiannya sendiri.

B. Munculnya Berbagai Macam Labeling terhadap Lembaga Pendidikan

Istilah labeling pertama kali diperkenalkan oleh Edwin M. Lemert dalam teorinya yang disebut teori labeling (teori penjulukan). Dalam konteks sosial, labeling atau penjulukan dikaitkan dengan pemberian label atau cap kepada orang lain yang acapkali berkonotasi negatif (Kompas.com/20/08/2021, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/>. Diakses, 2 Januari 2022. Misalnya, label pemalas diberikan kepada orang yang sering terlambat dalam melakukan sesuatu kegiatan. Akibat dari pemberian labeling tersebut membuat orang yang dilabeli predikat pemalas tersebut menjadi kurang percaya diri di hadapan publik. Namun demikian, tidak semua labeling yang diberikan kepada seorang individu atau suatu lembaga tertentu mempunyai konotasi negatif. Contoh lembaga pendidikan yang sering diberi label sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional, dan lain-lain justru menimbulkan kesan positif di mata masyarakat atas labeling yang diberikan tersebut, sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin menyekolahkan putera-puterinya ke sekolah bersangkutan.

Menurut Mac Aditiawarman dalam bukunya yang berjudul *"Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya"* (2019), (Kompas.com/20/08/2021, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/>), menegaskan bahwa teori labeling sebagaimana dijelaskan sebelumnya menekankan pada dua hal, yakni alasan dan bagaimana seseorang atau institusi itu diberikan label oleh masyarakat, serta apa pengaruhnya bagi orang atau lembaga bersangkutan. Jika label yang diberikan itu mengandung konotasi negatif, maka dampak yang ditimbulkan pada orang atau lembaga yang diberikan label tersebut juga negatif. Misalnya, jika seorang

anak diberi label pemalas, pencuri, dan labeling lainnya yang bersifat negatif, maka hal tersebut dapat berakibat rusaknya mental anak yang diberikan label tersebut. Jika label negatif ini diberikan kepada suatu lembaga, katakanlah lembaga pendidikan, maka bisa berakibat rusaknya citra lembaga tersebut di mata masyarakat. Sebaliknya, jika label yang diberikan kepada seseorang atau kepada lembaga tertentu mengandung konotasi yang positif, maka positif pulalah dampak yang timbul pada diri orang atau lembaga bersangkutan.

Contoh, sekolah yang diberi label sekolah unggulan, sekolah favorit, dan sekolah bertaraf internasional, tentu berdampak positif terhadap lembaga sekolah tersebut di mata masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan berebut atau berkompetisi untuk menyekolahkan putera-puterinya ke sekolah bersangkutan. Hal demikian tentu berdampak pula terhadap meningkatnya "nila jual" sekolah bagi masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan dalam bentuk institusi sekolah. Kondisi ini bisa terjadi, karena pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang berlabel sekolah unggulan, sekolah favorit, dan sekolah bertaraf internasional tidak dapat dilepaskan dari adanya budaya citra dan gaya hidup. Artinya, sekolah-sekolah dengan berbagai labeling yang telah disebutkan di atas, merupakan citra (objek) yang berfungsi sebagai juru bicara gaya hidup, baik dalam konteks identitas diri maupun status sosial. Menurut Piliang (dalam Suda, 2009:152) gaya hidup harus dipertontonkan di ruang publik, agar orang lain mengetahuinya. Gejala ini sejalan dengan anutan budaya tontonan yang bercirikan pada aneka aktivitas kepenontonan.

Berkaitan dengan hal itu, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa sekolah dengan labeling favorit, unggulan, dan bertaraf internasional tidak hanya berkaitan dengan hasrat untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, akan tetapi berhubungan pula dengan aktivitas kepenontonan. Hal ini mengandung arti, bahwa orang tua menyekolahkan putera-putrinya ke sekolah-sekolah yang berlabel favorit, unggulan, dan bertaraf internasional, sesungguhnya tidak semata-mata karena ingin memenuhi kebutuhan pendidikan putera-puteri mereka, melainkan ingin pula mempertontonkan citra diri atau gaya hidupnya dalam konteks status sosial lengkap dengan simbol-simbolnya. Simbol-simbol dimaksudkan dalam konteks ini adalah, simbol-simbol status sosial, seperti pakaian yang *fashionable*, mobil mewah, *handphone*, dan lain-lain. Gagasan ini terkait pula dengan ciri budaya tontonan, yakni kepuasan hidup seseorang tidak hanya terlatak pada kegiatan menonton, tetapi juga ditonton oleh orang lain (Atmdja, 2008).

Keadaan dan gaya hidup masyarakat semacam ini membuat sekolah-sekolah dengan labeling favorit, unggulan, dan sekolah bertaraf internasional dengan mudah dapat memanfaatkannya untuk menarik biaya pendidikan yang mahal, karena dengan cara-cara seperti itu, hasrat orang tua siswa untuk memperoleh simbol-simbol status sosial tertentu dapat terpenuhi. Hal ini menurut Nugroho (2001:50) tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, telah memicu meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, baik pada tingkat individu, rumah tangga, maupun masyarakat secara umum. Gejala efek demonstrasi (*demonstration effect*) semacam ini terjadi di mana-mana, yang disertai dengan gegap gempitanya pembangunan di segala lini kehidupan. Gejala ini sangat tampak dari adanya pembagunan swalayan (*mall*) di setiap sudut kota, ditambah menjamurnya bujukan-bujukan iklan yang ditampilkan lewat media sosial, telah membuat masyarakat cenderung mengubah gaya hidupnya dari orientasi subsisten ke orientasi pasar, termasuk dalam

memilih lembaga pendidikan, sebagai tempat untuk menyekolahkan putera-puteri mereka.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang akhir-akhir ini semakin bersifat *market oriented*, maka sulit rasanya seseorang dapat menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan pasar. Dengan bahasa lainnya dapat dikatakan pasar dewasa ini bukan lagi merupakan realitas "tempat", yang hanya ada di *shopping mall*, *shopping centre*, dan pasar tradisional, melainkan juga telah menjadi realitas "waktu, sehingga eksistensinya ada di mana-mana. Artinya, di era yang serba digitalisasi saat ini, keberadaan pasar telah merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebab media untuk berbelanja di jaman yang dapat memanfaatkan teknologi canggih saat ini, tidak hanya berada di *shopping mall*, *shopping centre*, dan juga di pasar tradisional, akan tetapi lewat aplikasi gojek atau grap, masyarakat bisa membeli apa saja yang mereka butuhkan dengan hanya menekan tombol android dari rumah, barang pesanan akan dihantar sampai ke rumah oleh petugas gojek atau grap itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar dan perilaku konsumtif masyarakat saat ini, merupakan bagian dari kenyataan masyarakat modern, yang memiliki labeling "masyarakat industrial". Suatu hal menarik berkaitan dengan keberadaan pasar dalam masyarakat modern atau masyarakat industrial menurut Polanyi (dalam Suda, 2009:153) adalah pasar bukan lagi merupakan institusi ekonomi yang bersifat eksklusif, akan tetapi telah menyatu dengan realitas sosial-budaya dan telah mengakar dalam setiap aspek kehidupan, bahkan keberadaannya cenderung menjadi determinan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengacu pada uraian di atas dapat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa pelabelan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sekolah, dapat membuat "nilai jual"

sekolah yang diberikan label tersebut meningkat drastis di mata masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang kemudian tertarik untuk menyekolahkan putera-puterinya ke sekolah bersangkutan, meski pun secara akademis sekolah model itu belum tentu bisa memberi jaminan kualitas pendidikan sesuai yang diharapkan.

Pemberian labeling terhadap keberadaan lembaga-lembaga sekolah seperti itu, selain dapat menarik minat orang tua siswa untuk menyekolahkan putera-puterinya ke sekolah-sekolah tersebut, ternyata juga dapat mengukuhkan logika Darwinisme Sosial, bagi masyarakat dalam memandang eksistensi sebuah lembaga pendidikan sekolah. Artinya, bahwa sekolah-sekolah unggulan, favorit, dan sekolah yang berlabel internasional hanya mencetak dan menerima manusia-manusia yang unggul, baik unggul secara intelektual maupun secara finansial. Oleh karena itu, untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang berlabel unggulan dan sejenisnya, maka dibutuhkan biaya yang besar, sehingga mereka yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut di samping harus unggul secara intelektual, juga harus unggul dalam kepemilikan modal, baik modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, maupun modal simbolik. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak memiliki modal-modal tersebut harus rela tersisihkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan masyarakat era modern, bahkan di era post modern dewasa ini seakan hanya menjadi milik orang-orang yang unggul.

C. Pendidikan sebagai Kontrol Sosial dalam Masyarakat

Murice Duverger (dalam Jena, 2002:52) mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk mewariskan segala pengalaman, peradaban, dan pengetahuan yang dikembangkan oleh generasi terdahulu kepada para penerusnya. Dalam proses penerusan berbagai nilai kehidupan, termasuk pengalaman dan peradaban kepada generasi penerusnya, orang tua atau ayah dan ibu dapat mengontrol sikap dan perilaku anak-anaknya dalam proses penerimaan pengalaman, peradaban, dan pengetahuan yang diteruskan oleh orang tua kepada anak-anaknya tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrol atas berbagai pengetahuan, pengalaman, dan peradaban yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya tidak selalu harus dilakukan oleh negara melalui sistem kekuasaan, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Untuk dapat mengontrol proses penerusan nilai-nilai budaya, pengalaman, dan peradaban tersebut, maka orang tua terlebih dahulu harus memiliki pendidikan yang memadai untuk mengontrol segala tindak-tanduk yang dilakukan anaknya. Meskipun kontrol atas segala pengetahuan, pengalaman, dan peradaban yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya dilakukan oleh orang tua anak (keluarga), tetapi negara melalui aparatusnya juga berhak mengontrol proses transformasi pengetahuan dan transmisi nilai-nilai kepada para generasi muda bangsa. Melalui kontrol semacam ini akan melahirkan warga negara yang melalui pendisiplinan diri akan menyesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diletakan oleh negara. Hal ini mengandung arti, bahwa aparaturnya negara melalui jajaran Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan akan melakukan dominasi intelektual, moral, dan gagasan-gagasan yang melaluinya terjadi pengendalian dan penguasaan pikiran, mental, dan kesadaran publik atau perilaku masyarakat, khususnya para remaja.

Dengan proses-proses seperti itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perilaku masyarakat, terutama bagi generasi muda, baik itu dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun yang dilakukan oleh negara. Dalam upaya mengontrol sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan masyarakat, selain merupakan tugas orang tua (sebagai guru *rupaka*) di lingkungan keluarga, hal tersebut juga merupakan tugas guru sebagai pendidik di sekolah (*guru pengajian*). Sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti saat ini, maka peran utama guru di sekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa lalu, yang dianggap berguna bagi kehidupan siswa dan sekaligus mengontrol sikap dan perilaku siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Memang di era revolusi industri 4,0 ini teknologi seakan mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi umat manusia, termasuk persoalan dalam bidang pendidikan. Revolusi industri 4.0 merupakan generasi ke empat dari revolusi industri yang terjadi sebelumnya. Revolusi industri yang terjadi selama ini, mulai dari revolusi yang berbasis mesin uap (RI 1.0); kemudian menuju revolusi yang berbasis elektrik (RI 2.0), lanjut revolusi yang berbasis *computerized* dan *automation* (RI 3.0), sampai pada revolusi industri 4.0 yang berbasis *cyber physical system* (RI 4.0). Salah satu efek dari terjadinya revolusi industri 4.0 ini adalah munculnya *disruptif* pada segala lini kehidupan, termasuk kehidupan bidang pendidikan. Menurut Rhenald Kasali (2017:34) *disruptif* merupakan sebuah

inovasi, yakni proses penggantian sistem lama dengan cara-cara yang baru yang terjadi secara radikal. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan wakil generasi ke-4 dari perubahan struktur sosial masyarakat yang terjadi secara radikal (revolusioner). Dengan pesetanya perkembangan teknologi generasi 4.0, maka yang dikhawatirkan banyak kalangan adalah terjadinya degradasi peran manusia dalam berbagai bidang kehidupan, karena hampir semua bidang pekerjaan dapat digantikan oleh mesin. Misalnya, tenaga *teller* di bank-bank telah banyak digantikan oleh mesin ATM (ajungan tunai mandiri), tenaga satpam dapat digantikan oleh CCTV, dalam bidang pertanian tenaga manusia untuk membajak sawah juga telah diganti oleh traktor, tenaga buruh untuk menumbuk padi mejadi besar juga telah diganti oleh mesin penggiling padi dan lain sebagainya.

Untuk meminimais kemungkinan terjadinya degradasi peran manusia dalam berbagai bidang kehidupan, Pemerintah Jepang kemudian mengembangkan konsep masyarakat 5.0, yakni konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*teknology based*). Filosofinya, melalui konsep masyarakat 5.0, dikembangkan kecerdasan buatan (*artificial intellegency*) untuk mentransformasi *big data* yang dikumpulkan melalui internet dalam segala bidang kehidupan (*the Internet of Things*) menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan (<https://disperin.semarangkota.go.id/news/03/10/2019> (diakses, 3 Januari 2022)).

Dalam kaitannya dengan masalah pendidikan (Sanjaya, 2008:21) mengatakan betapa pun majunya teknologi yang dikembangkan oleh umat manusia peran guru, baik sebagai pengajar,

pendidik, pembimbing, maupun sebagai evaluator tetap diperlukan. Teknologi yang secara praktis dapat memudahkan manusia dalam mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan, pada realitasnya tidak mungkin dapat menggantikan peran guru secara penuh. Berangkat dari gambaran tersebut, dapat ditegaskan bahwa betatapun majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peran guru (baca:pendidikan), terutama dalam mengontrol perkembangan sikap dan perilaku anak, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat tetap diperlukan.

Terkait persoalan tersebut yang perlu dipahami oleh para pendidik di era masyarakat 5.0 adalah adanya perubahan paradigma tentang pengajaran, yakni mengajar tidak lagi hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik, akan tetapi mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Artinya tugas guru di era teknologi digital ini, tidak semata-mata melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana guru mampu membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini dilatari oleh sebuah pemikiran bahwa peserta didik bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini, melainkan mereka adalah organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya di tengah berkembangnya teknologi yang berpusat pada manusia (*human centred*), dan berbasis teknologi (*teknologi based*) atau yang dikenal dengan istilah *5.0 society*, maka tugas guru menjadi semakin luas dan semakin kompleks. Guru di era masyarakat 5.0, tidak semata-mata harus kreatif dalam mencari dan menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan para peserta didik, melainkan harus mampu pula mengembangkan kecerdasan buatan (*artificial intellegency*) untuk mentransformasikan *big data* yang dikumpulkan melalui internet dalam segala bidang kehidupan (*the*

Internet of Things) dan sekaligus mampu menyeleksi berbagai informasi tersebut menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan dalam kehidupan selanjutnya.

Oleh karena itu, menjadi tugas guru pula untuk menjaga para peserta didiknya agar tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat mendorong dirinya ke arah pertumbuhan dan perkembangan yang merugikan. Di sinilah letaknya peran teknologi dalam mengubah paradigma mengajar, yaang semula memandang guru hanya sebagai sumber belajar yang bertugas menyampaikan informasi, menjadi pengelola sumber belajar yang dapat menjadikan pengetahuan itu bermakna bagi kehidupan peserta didik itu sendiri. Hal ini penting sebab pesertanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digitalisasi saat ini, berakibat setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan secara holistik. Oleh karenanya, penekanan dari proses pembelajaran bukan lagi pada bagaimana guru harus menguasai segudang informasi yang akan ditransfer kepada peserta didiknya, melainkan penekanan pengajaran lebih pada bagaimana guru mampu mengelola sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membentuk kearifan baru yang dapat didedikasikan bagi kepentingan kemanusiaan ke depan.

Selain itu, penemuan-penemuan baru dalam bidang psikologi, mengakibatkan munculnya berbagai pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia. Di era yang serba digital ini anggapan atas manusia sebagai organisme yang pasif yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti dijelaskan dalam aliran behavioristik, telah banyak ditinggalkan orang. Masyarakat sekarang lebih percaya bahwa manusia adalah organisme

yang memiliki potensi seperti yang dikembangkan oleh aliran kognitif holistik. Dalam perkembangannya potensi itulah yang akan menentukan perilaku manusia selanjutnya. Terkait hal tersebut, pendidikan bukan lagi dimaknai sebagai pemberian stimulus, akan tetapi lebih pada upaya untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh setiap individu. Atau dalam bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa dalam proses pendidikan para peserta didik tidak lagi hanya dianggap sebagai objek pendidikan semata, tetapi harus dipandang sebagai subjek belajar yang harus aktif dan kreatif dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri sesuai penganut aliran konstruktivisme. Artinya, pengetahuan itu tidak diberikan oleh pendidik kepada para peserta didiknya, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik tersebut. Berangkat dari uraian tersebut di atas dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa pembelajaran bukanlah proses penyampaian materi ajar atau pemberian stimulus yang sebanyak-banyaknya kepada para peserta didik, akan tetapi lebih dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

D. Pendidikan sebagai Alat Integrasi Sosial dalam Masyarakat

Sebagai alat integrasi sosial, pendidikan banyak dipercaya oleh kalangan pendidik sebagai sebuah *power* (kekuasaan) untuk membentuk masyarakat baru. Berangkat dari kepercayaan tersebut, setiap peserta didik yang memasuki bangku sekolah dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah dari keberadaan masyarakat sebelumnya. Oleh karena itu, Nasution (2009:22) menegaskan bahwa sekolah pada esensinya dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat yang sudah ada menjadi masyarakat baru yang diharapkan. Akan tetapi pada realitasnya, pendidikan tidak semudah yang dibayangkan dapat membangun harapan baru tentang masyarakat baru yang dicita-citakan banyak orang. Sebab secara politis pihak penguasa negara di mana pendidikan itu berlangsung, cenderung berusaha mempertahankan dasar-dasar masyarakat yang sudah ada (mempertahankan status quo). Terkait hal tersebut harapan untuk mengubah dasar-dasar masyarakat yang sudah ada, menuju masyarakat baru yang dicita-citakan melalui sistem pendidikan memerlukan persetujuan, baik dari pihak penguasa maupun dari pihak masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada realitas tersebut, maka guru tentu tidak dapat diharapkan berani sepenuhnya mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan tersebut. Pasalnya, guru itu sendiri diangkat oleh pihak yang berkuasa dan telah menerima norma-norma dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa itu pula. Oleh karena itu, lebih lanjut menurut Nasution (2009:23) sekolah tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk membangun tatanan masyarakat baru dan terlepas dari kontrol pihak yang berkuasa. Namun, sebaliknya

sekolah justru dapat dijadikan alat oleh pihak penguasa untuk mengadakan perubahan-perubahan radikal sesuai kepentingannya. Seperti yang dilakukan Hitler di Jerman, partai Komunis di Unisoviet, Jepang di daerah-daerah jajahannya dahulu, dan lain sebagainya.

Hal ini bisa dilakukan pihak penguasa, karena sistem pendidikan merupakan alat propaganda yang sangat ampuh untuk mendoktrinasi pikiran peserta didik untuk menciptakan masyarakat baru sesuai keinginan penguasa tersebut. Misalnya, melalui sistem pendidikan sekolah, pihak penguasa dapat menanamkan ideologi yang dianutnya dan disesuaikan dengan kepentingan penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya. Sebab menurut Marx (dalam pengantar Buku tentang Ideologi, 1984 :x) ideologi adalah piranti, yang dengannya, ide-ide kelas berkuasa dapat diterima di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang normal dan natural. Hal ini bisa terjadi, sebab Marx memahami bahwa para anggota dari kelas subordinat, yakni kelas pekerja, dituntun untuk membayangkan tentang pengalaman sosialnya, hubungan sosial, bahkan dirinya, melalui seprangkat ide yang bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan datang dari suatu kelas yang tidak hanya memiliki kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda, namun sungguh-sungguh berlawanan.

Namun, demikian secara teks ideal pendidikan, sesungguhnya dapat dijadikan alat integrasi sosial dalam masyarakat. Sebab menurut Barnadib (1983:130) pendidikan dapat berperan sebagai arena pembentukan kepribadian seseorang, baik sebagai mahluk individu, mahluk sosial, mahluk susila, maupun sebagai mahluk beragama. Sebagai arena pembentukan kepribadian peserta didik menuju kehidupan yang seimbang, yakni antara kehidupan individu dengan kehidupan sosial, maka pendidikan

dapat dipandang sebagai alat untuk melakukan integrasi sosial bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses pendidikan akan mengalami keselarasan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Artinya, proses pendidikan yang terjadi dalam sebuah sistem pendidikan sekolah akan terbentuk sesuai dengan pandangan hidup masyarakat di mana sekolah itu tumbuh dan berkembang.

Di dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin dinamis, yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara maju, maka tidak tertutup kemungkinan negara-negara dunia ketiga akan mengalami banyak permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan dapat dijadikan salah satu alat integrasi sosial dalam menghadapi dinamika yang sedang terjadi. Sebab melalui sistem pendidikan ini, negara dapat mengantisipasi laju percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Dikatakan demikian, sebab melalui sistem pendidikan negara atau masyarakat dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut.

Namun demikian, pada kenyataannya banyak juga negara-negara berkembang yang menerapkan sistem pendidikan dualistik, yakni di satu sisi sistem pendidikan diarahkan untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain mereka menolak ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kondisi

demikian tentu mengandung suatu resiko, yakni integrasi nasional (persatuan dan kesatuan) bangsa menjadi rawan. Ketika dilema semacam ini dihadapi oleh suatu negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamankan oleh undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sulit dicapai (Bastian, 2002:13—18).

Mengingat pendidikan merupakan alat integrasi sosial yang dapat mengintegrasikan seluruh kepentingan masyarakat, maka peningkatan kualitas pendidikan seharusnya menjadi skala prioritas bagi pemerintahan Republik Indonesia, sehingga tujuan nasional yang diamanatkan baik oleh UUD 1945 maupun oleh UU Sistem Pendidikan Nasional segera dapat diwujudkan. Namun, dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk Indonesia problem yang dihadapi adalah rendahnya kualitas dan rusaknya manajemen pendidikan itu sendiri. Seharusnya permasalahan mengenai kualitas dan manajemen pendidikan tidak mesti terjadi, sebab lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi yang berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Artinya, pendidikan adalah pelopor dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya manajemen dan kualitas pendidikan semestinya dinamis dalam mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Logikanya, pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pendidikan secara akal sehat selalu dinamis mengikuti arah perubahan sesuai irama perkembangan masyarakat.

Berangkat dari realitas tersebut guru sebagai praktisi pendidikan, hendaknya senantiasa berupaya mengembangkan wawasan peserta didiknya, agar para peserta didik kreatif dan inovatif dalam menunjang terwujudnya atmosfir akademik yang

kondusif bagi pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini senafas dengan para penganut aliran konstruktivistik, yang mengatakan bahwa para peserta didik harus diposisikan sebagai subjek belajar yang harus kreatif dan inovatif dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Satu konsep dasar yang melatari aliran pemikiran konstruktivis ini adalah bahwa pengetahuan yang dikonstruksi oleh individu sebagai subjek belajar akan berkembang menjadi pengetahuan yang bermakna. Sementara pengetahuan yang diperoleh oleh individu sebagai objek belajar yang diberikan oleh guru melalui metode ceramah (baca:pengetahuan yang terberi) akan menjadi pengetahuan yang hanya diingat sementara setelah itu dilupakan (Sanjaya, 2008:124).

Menurut Piaget pengonstruksian pengetahuan dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema yang sudah ada. Skema adalah struktur kognitif yang terbentuk melalui proses pengalaman. Sedangkan asimilasi adalah sebuah proses penyempurnaan skema yang telah terbentuk, sementara akomodasi adalah proses perubahan skema.

E. Pendidikan sebagai Agen Sosialisasi Kebudayaan Bangsa

Sosialisasi dimaksud dalam konteks buku ini adalah upaya membimbing peserta didik (individu) ke dalam dunia sosial. Pada masa anak-anak lingkungan sosial yang dihadapi oleh individu terbatas pada lingkungan keluarga, yang di dalamnya ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Setelah anak memasuki dunia sekolah, maka lingkungan sosialnya pun bertambah luas, karena di sekolah ada bapak/ibu guru, ada pegawai tata usaha, ada satpam, dan teman-teman mereka yang berasal dari berbagai kelas, golongan, ras maupun etnis. Selain berbeda dari aspek sosial, lingkungan budaya yang dihadapi oleh setiap anak juga berbeda. Dengan demikian, dalam proses sosialisasi di lingkungan sekolah, anak-anak juga dikenalkan pada kebudayaan, baik kebudayaan nasional maupun berbagai nilai kearifan lokal yang harus dimiliki dan diikutinya, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang baik atau menjadi anggota yang baik dari satu komunitas tertentu. Oleh karena itu, dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa sosialisasi sama artinya dengan sebuah proses belajar atau berbicara sosialisasi sama dengan berbicara soal belajar.

Berangkat dari terminologi tentang sosialisasi di atas, maka dalam proses sosialisasi, anak-anak (peserta didik) diajarkan tentang pola-pola tingkah laku yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh sebuah masyarakat secara turun-temurun, keterampilan sosial, seperti belajar berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, cara berjalan, sikap duduk, sikap terhadap agama, pekerjaan, rekreasi, seks, dan pola-pola kebudayaan lainnya. Semua pola-pola aktivitas tersebut akan disosialisasikan oleh guru kepada

para peserta didiknya melalui proses pendidikan (Nasution, 2009:127). Terkait dengan persoalan sosialisasi, selain lembaga pendidikan (baca:sekolah), agen sosialisasi dapat pula berupa keluarga, kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, dan tempat kerja. Menurut Damsar (2015:69—70) lembaga-lembaga tersebutlah yang dapat dipandang sebagai agen yang berperan sangat signifikan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar individu mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Sekolah sebagai agen sosialisasi kebudayaan di dalamnya tercakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari kelompok bermain (*play-group*), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sampai jenjang pendidikan tinggi. Semua lembaga pendidikan tersebut merupakan agen sosialisasi berbagai nilai kehidupan, seperti nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, termasuk nilai-nilai budaya bangsa. Berbagai nilai kehidupan yang telah ditanamkan oleh orang tua di lingkungan keluarga, kemudian proses sosialisasinya diteruskan oleh lembaga sekolah seiring dengan intensipnya anak-anak memasuki ruang sosial di lingkungan sekolah. Terkait dengan fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi berbagai nilai kehidupan, maka tidak mengherankan jika kemudian anak-anak bisa lebih percaya pada gurunya di sekolah dibandingkan pada orang tuanya di rumah, terutama pada anak kelompok usia bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.

Hal ini menurut Sanjaya (2008a:229) disebabkan belajar merupakan suatu proses aktivitas mental seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam

bentuk pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun perubahan pada aspek psikomotorik. Sementara interaksi sosial yang terjadi di sekolah antara guru dengan siswanya cukup memberi iklim yang kondusif bagi anak-anak untuk melakukan proses belajar. Dengan demikian cukup beralasan jika kemudian anak-anak bisa lebih percaya kepada gurunya dibandingkan pada orang tuanya. Namun, perlu disadari bahwa proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat diamati secara empirik. Hal ini mengandung arti, bahwa hasil dari sebuah proses belajar tidak dapat disaksikan secara nyata. Jadi, hasil dari sebuah proses belajar hanya dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak pada diri seorang individu setelah mengalami proses belajar.

Selain itu, perlu pula dipahami bahwa belajar adalah sebuah proses imitasi, artinya anak-anak dalam mengikuti proses belajar banyak melakukan proses peniruan (imitasi) terhadap apa yang dilakukan oleh guru, baik dalam proses pembelajaran di ruang kelas maupun terhadap sikap dan tindakan guru dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Fuad Hasan (dalam Widiastono (*ed.*), 2004:52) bahwa dalam arti luas pendidikan terjadi melalui tiga kegiatan utama, yakni pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran. Artinya, bahwa pendidikan harus dilakukan melalui tiga upaya utama tersebut, misalnya dalam proses belajar anak-anak dari sejak dini mulai dari dalam keluarga harus dibiasakan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka untuk melatih keterampilan kinestetik anak. Demikian pula orang tua di lingkungan keluarga, atau pun guru di sekolah harus senantiasa memberi keteladanan yang baik kepada anak-anak, agar kelak bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik (*suputra*). Dari sinilah kemudian muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Demikian halnya dengan

proses pembelajaran, orang tua di lingkungan keluarga ataupun guru di lingkungan sekolah harus senantiasa melakukan tranfer pengetahuan dan transmisi nilai-nilai kepada anak-anak, sehingga anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan nilai-nilai, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, maupun nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pegangan dalam mengarungi kehidupan selanjutnya.

Konsep pendidikan semacam ini penting disebarluaskan, agar tidak terjadi pemahaman yang sempit terhadap istilah pendidikan, yakni hanya terbatas pada pengertian persekolahan (*schooling*). Hal ini berkaitan pula dengan julukan yang diberikan pada manusia, yakni sebagai *animal educandum* dan *animal educandus* sekaligus. Artinya, manusia adalah mahluk yang bisa dididik dan sekaligus sebagai mahluk yang bisa mendidik. Berangkat dari realitas tersebut jelaslah pengertian pendidikan tidak terbatas pada pengertian persekolahan. Hal yang lebih esensi mengenai pendidikan yang ingin penulis katakan pada kesempatan ini adalah manusia pada esensinya merupakan mahluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik pendidikan yang dilakukan terhadap orang lain, maupun pendidikan terhadap dirinya sendiri.

Berangkat dari narasi di atas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa persekolahan hanya salah satu bentuk upaya pendidikan, dan apa pun yang ditanamkan kepada anak-anak melalui proses pendidikan sekolah tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh yang bersumber dari luar sekolah. Pembiasaan dan peneladanan pun sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pendidikan yang diselenggarakan dalam dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan perspektif penganut aliran konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (*interdependence*), yakni

faktor bawaan (*hereditet*) dan faktor lingkungan (*milieu*). Jadi, baik buruknya perkembangan keperibadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan. Dengan demikian untuk dapat membentuk kepribadian anak yang baik, maka perlu diperhatikan faktor genetik atau bawaan anak dan juga perlu dikondisikan suasana lingkungan di sekitar diri anak, agar tetap kondusif bagi berlangsungnya sebuah proses pendidikan.

BAB V

Pendidikan dan Mobilitas Sosial dalam Masyarakat

A. Realitas Pendidikan di Indonesia Saat ini

Pendidikan di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain pada umumnya, mengalami perubahan yang amat mendasar. Seperti dikatakan Dickens (dalam Lie, dkk. 2014:14) bahwa *'this the best of time and the worst of time'* (ini adalah masa yang paling baik sekaligus paling buruk). Artinya, di era ini ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dinikmati dalam konteks pendidikan, namun sebaliknya kemajuan yang dicapai tersebut sekaligus juga dibarengi dengan kemerosotan bidang pendidikan dalam beberapa hal. Untuk memahami realitas tersebut pendidikan dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni pendidikan sebagai bagian dari dimensi kultural, struktural, dan ekonomis. Dimensi kultural mengandung arti bahwa kesadaran publik sangat berperan bagi tumbuhnya pendidikan yang bermutu. Dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan telah terlihat dari era sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Hal ini terbukti sejak zaman prakolonial masyarakat telah ikut aktif mendirikan sekolah-sekolah yang nantinya dapat dijadikan arena untuk membentuk dan mengkaderisasi calon-calon pemimpin bangsa.

Jika dilacak dari akar sejarahnya, Jawa Barat sejak abad ke-5 sebenarnya telah berhasil keluar dari abad kegelapan. Sebagai bukti bahwa di Jawa Barat, khususnya di daerah Tanjung Priuk, yakni tepatnya di tepi Sungai Citarum dekat Bekasi dan Bogor ditemukan batu bertulis yang menerangkan tentang kerajaan Taruman Negara dan Rajanya Purnawarman. Batu bertulis tersebut diperkirakan telah ada sejak abad ke-5, meskipun tidak banyak memberi keterangan tentang keberadaan kerajaan Tarumanegara, tetapi setidaknya batu tersebut dapat dijadikan dasar untuk merekonstruksi perkembangan kerajaan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa (Barnadib, 1983a:4).

Adanya bukti sejarah berupa batu bertulis yang ditemukan di daerah Bekasi dan Bogor, sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan bahwa sejak abad ke-5 sebenarnya bangsa Indonesia sudah mulai mengenal pendidikan yang selanjutnya menjadi benih dari tumbuhnya berbagai bentuk dan model pendidikan di Indonesia. Dasar-dasar pengembangan pendidikan yang telah dimulai sejak abad ke-5 oleh kerajaan Taruman Negara ini, pada dimensi kultural tampaknya berlanjut sampai pada jaman pemerintahan kolonial. Hal ini terlihat dari sekolah-sekolah yang berbasis masyarakat pada masa itu telah banyak berperan mendidik anak-anak muda (generasi penerus bangsa) agar kelak menjadi anak-anak yang cerdas dan mampu memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa ini. Menurut catatan sejarah banyak sekolah berbasis *pesantren*, *madrasah*, taman siswa, sekolah-sekolah Kristen, dan Katolik telah menjadi tempat persemaian para pemikir, calon pemimpin dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Menurut Lie, dkk., (2014:15) selama penjajahan Belanda dan Jepang sekolah-sekolah berbasis masyarakat banyak berperan dalam pembentukan wawasan kebangsaan kepada para generasi muda yang

belajar di sekolah-sekolah bersangkutan. Jejak-jejak sejarah pendidikan yang berbasis pada masyarakat, sampai saat ini pun masih tampak dari peran yang dimainkan oleh sekolah-sekolah swasta yang ikut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada dimensi struktural, peran serta negara (baca:pemerintah) dalam bidang pendidikan mulai tampak secara nyata sejak pemerintahan India Belanda. Namun, prinsip dasar dari penyelenggaraan pendidikan pada saat itu bukan untuk kemajuan pemerintah Indonesia, akan tetapi semuanya diperuntukan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Di mana pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda ingin mendapatkan tenaga terdidik untuk dipekerjaan di pabrik-pabrik perusahaan milik pemerintah kolonial agar bisa dibayar dengan upah yang sangat murah. Sebab jika membawa tenaga kerja dari negaranya tentu membutuhkan bayaran yang sangat mahal. Sementara di sisi lain pada abad ke-18 kawasan Eropa sedang dilanda oleh pemikiran *aufklarung atau enlightstemen* (era pencerahan), yang menekankan penggunaan akal sehat dan kemerdekaan pribadi tampaknya ikut juga mempengaruhi ideologi pendidikan di Indonesia saat itu. Hal demikian akhirnya ikut mendorong pesetanya perkembangan pendidikan di Indonesia.

Selain, dimensi kultural dan struktural sebagaimana disinggung pada uraian di atas, di era berkembangnya paham modernisme dan globalisasi, pendidikan lambat laun juga terimbas oleh dimensi ekonomi, yakni ekonomi pasar. Dengan kekuatan ekonomi dan dipacu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, era globalisasi telah mampu menciptakan hubungan antarindividu dan antarinstansi di seluruh dunia menjadi semakin intensif. Antony Giddens, seorang Sosiolog modern sebagaimana dikutip Lie, dkk., (2014:18) menegaskan bahwa globalisasi sebagai intensifikasi relasi sosial di seluruh dunia, telah

menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan, sehingga berakibat kejadian yang terjadi di suatu tempat tertentu akan dibentuk oleh peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Artinya, proses globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran dan keterkaitan antara produksi, komunikasi, dan teknologi di seluruh dunia, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan, dalam arti globalisasi dapat berimplikasi bagi menguatnya dimensi ekonomi dari proses pengembangan pendidikan.

Dengan demikian tidak berlebihan, jika Suda (2009) menulis sebuah buku yang berjudul "*Merkantilisme Pengetahuan dalam bidang Pendidikan*". Di dalam bukunya setebal 356 halaman tersebut, Suda menyatakan bahwa globalisasi ditandai dengan berbagai bentuk perluasan dan integrasi pasar, baik yang terjadi di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Akibatnya, wilayah-wilayah geografis dan kebudayaan yang sebelum globalisasi bersifat subsisten, setelah memasuki era globalisasi berubah menjadi berorientasi pasar. Dampak sosiologis dari ekspansi pasar adalah munculnya perilaku konsumtif di berbagai kategori usia, lapisan, dan kelompok masyarakat dan tidak terkecuali kelompok anak-anak usia sekolah (Suda, 2009:110—111).

Dampak lain yang ditimbulkan oleh adanya perluasan pasar adalah munculnya berbagai pusat perbelanjaan, mulai dari *minimarket*, *supermarket*, sampai *hypermarket* yang berdiri di setiap sudut perkotaan, bahkan sampai keplosok-plosok pedesaan. Dengan demikian tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat kemudian mengalami apa yang disebut *shopaholic*, artinya masyarakat menderita penyakit "gila berbelanja". Seperti dimuat

Harian Kompas, 16 Januari (2005:16) yang mengatakan sebagai berikut.

Istilah *shopacholic* alias gila berbelanja biasanya melekat pada mereka yang tak mampu hidup tanpa berbelanja. Gagasan menjalani hidup tanpa berbelanja adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi mereka. Bagi kaum seperti ini, berbelanja bukan sekadar gaya hidup, melainkan sudah menjadi belahan jiwa. Buat mereka tidak ritual yang paling mengasyikan yang bisa mengalahkan saat-saat berbelanja (*Harian Kompas*, 16 Januari 2005).

Sifat *shopacholic* semacam ini sangat sulit dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat dewasa ini, termasuk masyarakat sekolah. Akibatnya dimensi ekonomis dari lembaga pendidikan menjadi semakin menguat. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap mahalnnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat ketika, mereka mau menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, perlu disadari bahwa mahalnnya biaya pendidikan di era globalisasi ini, tidak semata-mata disebabkan karena keinginan pihak manajemen sekolah, akan tetapi juga dikondisikan oleh orang tua siswa. Hal ini terlihat dari antusias orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang berlabel sekolah favorit, sekolah unggulan, dan sekolah yang bertaraf internasional sangat tinggi, meski pun mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang tua yang memaknai pendidikan tidak hanya berdasarkan nilai utilitas, akan tetapi juga memaknai sekolah dari segi nilai simbolik.

Artinya, orang tua menyekolahkan anak-anak-anaknya ke sekolah bersangkutan tidak saja karena ingin memberikan

pendidikan yang berkualitas bagi putera-puteri mereka, akan tetapi juga dimaksudkan untuk menentukan simbol status sosialnya dalam masyarakat. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa pilihan orang tua untuk menyekolahkan putera-puterinya ke sekolah-sekolah yang berlabel favorit, unggulan, dan sekolah bertaraf internasional tidak dapat dilepaskan dari persoalan citra dan gaya hidup. Sekolah favorit adalah citra (objek) yang berfungsi sebagai juru bicara gaya hidup, baik dalam konteks identitas diri, maupun status sosial. Menurut Piliang (2004) gaya hidup harus dipertontonkan di ruang publik agar diketahui oleh orang lain. Gagasan ini, sejalan dengan anutan budaya tontonan yang bercirikan pada aneka aktivitas kepenontonan.

B. Kekerasan yang Terjadi dalam Dunia Pendidikan

Bagi masyarakat pada umumnya istilah kekerasan sering hanya dikonotasikan sebagai kekerasan fisik, sehingga ketika orang mendengar istilah kekerasan, *mindset* orang bersangkutan segera tertuju pada peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, dan bahkan mematikan. Memang dalam kehidupan nyata sehari-hari, sering didengar istilah kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan yang terjadi di ruang sidang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, dan tidak terkecuali kekerasan di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan (baca:sekolah) banyak terjadi kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, dan ada pula kekerasan yang dilakukan oleh siswa kepada siswa lainnya. Menurut catatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sepanjang tahun 2021 saja tercatat tidak kurang dari 17 kasus kekerasan terjadi di lingkungan dunia pendidikan, baik yang melibatkan peserta didik maupun pendidiknya (Kompas.com/29/12/2021) <https://nasional.kompas.com/diakses>, 1 Februari 2022.

Pada sumber yang sama Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan bahwa kasus perundungan dan kekerasan yang menimpa dunia pendidikan, terjadi mulai dari lingkungan sekolah dasar (SD), kemudian SMP, sampai pada sekolah jenjang SMA yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan bisa terjadi di lingkungan sekolah, dan bisa pula di luar lingkungan sekolah, tetapi melibatkan peserta didik dari sekolah yang sama, seperti tawuran yang terjadi antasiswa. Lebih lanjut menurut Retno setidaknya ada 11 provinsi yang mencatatkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan

Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan (Kompas.com/29/12/2021).

Menurut Asegaf (2004:3) dalam perkembangannya banyak pelajar dan mahasiswa yang tertangkap aparat keamanan karena terlibat kasus narkoba, pencurian, dan tindak kriminal lainnya yang disertai tindakan kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam bentuk tawuran antarpelajar kerap juga terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan kota besar lainnya di Indonesia. Aksi demonstrasi, yang ditujukan untuk memprotes kebijakan pendidikan, tidak saja terjadi di lingkungan kampus, yang melibatkan para mahasiswa, akan tetapi acapkali juga terjadi di lingkungan para siswa SMA, bahkan tidak jarang demonstrasi dilakukan oleh anak-anak SMP yang disertai tindak kekerasan. Lebih lanjut menurut Asegaf kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan bisa terjadi disebabkan oleh faktor pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama hukuman fisik. Artinya, ketika pelanggaran itu terjadi di sekolah, kemudian pelanggarnya diberikan hukuman fisik, dan bisa jadi hukuman yang diberikan melebihi batas kewajaran, atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran yang dilakukan, maka hal demikian dapat menjadi pemicu munculnya kekerasan. Hal ini diperkuat lagi bila antara yang dihukum dengan yang menghukum terjadi aksi saling balas dendam;

Kedua, kekerasan dalam dunia pendidikan juga bisa terjadi disebabkan oleh buruknya sistem kebijakan dan manajemen pendidikan yang diterapkan di sekolah bersangkutan. Misalnya, muatan kurikulum yang lebih menekankan transfer ilmu pengetahuan, dibandingkan transmisi nilai-nilai kehidupan dapat

menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam kegiatan pendidikan. Hal demikian berpotensi pula menimbulkan kekerasan di lingkungan pendidikan sekolah; *Ketiga*, kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dapat pula disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar sekolah dan pengaruh berbagai adegan kekerasan yang ditayangkan oleh media massa, terutama media elektronik; *Keempat*, selain tiga faktor di atas, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan bisa pula merupakan refleksi dari meluasnya paham *McDonaldisasi* menerpa kehidupan masyarakat modern dewasa ini, yang membuat mental masyarakat menjadi serba instan. Ketika hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan akademik yang memadai, maka bukan tidak mungkin dapat berakibat munculnya keinginan untuk menempuh jalan pintas atau menerabas, sehingga berpotensi pula menimbulkan kekerasan.

Selain, bentuk-bentuk kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, kekerasan yang terjadi di sekolah juga dapat berupa kekerasan psikologis dan kekerasan simbolik. Menurut Galtung (1988) kekerasan psikologis dapat berupa penyebaran kebohongan atau tindakan ancaman, sehingga daya otak (daya pikir) seseorang menjadi berkurang. Menurut Semelin (dalam Suda, 2013:15) kekerasan psikologis model ini juga bisa disebut kekerasan yang tidak tampak atau kekerasan yang dilakukan halus, sehingga sulit dikenali sebagai suatu bentuk kekerasan oleh orang kebanyakan. Selain dua bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikologis sebagaimana dijelaskan di atas, di lingkungan pendidikan (baca:sekolah) sering juga terjadi kekerasan yang disebut sebagai kekerasan simbolik. Bourdieu (dalam Piliang, 2004:359) menegaskan bahwa kekerasan simbolik (*symbolic violence*) merupakan sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tidak tampak, yang di baliknya menyembunyikan pemaksaan dominasi. Hal ini mengandung arti

bahwa, bisa jadi tindakan yang tampak sebagai perilaku yang biasa-biasa saja, namun di baliknya mengandung dominasi ide, gagasan, dan kekuasaan yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga sepintas tidak tampak sebagai sebuah pemaksaan dominasi (tidak tampak sebagai sebuah kekerasan).

Menurut Piliang (2004) konsep kekerasan simbolik yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan, menciptakan sebuah mekanisme sosial yang di dalamnya relasi pengetahuan (*knowledge relation*) saling bertautan dengan relasi kekuasaan (*power relation*) sebagaimana dikatakan Foucault, bahwa tidak ada pengetahuan tanpa efek kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (Suda, 2009:37). Dalam konteks pendidikan, sebuah sistem kekuasaan senantiasa melanggengkan dominasinya melalui bahasa yang digunakan, tanda-tanda yang dipertukarkan, citra-citra yang diproduksi, pengetahuan yang dihasilkan, serta interpretasi terhadap tanda, citra, dan pengetahuan tersebut.

Kemudian bahasa menurut Martono (2012:47) merupakan produk budaya yang dalam aplikasinya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hal ini mengandung arti bahwa, dalam konteks kekerasan simbolik di sekolah bahasa dapat dijadikan sebagai alat oleh kelas dominan untuk menjalankan mekanisme kekerasan simbolik terhadap kaum subordinat, yang dalam hal ini adalah para siswa. Dikatakan demikian sebab bahasa mempunyai peran sentral dalam menjalankan mekanisme kekuasaan dan dominasi, terutama untuk menyembunyikan maksud sebenarnya yang ada di balik sebuah tindakan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk bahasa, seperti kalimat, teks, dan tulisan, hampir selalu diikuti dengan tujuan yang bersifat laten. Misalnya, agar tidak kelihatan sebagai sebuah kekerasan, maka pihak dominan bisa saja melakukan kekerasan

simbolik di sekolah melalui teks-teks, tulisan-tulisan, dan kalimat-kalimat yang dijabarkan melalui buku-buku pelajaran sekolah.

Jika dicermati secara seksama sebenarnya di balik buku-buku teks pelajaran sekolah, kalangan dominan ingin menyebarluaskan dan memaksakan habitusnya kepada kalangan siswa melalui pembacaan buku-buku tersebut, namun tanpa disadari oleh kalangan siswa itu sendiri, karena mereka tidak memiliki akses untuk menyuarkan habitusnya. Hal ini sejalan dengan perspektif penganut aliran postkolonialisme, yang menegaskan bahwa kelompok terjajah tidak memiliki akses untuk menyuarkan habitusnya, sebab mereka merupakan "*subaltern*" yang karena posisinya memang tidak mampu bersuara. Dengan meminjam gagasan Bourdieu (dalam Suda, 2013:17) dapat dipahami bahwa bahasa memang bukan hanya sebagai alat komunikasi dan modal budaya semata, akan tetapi juga merupakan praktik sosial, yakni sebagai instrumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku sosial, untuk dapat bersosialisasi dengan pelaku sosial lainnya.

Beberapa contoh kekerasan simbolik yang disistematisasi melalui teks-teks buku pelajaran sekolah, sebagaimana dicatat Nanang Martono (2012:54—58) misalnya, kalimat yang menggunakan latar aktivitas "tamasya" atau memakai istilah wisata, rekreasi, dan lainnya. Lebih lanjut menurut Nanang sekitar 50% habitus kelas atas, menjadi sumber cerita dalam Buku Siswa Elektronik (BSE). Selain penggunaan istilah tamasya, yang memang menjadi habitus golongan atas, banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan sebagai ilustrasi dalam buku sekolah elektronik tersebut, seperti ban mobil pecah saat berwisata, tamasya naik bus ber-AC, berlibur ke kebun binatang, membersihkan rumah dengan *vacuum cleaner*, dan lain sebagainya. Jadi, jika dikalkulasi penggunaan istilah

habitus golongan atas dengan habitus kelas bawah dalam buku siswa elektronik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nanang Martono (2012) perbandingannya kira-kira mencapai 90% berbanding 10%. Hal demikian mencerminkan bahwa melalui teks-teks buku siswa elektronik ini, kalangan atas telah melakukan kekerasan simbolik terhadap para siswa sekolah. Dikatakan demikian sebab melalui pengenalan istilah-istilah yang biasa dialami oleh kalangan atas para siswa dipaksa untuk memasuki habitus kelas atas. Padahal para siswa terutama di daerah-daerah pedesaan sebagian besar berasal dari kalangan kelas bawah.

Selain istilah tamsaya yang dijadikan ilustrasi dalam buku siswa elektronik, mekanisme kekerasan simbolik juga dilakukan melalui pengenalan benda-benda atau pereralatan rumah tangga yang familiar dengan kelas atas, bahkan hanya bisa dimiliki oleh golongan atas. Misalnya, peralatan kulkas, TV, *vacum cleaner*, dan lain-lain. Pengenalan benda-benda semacam itu melalui buku-buku teks pelajaran di sekolah, sebenarnya secara konotatif dapat dimaknai sebagai mekanisme pelaksanaan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah. Dikatakan demikian sebab dengan mengenalkan benda-benda seperti itu, secara halus telah ”memaksa” anak-anak dari kalangan kelas bawah untuk mempelajari seluk-beluk benda-benda yang sangat jauh dari pengalaman dan pengetahuan mereka sehari-hari.

Fenomena tersebut memunculkan suatu permasalahan, yakni makna apa yang dapat diambil oleh para siswa, khususnya dari kalangan kelas bawah setelah mereka mempelajari teks-teks semacam itu. Logikanya seperti ini, anak-anak dari kalangan bawah, jangankan memakai peralatan, seperti *vacum cleaner*, mungkin melihat bendanya saja tidak pernah. Dengan demikian pengetahuan yang

mereka dapati dari membaca teks-teks buku seperti itu, bisa jadi hanya merupakan pengetahuan belaka yang tidak pernah berarti apa-apa bagi kehidupan praksis mereka. Padahal pengetahuan yang mereka pelajari di bangku sekolah, selain harus dapat menambah khasanah pengetahuan mereka dalam konteks teori, secara praksis seharusnya juga dapat memberikan manfaat bagi anak-anak itu sendiri, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah.

Mencermati fenomena tersebut, tidak berlebihan jika Pilang (2004:356) mengatakan bahwa berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di dalam berbagai lembaga pendidikan, dalam model dan paradigmanya dewasa ini, adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam citra kapitalisme. Maksudnya, paradigma-paradigma keilmuan dan logika-logika yang dikembangkan di dalamnya, mempunyai hubungan yang saling menghidupkan dengan logika-logika kapitalisme itu sendiri. Di antara logika-logika tersebut, ada logika tanda (*logics of sign*), ada logika cita (*logics of image*) dan ada juga logika gaya hidup (*logics of life style*). Sementara kehidupan dengan sentuhan prabotan seperti kulkas, TV, *Vacum Cleaner*, dan lain-lain, merupakan bagian dari tanda, citra, dan gaya hidup golongan atas (kelas dominan/ kaum kapitalis).

C. Pendidikan Gratis Hanya Komoditas Politik

Berbicara mengenai pendidikan gratis, dan kaitannya dengan persoalan politik memang selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya, hampir setiap pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan bahkan pemilihan presiden wacana ini sering dimunculkan oleh para kandidat pemimpin bangsa di negeri ini. Misalnya, ketika Imam Utomo terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, sebagian rakyat pemilih merasa gembira untuk menanti program pendidikan gratis yang dijanjikannya pada saat kampanye. Demikian pula pada saat Peni Suparto terpilih sebagai Walikota Malang, janji pendidikan gratis lagi-lagi menjadi program unggulan pada saat mereka kampanye. Menariknya, pendidikan gratis yang dijanjikan Peni Suparto mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sampai jenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU). Tidak jauh berbeda dengan fenomena yang dialami rakyat pemilih Imam Utomo, sebagai Gubernur Jawa Timur terpilih pada saat itu, para pemilih Peni Suparto sebagai Walikota Malang juga merasa sangat antusias menunggu janji calon pemimpinnya untuk membuat terobosan baru, yakni mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis (Susetyo, 2005:122).

Namun, pada realitasnya semua janji-janji tersebut tidak bisa diwujudkan sesuai harapan masyarakat, sebab mekanismenya tidak sesederhana yang diucapkan. Pasalnya, pembuatan kebijakan pendidikan gratis, berhubungan pula dengan kebijakan pembangunan sektor lainnya, sehingga akan bersentuhan pula dengan politik anggaran pembangunan sektor lainnya. Akan tetapi masyarakat tidak mampu berbuat banyak, ketika ada pejabat terpilih yang mengingkari janjinya saat kampanye. Sebab di negara Indonesia yang tingkat demokrasiya dapat dibilang belum stabil, belum ada

mekanisme untuk menjadikan janji-janji politik sebagai *password* untuk melengserkan atau mempertahankan pejabat tersebut, sebagaimana yang terjadi di negara-negara modern yang memiliki kualifikasi demokrasi yang sudah mapan. Umumnya di negara-negara demokrasi maju, masyarakat tidak mau dikibuli oleh para politisinya yang memang sangat potensial untuk berbuat seperti itu.

Dengan mengacu pada uraian di atas, secara singkat dapat dideskripsikan bahwa program pendidikan gratis memang acapkali dijadikan komoditas politik bagi para politisi (*elite* politik) di negeri ini dalam upaya mencapai tujuan politiknya. Hal ini disebabkan para *elite* politik memahami betul kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Sementara di sisi lain masyarakat memahami bahwa mobilitas vertikal, hanya dapat dilakukan melalui peningkatan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, janji-janji tentang pendidikan gratis tentu dapat memberikan harapan baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang ingin melakukan mobilitas vertikal. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh para *elite* politik untuk meraup suara yang sebanyak-banyaknya saat pemilihan umum berlangsung.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih relatif rendah, membuat pola berpikir mereka juga relatif setara. Dengan kondisi seperti itu, mobilitas sosial dan mobilitas geografi masyarakat menjadi kurang optimal. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dewasa ini, ditambah adanya revolusi dalam bidang transportasi dan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, membuat mobilitas sosial, dan mobilitas geografi masyarakat Indonesia menjadi sangat tinggi. Hal ini tentu dapat berakibat semakin

banyaknya masyarakat yang menjadi kosmopolitan, dan difrensiasi sosial dalam masyarakat pun ikut meningkat (Atmdja, 2010:47).

Meningkatnya jenjang pendidikan masyarakat, yang disebabkan banyaknya anggota masyarakat yang berkesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi, berakibat difrensiasi sosial dalam bidang pekerjaan pun ikut meningkat. Sebab kemampuan masyarakat untuk memasuki jenis dan jenjang pendidikan yang bervariasi, dapat memberi peluang bagi mereka untuk memilih pekerjaan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, masyarakat bisa memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, bisa bekerja sebagai polisi, tentara, bekerja di hotel, membuat perusahaan sendiri dan lain-lain. Konsekuensi logis adanya difrensiasi sosial dalam bidang pekerjaan, membuat banyak masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi, sehingga melahirkan golongan atau kelas sosial baru atas dasar kekayaan atau kekuasaan (Magnis-Suseno,1999).

Golongan mereka ini sering juga disebut orang kaya baru (OKB) yang merupakan rival dari golongan orang kaya lama (OKL), yakni orang kaya yang didasarkan atas kepemilikan tanah (dalam istilah Jawanya disebut tuan tanah). Dalam realitasnya, golongan orang kaya baru (OKB) ini bisa berasal dari orang yang awalnya miskin, tetapi setelah mendapat pekerjaan yang bagus tiba-tiba berubah menjadi kaya. Aan tetapi bisa pula orang kaya baru ini berasal dari golongan orang kaya lama (OKL) yang karena kecerdikannya dalam memanfaatkan pendidikan yang dimilikinya, membuat posisi kelas sosial mereka menjadi semakin kokoh. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa orang kaya baru yang ada saat ini bisa berasal dari orang miskin yang mampu melakukan

mobilitas sosial secara vertikal, dan dapat pula berasal dari orang kaya lama yang karna kecerdikannya memanfaatkan peluang pendidikannya mampu mengokohkan posisi kelas sosialnya yang ditempatinya semula. Jadi, dengan mengacu pada uraian di atas, dapat dibangun sebuah gagasan baru bahwa pendidikan selain dapat mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial dan mobilitas geografi yang tinggi, juga mampu membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas sosialnya secara vertikal.

D. Mobilitas Sosial dalam Masyarakat

1. Pendidikan sebagai Salah Satu Penyebab Terjadiya Mobilitas Sosial

Menurut Nasution (2009:35) mobilitas sosial adalah perpindahan golongan atau kelas sosial dari golongan sosial tertentu menuju ke golongan sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terjadi bisa disebabkan oleh adanya perubahan kepemilikan harta benda (kekayaan), kepemilikan jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial tertentu ke golongan sosial lainnya, apakah dari golongan sosial tinggi ke golongan sosial yang lebih rendah, atau sebaliknya dari golongan sosial yang rendah menuju ke golongan sosial yang lebih tinggi, inilah yang disebut mobilitas sosial vertikal. Artinya, ketika seseorang mengalami mobilitas sosial vertikal, berarti orang bersangkutan mengalami perpindahan posisi sosial dari posisi sosial tertentu ke posisi sosial lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat modern, mobilitas sosial semacam ini akan berlangsung terus, khususnya dalam masyarakat industri. Sebab masyarakat industri membutuhkan banyak tenaga teknis dan profesional, dan kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui peningkatan jenjang pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat memiliki peluang untuk melakukan mobilitas sosial vertikal sejauh mereka memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Umumnya, kelas sosial tinggi dalam masyarakat kapitalis dewasa ini tidak mampu memenuhi segala kebutuhan akan tenaga teknis dan profesional tersebut, sehingga mereka mau tidak mau harus mengambil dari lapisan sosial masyarakat di bawahnya. Orang-orang yang dilahirkan di lingkungan kelas sosial yang tinggi, kemudian mereka tidak memiliki motivasi

untuk memperoleh keahlian teknis, profesional, dan bahkan manajerial, maka tidak boleh tidak mereka-mereka ini akan mengalami penurunan kelas sosial dalam masyarakat. Hal ini umumnya terjadi dalam kehidupan masyarakat kapitalis modern yang biasa disebut masyarakat "terbuka".

Namun, sebaliknya di dalam masyarakat yang bercorak feodal, tidak diperlukan tenaga teknis dan profesional yang tinggi, sehingga tidak terjadi mobilitas sosial vertikal yang berarti. Dalam tradisi sosiologi masyarakat model ini sering disebut masyarakat yang "tertutup" atau masyarakat statis. Sedangkan dalam masyarakat industri yang cenderung bersifat terbuka sangat diperlukan tenaga teknis dan profesional, agar semua elemen masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Untuk bisa memperoleh keahlian dalam bidang teknis dan profesi tertentu, maka diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Sebab melalui proses pendidikan inilah keahlian atau profesionalisme seseorang dapat dibentuk. Sebab melalui pendidikan kemampuan masyarakat untuk melakukan analisis terhadap berbagai persoalan yang melibatkan orang lain dalam masyarakat dapat dilatih. Kemampuan untuk melakukan analisis untuk memahami suatu tindakan atau memahami makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain inilah oleh Marx Weber disebut sebagai metode *verstehen* (Damsar, 2015:33). Adapun metode *verstehen* atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

Pertama, dengan cara melakukan pemahaman secara rasional, artinya dalam memahami sesuatu harus masuk akal. Misalnya, jika air dapat membasahi, maka api dapat membakar, atau $1+1=2$ bukan yang lain. *Kedua*, dengan cara empati, yakni kemampuan untuk menempatkan diri

dalam kerangka berpikir orang lain. Di sini seseorang harus mampu melibatkan diri secara emosional eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar ungkapan berikut: "jika saya adalah anda, saya akan melakukan hal yang sama". Misalnya, jika saya perempuan, meski pun sebenarnya saya laki-laki, ketika ingin tampil menarik, maka saya juga akan menggunakan lipstik. *Ketiga*, dengan cara apresiatif, yakni cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Pemahaman ini sering juga dilakukan oleh orang Indonesia, dengan analogi sebagai berikut. Misalnya, bila kaki kita diinjak terasa sakit, maka demikian pula orang lain juga akan merasa sakit jika kakinya diinjak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar kaki orang lain tidak sampai terinjak (Damsar, 2015:33).

Berangkat dari narasi di atas, secara sederhana apat dibangun sebuah pemahaman baru bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, ketika mereka mau melakukan mobilitas sosial vertikal, dari posisi sosial yang lebih rendah menuju pada posisi sosial yang lebih tinggi. Dalam masyarakat "terbuka" pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan mobilitas sosial vertikal, asal mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah. Oleh karena itu, anak-anak dari kelas bawah, misalnya kelas buruh rendah tidak tertutup kemungkinannya untuk menduduki posisi sosial tertinggi dalam suatu negara, misalnya menjadi presiden. Namun perlu disadari bahwa pada kenyataannya anak-anak dari golongan bawah umumnya lebih banyak mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal, terutama dalam menuju posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari golongan kelas atas.

Bukan hanya itu, bagi anak-anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang bersifat primordial, ada lagi faktor-faktor lain yang dapat menjadi penghambat dalam upayanya menuju posisi sosial yang lebih tinggi. Misalnya, faktor agama, etnisitas, kasta, jenis kelamin, dan lain-lain. Misalnya, di suatu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama tertentu, bagi anak-anak yang berasal dari kalangan pemeluk agama minoritas biasanya akan mengalami kesulitan untuk bisa menduduki posisi sosial tertentu, meskipun secara hukum mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak yang berasal dari penganut agama mayoritas. Demikian halnya, dengan negara yang sistem sosialnya dipengaruhi oleh kekuasaan patriarkhi, tentu akan menjadi kesulitan bagi kalangan perempuan untuk menduduki posisi sosial tertentu. Sebab jabatan tertentu dalam struktur sosial kemasasyarakatan atau kenegaraan masih dikaitkan dengan jenis kelamin dari anggota masyarakat bersangkutan. Dalam arti kalangan laki-laki cenderung memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan kalangan perempuan dalam menduduki suatu jabatan tertentu.

Padahal, menurut Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) era pemerintahan Joko Widodo menegaskan bahwa kesetaraan *gender* tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, akan tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Lebih lanjut menurut Sri Mulyani, kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesempatan yang sama antara *gender* laki-laki dengan gender perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan *political empowerment*. Untuk kasus di Indonesia, banyak perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya sendiri, seperti rumah, tanah, atau mendirikan perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dari sisi *legal barrier* atau hambatan dari segi hukum. Selain itu, akses

modal juga perlu kapasitas seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan kepemimpinan, padahal dari sisi ini kalangan perempuan idak kalah dari kalangan laki-laki (*Kompas.com/24/4/2022*).

Masalah lainnya, yaitu mayoritas perempuan di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang, bekerja di sektor informal serta banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan sama dengan laki-laki, tetapi dibayar dengan gaji yang lebih rendah. Hal demikian tentu tidak dapat dikatakan bahwa sistem dan struktur sosial yang berlaku dalam negara bersangkutan mencerminkan rasa keadilan bagi segenap lapisan masyarakatnya. Padahal negara seharusnya bertindak adil kepada setiap warga negaranya tanpa memperhatikan agama, ras, suku, dan jenis kelamin dari setiap anggota masyarakat negara bersangkutan. Namun, dalam realitasnya di beberapa negara di dunia ini masalah agama, etnisitas, dan jenis kelamin masih saja dikait-kaitkan dengan peluang seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan maupun dalam struktur sosial kenagaraan.

Pada umumnya kaum laki-laki memiliki peluang yang lebih luas dibandingkan kalangan perempuan dalam hal menduduki posisi sosial tertentu dalam masyarakat atau dalam pemerintahan negara. Hal ini disebabkan adanya anggapan *stereotype* yang berlaku dalam masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari kedudukan laki-laki. Padahal, antara perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kedudukannya di masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki harus dijamin di dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat (Arniati, 2008:42). Dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini, di berbagai belahan dunia telah muncul gerakan feminimisme liberal,

yang melakukan perlawanan terhadap adanya diskriminasi terhadap kalangan perempuan. Hal ini terjadi karena di era modernisme sekarang ini, banyak kalangan perempuan yang telah berhasil menikmati pendidikan sampai ke jenjang tertinggi. Hal ini tentu membuat kalangan perempuan tersebut mulai menyadari bahwa hak dan kewajibannya dalam struktur sosial kemasyarakatan sama dengan hak kalangan laki-laki.

Hal ini sejalan dengan pandangan Raho (2014:244) yang mengatakan bahwa feminisme liberal merupakan suatu gerakan perlawanan yang terorganisir terhadap sistem patriarki. Namun, perlu dipahami bahwa feminisme liberal ini, bukanlah gerakan perempuan untuk melawan atau memusuhi kaum laki-laki. Akan tetapi gerakan ini hanya dimaksudkan untuk menentang ketidakadilan sosial terhadap kalangan perempuan yang diciptakan secara kultural, melalui proses sejarah yang cukup panjang. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa feminisme liberal ini hanya merupakan suatu gerakan untuk menyadarkan bahwa perempuan adalah golongan yang tertindas secara kultural. Untuk membuat seseorang atau sekelompok orang bisa mencapai tingkat kesadaran tertentu, termasuk kesadaran bahwa dirinya berada dalam ketertindasan, di sisinilah pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Sebab pendidikan dalam pandangan Freire (2002:12—13) merupakan salah satu upaya mengembalikan fungsi manusia, agar menjadi manusia yang terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan. Oleh karena itu, sebagai pusat pendidikan, manusia harus mampu menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat.

2. Mobiltas Sosial, Mobilitas Geografi, dan Mobilitas Vertikal

Mobilitas sosial dimaksudkan dalam kajian ini, adalah menyangkut pergerakan sosial (migrasi sosial) yang dilakukan oleh masyarakat, baik menyangkut migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya (mobilitas geografi) maupun menyangkut perpindahan status sosial dari status sosial tertentu ke status sosial lainnya (mobilitas vertikal). Misalnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut urbanisasi, dan perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya dalam suatu negara disebut transmigrasi, sedangkan perpindahan penduduk yang melampaui batas negara disebut imigrasi. Mobilitas sosial, dapat mencakup mobilitas geografi dan dapat pula mencakup mobilitas vertikal. Artinya, ketika masyarakat melakukan perpindahan tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lainnya inilah yang disebut mobilitas geografi, sedangkan ketika masyarakat melakukan perpindahan posisi dari struktur sosial tertentu menuju ke struktur sosial lainnya ini yang disebut migrasi vertikal.

Dalam kenyataannya, masyarakat melakukan mobilitas sosial, baik secara geografi maupun secara vertikal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Misalnya, ketika seseorang ingin menempuh jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi jenjang dan jenis pendidikan yang diminati itu berada sangat jauh dari lokasi tempat tinggalnya, maka mau tidak mau mereka harus melakukan mobiltas geografi ke lokasi yang ada jenjang dan jenis pendidikan yang diminati oleh orang bersangkutan. Demikian pula, karena pendidikan yang berhasil ditempuhnya membuat mereka bisa mendapatkan posisi tertentu di dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan, maka mereka pun harus rela melakukan mobiltas geografi. Adanya, mobilitas sosial seperti ini, dan jika dikaitkan dengan gagasan Svalastoga (1989), yang

mengatakan bahwa adanya mobilitas geografi seperti ini, dapat mengakibatkan heterogenitas masyarakat, terutama masyarakat perkotaan menjadi semakin kompleks. Sebab perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, berakibat kasta, kelas, strata, dan model kontinum ini menjadi tumpang tindih satu sama lainnya.

Semua ini bisa terjadi tentunya disebabkan oleh berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga karenanya mereka bisa mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Kemudian sebagai efek dari keberhasilan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai keahliannya akan berimplikasi pada penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulannya. Adanya mobilitas geografi, yang diakibatkan oleh berpindahnya penduduk, karena faktor pendidikan ataupun karena faktor pekerjaan sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya dapat mengakibatkan kompleksitas sosial dan kompleksitas budaya masyarakat bersangkutan menjadi semakin tinggi. Jika meminjam gagasan Spencer (1820—1903) yang memandang ada kesamaan antara masyarakat dengan organisme yang hidup, maka ada kesamaan pula cara melihat masyarakat dengan cara melihat organisme yang hidup itu sendiri. Menurut Spencer masyarakat sebagai organisme biologis, merupakan sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi (Martono, 2016:47).

Misalnya, manusia sebagai makhluk organisme yang hidup mereka akan mengalami pertumbuhan, seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya pula kepadatan tubuh mereka, atau mengalami penambahan struktur menjadi lebih rumit. Bertambahnya kompleksitas masyarakat di suatu wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen yang membangun struktur

masyarakat itu sendiri. Contoh semakin heterogen jenis dan jenjang pendidikan yang berhasil diraih oleh elemen-elemen suatu masyarakat, maka semakin komplekslah persoalan sosial yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Kompleksnya kehidupan sosial dalam masyarakat, bisa juga disebabkan oleh adanya mobilitas sosial, mobilitas geografi, dan mobilitas vertikal yang dialami oleh masyarakat.

Mobilitas vertikal mengandung arti bahwa masyarakat mengalami perpindahan posisi sosial, dari status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh keberhasilan masyarakat bersangkutan dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Logika formalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas pulalah peluang yang dapat diakses untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan bagi orang bersangkutan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Perubahan ini menurut Stephen K Sanderson (1993:60) menyangkut perubahan pada aspek infrastruktur material. Perubahan pada aspek infrastruktur material, secara linier akan mempengaruhi perubahan pada aspek struktur sosial, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula perubahan pada aspek superstruktur ideologis. Lebih lanjut menurut Sanderson, perubahan pada aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lingkungan seseorang secara linier akan mempengaruhi perubahan aspek struktur sosial, seperti stratifikasi sosial, sistem kepolitan, sistem pembagian kerja berdasarkan sex, dan ketidaksamaan secara seksual. Perubahan-perubahan ini juga secara linier akan berpengaruh terhadap perubahan pada aspek superstruktur ideologis, yang meliputi, ideologi umum, agama, ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.

Misalnya, seorang anak yang hidup di tengah keluarga petani miskin, tentu kondisi ekonominya rendah, teknologi yang dikuasanya juga sangat sederhana, kualitas SDM-nya (aspek demografinya) rendah, dan mereka biasanya hidup pada lingkungan (ekologi) yang kumuh semua ini termasuk aspek infrastruktur material. Akan tetapi, ketika anak ini karena keberuntungan kemudian mereka mampu meningkatkan kualitas pendidikannya, katakanlah mereka bisa menempuh pendidikan samapi ke jenjang tertinggi, maka setelah mereka memiliki kualitas pendidikan bagus, dapat bekerja di tempat yang bagus pula, maka struktur sosialnya dalam masyarakat juga ikut meningkat. Misalnya, ketika mereka masih miskin dulu, masyarakat akan memandangnya dengan sebelah mata. Artinya, mereka kurang dihargai dalam masyarakat, mereka juga dicuekin, dan bahkan mereka dipinggirkan. Namun, ketika mereka telah berhasil meraih pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka status sosialnya dalam masyarakat juga ikut meningkat. Mereka mulai diperhatikan, dihormati, bahkan tetangganya tidak berani memanggil dengan sebutan sebagaimana layaknya masyarakat kebanyakan, akan tetapi di lingkungan sekitarnya mereka acapkali dipanggil dengan sebutan boss.

Sebutan ini tentu, berkaitan dengan struktur sosial yang berhasil diduduki oleh orang tersebut setelah mereka melakukan mobilitas vertikal. Dengan demikian apa yang dikatakan Sanderson (1993) menemukan kebenarannya pada kehidupan sosial masyarakat dalam konteks kekinian. Atau dengan bahasa lainnya, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta lapangan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini, sejalan dengan teori perubahan sosiokultural masyarakat sebagaimana dikatakan Stephen K Sanderson dalam bukunya Sosiologi Makro (1993). Demikian pula menurut pandangan penganut aliran fungsional struktural,

masyarakat sebagai sistem sosiokultural memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi, sebab pada dasarnya masyarakat mempunyai kemampuan dalam mempertahankan dan mengadaptasikan dirinya terhadap sesuatu yang baru, baik yang berasal dari dalam lingkungan, maupun dari luar masyarakat itu sendiri.

3. Mobilitas Sosial dalam Rangka Mengikuti Pendidikan

Pendidikan dimaksud dalam kajian ini adalah kelompok layanan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut UU Sisdiknas, yang dimaksud pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Mobilitas sosial, khususnya mobilitas geografi itu terjadi, salah satunya disebabkan oleh keberadaan lembaga pendidikan, baik dari segi jenis maupun jenjangnya keberadaannya tidak merata di seluruh plosok desa atau kota di Indonesia. Misalnya, di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan lain-lainnya tentu keberadaan jenis dan jenjang pendidikan relatif lengkap dibandingkan dengan kota-kota lainya yang lebih kecil. Kondisi ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografi agar dapat memasuki jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya, anak-anak yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada sekolah jurusan Farmasi, tetapi mereka ingin melanjutkan studi ke sekolah tersebut, maka mereka

harus melakukan mobiltas sosial ke kota atau ke wilayah-wilayah yang ada sekolah Farmasinya.

Demikian pula ketika seorang anak ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah Kedokteran, sementara di kota tempat tinggalnya tidak ada sekolah Kedokteran, maka ia harus melakukan mobilitas geografi ke kota di mana lembaga pendidikan yang ingin ditujunya ada di situ. Dengan kondisi demikian, maka tidak mengherankan jika di suatu kota akan dijejali oleh kelompok masyarakat pendatang dalam rangka mengikuti jenjang pendidikan tertentu, sementara di kota lainnya masyarakat kurang tertarik untuk melakukan mobilitas geografi ke sana, dikarenakan di kota tersebut tidak tersedia berbagai jenis dan jenjan pendidikan sesuai yang diharapkan. Akibat dari kondisi ini penyebaran penduduk menjadi tidak merata di seluruh kota yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, umumnya di kota-kota besar banyak jenis pekerjaan yang tersedia, sehingga orang-orang juga tertarik melakukan mobilitas geografi ke kota bersangkutan. Untuk melakukan mobilitas vertikal orang tidak saja dapat menempuhnya melalui jalur pendidikan formal, melainkan dapat pula ditempuh melalui jalur pendidikan non-formal.

Misalnya, mereka dapat melakukannya melalui kursus-kursus, atau latihan-latihan kerja, seperti kursus Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Madarin, dan lain-lain. Selain melalui kursus-kursus sebagaimana diuraikan di atas, jalur pendidikan non-formal dapat pula ditempuh oleh anak-anak melalui latihan kerja, seperti latihan teknik montir, latihan keterampilan manajemen, latihan pengembangan usaha pertanian, dan lain-lain. Semua jenis kursus dan latihan kerja model ini adanya di daerah-daearh perkotaan, sehingga anak-anak dari daerah-daerah pedesaan yang ingin

mengikuti kursus-kursus semacam itu juga harus melakukan mobilitas geografi, guna dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal.

Dalam kaitannya dengan mobilitas vertikal atau kenaikan status sosial, dari jenjang yang lebih rendah menuju ke jenjang yang lebih tinggi, menurut Nasution (2009:37) secara umum oleh masyarakat dianggap sesuatu yang bernilai positif. Sebab kemampuan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, merupakan bukti dari keberhasilan usaha orang bersangkutan. Namun, di sisi lain keberhasilan seseorang untuk menaikan status sosialnya dapat pula membawa dampak negatif, baik bagi diri orang bersangkutan, maupun bagi lingkungan sosialnya.

Misalnya, ketika seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan orang bersangkutan akan mengubah gaya hidupnya sesuai dengan tingkat kesuksesan yang diraih. Dari segi penampilan orang tersebut akan tampil mengikuti hawa nafsunya, dan bukan mengikuti kebutuhannya. Dalam kondisi masyarakat konsumer semacam itu, menurut Piliang (2004:49) hampir seluruh energi masyarakat dipusatkan bagi pelayanan hawa nafsu, seperti nafsu kebendaan (kekayaan), kekuasaan, seksualitas, ketenaran (popularitas), kecantikan, kebugaran, keindahan, dan kesenangan, sementara hanya menyisakan seikit ruang bagi penajaman hati, pemenuhan kebijakan, peningkatan kesalehan, dan pencerahan spiritual. Dalam kebudayaan yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu, dibandingkan kedalaman spiritual, maka sebuah revolusi kebudayaan tidak lebih dari sebuah revolusi dalam penghambaan diri bagi pelepasan hawa nafsu.

Untuk mengatasi semua tindakan manusia yang bersifat *hyper* ini, dapat itempuh melalui proses pendidikan. Artinya, pendidikan seharusnya dapat membangun kesadaran manusia, untuk tetap mampu mengendalikan kebutuhannya, sehingga tidak berubah menjadi keinginan. Sebab ketika perilaku manusia mulai bergeser dari upaya pemenuhan kebutuhan menjadi usaha pemenuhan keinginan maka status manusia pun akan bergeser dari *user* menjadi *consumer*. Pada tataran teks semua ini dapat dikendalikan melalui proses pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi bisa sebaliknya, justru melalui proses pendidikan manusia bisa bertindak sebagai konsumen dan bukan sebagai user. Artinya, saat manusia mengonsumsi sesuatu barang atau jasa, di dasarnya atas nilai guna (nilai *utilitas*), maka saat itu mereka dapat dipandang sebagai *user*. Sedangkan manusia bertindak sebagai *consumer*, ketika mengonsumsi sesuatu barang atau jasa didasarkan atas muatan nilai-nilai simbolik yang melekat pada barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya, mengonsumsi sesuatu bukan karena sesuatu itu memang merupakan kebutuhan manusia itu sendiri, melainkan karena muatan nilai-nilai simbolik, pencitraan diri, atau agar penampilannya enak ditonton oleh orang lain (Piliang, 1998).

Dalam kaitannya dengan persoalan kebutuhan, maka pakaian atau makanan itu adalah kebutuhan manusia. Akan tetapi jika pakaian atau makanan itu, dikaitkan dengan persoalan gaya hidup, dalam arti ketika seseorang memakai pakaian atau mengonsumsi makanan tertentu, tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi tubuh dari teriknya matahari atau dari dinginnya udara malam (untuk pakaian) dan agar manusia tetap sehat dan bisa tumbuh dan berkembang (untuk kasus makanan), melainkan dimaksudkan agar gengsinya meningkat atau agar penampakannya seperti orang kaya, maka kebutuhan telah berubah menjadi

keinginan. Menurut Budiman (1997) pada saat pakaian diposisikan sebagai perlengkapan estetis yang mewakili kelas atau status sosial tertentu, atau agar orang yang memakainya tampak seperti orang kaya atau mengikuti gaya hidup para selebriti, maka ketika itu pula pakaian itu telah berubah menjadi keinginan, bukan kebutuhan.

Di era masyarakat konsumen dewasa ini, pergeseran kebutuhan menjadi keinginan tidak saja terjadi dalam konteks manusia memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi juga dalam hal memenuhi kebutuhan psikologisnya. Misalnya, kebutuhan manusia akan rasa aman, kebutuhan akan nilai seni, dan tidak terkecuali kebutuhan manusia akan pendidikan adalah contoh kebutuhan manusia dari aspek psikologisnya. Menurut Susetyo (2005:115) pendidikan dimaksudkan adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk membuat peserta didik memiliki daya kritis, dan mampu berpikir mandiri. Namun, jika mengacu pada pandangan Budiman (1997) di atas dan mengaitkannya dengan kondisi masyarakat dalam konteks kekinian, maka pada masyarakat golongan tertentu kebutuhan manusia akan pendidikan telah berubah menjadi keinginan. Artinya, masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi putera-puterinya, maka sekolah kini tidak lagi dilihat sebagai arena untuk mencerdaskan anak-anak mereka semata, melainkan dipandang pula sebagai tempat untuk menentukan kelas atau status sosial tertentu. Oleh karena itu, banyak orang tua siswa dewasa ini yang rela membayar uang sekolah dengan tarif yang sangat tinggi, hanya demi sebuah label. Misalnya, sekolah dengan label sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional, dan labeling lainnya yang sesuai dengan citra kapitalisme. Demi logika ini, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak lagi semata-mata diorientasikan untuk membawa siswa pada kesadaran akan kedewasaan, tetapi yang lebih

penting dalam konteks ini adalah apa yang terlihat secara kasat mata di permukaan (penampilanisme).

Dengan demikian jika mengacu pada Piliang (2004:355) maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang seharusnya dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivitas, keilmiahan (*scientifics*), dan kebijaksanaan (*virtue*), sebagai nilai dasar dalam pencarian pengetahuan, kini dimuati oleh nilai-nilai komersial, sebagai refleksi dari keberpihakan pendidikan pada kekuasaan kapitalis. Ketika pendidikan menjadi bagian inheren dari sistem kapitalisme, maka menurut Piliang berbagai paradigma metode dan teknik-teknik yang dikembangkan di dalamnya menjadi sebuah cara untuk mengukuhkan hegemoni kapitalisme tersebut. Pada realitasnya dewasa ini, kondisi inilah yang sedang melanda dunia pendidikan, sehingga pendidikan saat ini telah dianggap sebagai alat kebenaran untuk mencari keuntungan secara ekonomi. atau dengan bahasa lainnya pendidikan saat ini tidak lagi berparadigma pencerahan, akan tetapi telah bergeser ke paradigma instrumentalisme.

E. Hubungan Antarkelompok dan Terjadinya Prasangka

1. Pengertian Hubungan Antarkelompok

Sebelum membahas pengertian hubungan antar kelompok, tampaknya perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kelompok dalam konteks sosial. Adapun yang dimaksud kelompok dalam hal ini adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama. Manusia sebagai makhluk *homo socius* dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Oleh karena itu, Van Baal (1988:2) mengatakan bahwa manusia selalu bertempat tinggal di suatu tempat dan secara naluri tidak pernah hidup dan bertempat tinggal sendirian. Sehubungan dengan sifat dan naluri tersebut, berkembanglah bentuk-bentuk atau pola-pola organisasi sosial atau kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat sebagai wujud pola interaksi di antara sesama mereka. Selain hubungan antar individu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, hubungan antar dua kelompok atau lebih pun sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari esensi manusia sebagai makhluk *homo socius* inilah kemudian lahir pola-pola komunikasi dan interaksi antara sesama manusia yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Misalnya, pada masyarakat Bali berkembang kelompok-kelompok sosial seperti *desa*, *banjar*, *subak*, *sekebe*, dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang berhubungan dengan kesatuan-kesatuan kekerabatan, seperti keluarga inti (*keuren*) dan keluarga besar (*dadia*).

Keluarga inti (*keuren*) biasanya terdiri atas, ayah, ibu, dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan orang tua. Sedangkan

keluarga besar (*dadia*) adalah kumpulan beberapa keluarga inti yang masih mempunyai hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian berbicara persoalan desa sebagai unit kesatuan sosial pada masyarakat Bali dapat mengacu pada dua pengertian, yaitu *desa adat* dan *desa dinas*. *Desa adat* yang oleh Teer Haar (1958) disebut masyarakat teritorial adalah suatu bentuk kesatuan sosial yang aktivitasnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau adat dan agama, sehingga kegiatan *desa adat* lebih dipusatkan pada bidang upacara adat dan upacara keagamaan. Sebaliknya, *desa dinas* adalah kesatuan administrasi, sehingga kegiatannya lebih terpusat pada bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan (Budiana, 1995:50).

Hubungan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya, akan menjadi akur (baik), ketika di antara mereka merasa memiliki kesamaan, sehingga muncul sikap solidaritas di antara mereka. Sebaliknya, ketika di antara mereka merasa ada perbedaan, maka yang muncul adalah justru sikap tidak suka kepada kelompok yang berbeda, atau ada semacam perasaan "*dislike of the unlike*". Perasaan semacam ini kemudian dapat menimbulkan sikap *etnosentrisme*, yaitu perasaan loyal terhadap kelompok sendiri, dan sebaliknya merasa bermusuhan terhadap kelompok yang mengancam rasa kekompakan dalam kelompok mereka. Terkait dengan masalah kesamaan atau ketidaksamaan di antara kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat memang tidak selalu jelas indikatornya. Biasanya yang dijadikan indikator untuk melihat kesamaan atau ketidaksamaan sebuah kelompok adalah hal-hal yang secara visual sangat menonjol. Misalnya, ada rasa solidaritas di antara mereka yang sama-sama berkulit putih atau mereka yang sama-sama berkulit hitam.

Demikian pula ada rasa solidaritas di antara mereka yang merasa satu etnis, satu rumpun budaya, satu agama, dan lain sebagainya.

Namun, dalam kenyataannya perbedaan warna kulit, perbedaan etnisitas, perbedaan agama, budaya, dan lain-lain tidak selalu bisa dijadikan dasar untuk menentukan solid tidaknya sebuah kelompok sosial dalam masyarakat. Akan tetapi yang menarik untuk dikaji dalam konteks kesamaan atau ketidaksamaan ini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai unsur kesamaan atau ketidaksamaan ini dijadikan dasar prasangka oleh seseorang atau kelompok orang. Namun, pada kenyataannya kesamaan atau ketidaksamaan ini tidak selalu dijadikan dasar prasangka oleh seseorang atau sekelompok orang. Misalnya, perbedaan warna kulit tidak selalu menjadi dasar prasangka bagi seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan masyarakat. Contoh banyak bangsa di dunia ini yang menaruh prasangka terhadap bangsa Yahudi, sehingga berjuta-juta orang Yahudi terbunuh pada zaman Hitler atas dasar prasangka tersebut, padahal warna kulit orang Yahudi tidak ada bedanya dengan warna kulit orang Jerman (Nasution, 2009:44).

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa secara esensi manusia adalah makhluk *homo socius* yang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya selalu tergantung pada manusia lainnya. Hal inilah kemudian menyebabkan munculnya keinginan manusia untuk hidup berkelompok, bermasyarakat, dan menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Meski harus diakui bahwa persamaan antarkelompok dapat menjadikan hubungan

antarkelompok tersebut dapat berlangsung dengan baik, akan tetapi di sisi lain adanya perbedaan di antara kelompok tersebut juga dapat menimbulkan hubungan baik di antara mereka. Sebab pada hakikatnya manusia tidak selalu menginginkan persamaan, akan tetapi mereka juga menginginkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Berangkat dari realitas tersebut dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru bahwa dalam kelompok yang sama banyak terdapat perbedaan-perbedaan individu, sebaliknya di antara dua individu yang berasal dari kelompok yang berbeda dapat tumbuh rasa persahabatan yang mendalam. Jadi, singkatnya dapat ditegaskan bahwa hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat, tidak selalu didasari atas adanya persamaan, melainkan adanya perbedaan pun bisa membuat mereka melakukan hubungan.

2. Hubungan Antarkelompok di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan sebuah institusi atau lembaga yang di dalamnya anak-anak diberikan pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan agar setelah dewasa mampu hidup secara wajar dan mandiri. Atau dalam bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan di mana di dalamnya berlangsung proses pembelajaran bagi anak-anak yang sedang mengikutinya. Dalam perkembangan dunia yang semakin kapitalis dewasa ini, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah cenderung lebih menekankan penanaman aspek kognitif, dibandingkan dengan aspek afektif, dan psikomotorik. Hal ini menurut Piliang (2004:355) disebabkan masuknya sistem kapitalisme ke dalam dunia pendidikan telah menciptakan sebuah kondisi bertautnya logika pendidikan dengan logika kapitalisme (*logics of capitalism*). Dengan demikian pendidikan kemudian telah menjelma menjadi mesin kapitalisme (*capitalism machine*), yakni mesin yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan. Selain itu, pendidikan yang sebelumnya dijadikan arena

untuk melakukan pencaharian kepada para peserta didik, kini telah bergeser menjadi mesin citra kapitalisme, yakni mesin yang menciptakan citra-citra (lembaga, individu, dan pengetahuan) yang sesuai dengan citra kapitalisme itu sendiri. Padahal secara teoritik menurut David Paul Ausubel, seorang ahli psikologi kognitif kelahiran New York 1918, apapun yang dipelajari oleh anak-anak di bangku sekolah harus bermakna (*meaning full*) bagi kehidupan mereka.

Artinya, agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah, maka guru harus mampu mengaitkan informasi baru yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dengan konsep-konsep relevan yang telah ada dalam struktu kognitif anak-anak itu sendiri. Struktur kognitif dalam hal ini dimaksudkan adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi, yang telah dipelajari dan diingat oleh seorang anak melalui proses belajar. Hal inilah oleh Ausubel disebut dengan teori belajar bermakna, yaitu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang ada pada struktur kognitif seorang anak (Dahar, 2011:95). Semua ini dilakukan untuk membentuk keperibadian anak-anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkarakter, berakhlak mulia, dan merasakan bahwa belajar itu dilakukan untuk memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya.

Kemudian jika sekolah dilihat sebagai sebuah sistem sosial, maka di dalamnya akan terlihat juga adanya struktur sosial atau stratifikasi sosial sesuai kondisi sosial masyarakat, di mana sekolah itu berada. Misalnya, di sebuah sekolah yang muridnya berasal dari berbagai kelas atau golongan sosial dalam masyarakat, maka kondisi ini pun akan terbawa juga ke lingkungan sekolah itu sendiri. Contoh,

apabila di lingkungan masyarakat dimana sekolah itu berada banyak golongan (kelas) sosialnya (masyarakat multikultur), maka kelas-kelas atau golongan-golongan tersebut juga akan ikut mewarnai kehidupan masyarakat sekolah tersebut. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menurut Nasution (2009:51) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antar lain, faktor pendidikan, agama, suku bangsa, dan dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan kedudukan sosial dan ekonomi masing-masing individu dalam masyarakat.

Berdasarkan studi yang dilakukan Suda (2017) pada sebuah sekolah favorit di Kota Denpasar tentang "Marjinalisasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu" ditemukan bahwa stratifikasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat sekolah, tidak saja disebabkan oleh adanya perbedaan etnis, agama, kedudukan sosial, dan ekonomi orang tuanya dalam masyarakat, akan tetapi dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan minat dan bakat yang dimiliki para siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Misalnya, anak-anak yang berbakat dan berminat terhadap kelompok mata pelajaran MIPA, akan dipandang kedudukannya lebih tinggi dari pada anak-anak yang kebetulan memiliki minat atau bakat dalam bidang mata pelajaran ilmu sosial atau humaniora. Dengan demikian menurut Suda di lingkungan masyarakat sekolah munculah "kasta baru" dunia pendidikan yang memposisikan anak-anak yang memiliki minat dan bakat terhadap kelompok mata ajar Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) lebih tinggi kedudukan atau "kastanya" dibandingkan anak-anak yang memiliki minat dan bakat terhadap kelompok mata ajar Ilmu Pengetahuan Sosisal dan Humaniora.

Akibatnya, di lingkungan masyarakat sekolahpun muncul anggapan bahwa mata ajar Ilmu Pengetahaun Alam (MIPA)

mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Humaniora lainnya, seperti kesenian, bahasa, dan agama. Adanya upaya menomorduakan jenis mata ajar tertentu, khususnya mata ajar pendidikan agama, dalam terminologi Erich Fromm disebut *to have religion* bukan *to have religious* (Cristiato, P. Raharjo, 1987). Artinya, dalam konteks pelaksanaan pendidikan sekolah anak-anak lebih ditekankan untuk menguasai aspek kognitif yang ditanamkan melalui Ilmu Pengetahuan Sains dibandingkan pembentukan sikap dan perilaku mereka yang umumnya dibentuk melalui pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.

Dalam kehidupan masyarakat sekolah, perbedaan kelas, baik yang disebabkan karena adanya perbedaan etnis, agama, budaya, maupun yang disebabkan karena perbedaan minat dan bakat para siswa terhadap bidang ilmu tertentu, acapkali mempengaruhi hubungan sosial di antara mereka. Misalnya, anak-anak yang kebetulan memiliki minat dan bakat terhadap mata ajar Ilmu Pengetahuan Alam, acapkali merasa kedudukannya lebih tinggi dari mereka yang kebetulan memiliki minat dan bakat terhadap mata ajar Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Hal demikian dapat menimbulkan sikap-sikap arogan, eksklusif, dan egois, bagi yang kebetulan memiliki minat dan bakat terhadap kelompok mata ajar IPA, serta mereka cenderung memilih dalam hal bergaul untuk mereka-mereka yang memiliki minat dan bakat yang sama, serta merasa dirinya superioritas. Sementara di sisi lain ada kelompok anak-anak yang memiliki minat dan bakat terhadap mata ajar IPS dan Ilmu Humaniora lainnya, dengan perasaan inferiornya.

Jadi, dengan mengacu pada uraian di atas dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa di lingkungan anak-anak sekolah pun

acapkali terjadi hubungan antarindividu atau antarkelompok yang didasarkan atas perbedaan atau persamaan siswa atas dasar asal etnis, agama, budaya, adat-istiadat, kedudukan sosial orang tuanya dalam masyarakat dan minat serta bakatnya terhadap bidang ilmu tertentu. Adanya hubungan yang bersifat hierarkhis antarindividu dan antarkelompok di lingkungan masyarakat sekolah dapat berakibat munculnya atmosfir akademik yang kurang baik di lingkungan sekolah itu sendiri. Misalnya, anak-anak yang berasal dari golongan minoritas atau pun anak-anak yang berasal dari kelompok yang memiliki perasaan inferior, bisa saja diperlakukan dengan cara yang tidak wajar oleh anak-anak yang merasa dirinya superior. Contoh, bisa jadi anak-anak dari golongan inferior diacam, dipalak, atau dalam kegiatan tertentu mereka disingkirkan, karena dianggap beda kelas. Dengan perlakuan semacam itu, maka anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas atau dari kelompok imperioritas akan merasa dirinya teralienasi (tersingkirkan) dari anak-anak yang berasal dari kelompok yang merasa superior. Jika kondisi ini terjadi di sebuah lembaga pendidikan sekolah, maka guru harus segera mencari cara penanggulangannya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar anak itu sendiri.

3. Upaya Memperbaiki Hubungan Antarkelompok di Lingkungan Sekolah

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa masyarakat sekolah secara garis besar memiliki kemiripan dengan masyarakat pada umumnya. Dalam arti, jika pada masyarakat umum memiliki stratifikasi sosial, demikian halnya dengan masyarakat sekolah, juga mempunyai stratifikasi sosial. Hanya saja stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat secara umum jauh lebih kompleks dibandingkan dengan stratifikasi sosial yang ada pada lingkungan sekolah. Misalnya, stratifikasi sosial yang ada di lingkungan

masyarakat, bisa didasari atas berbagai hal, seperti berdasarkan kedudukan sosial, berdasarkan ekonomi, berdasarkan garis keturunan (genalogi), berdasarkan etnis, agama, dan lain-lain. Sedangkan stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat sekolah, cenderung lebih didasarkan pada bakat dan minat siswa terhadap kelompok mata pelajaran tertentu. Contoh ada strata (kelompok) siswa MIPA, ada yang kelompok IPS, kelompok Bahasa, Budaya, dan lain sebagainya. Memang stratifikasi sosial siswa yang didasarkan atas kedudukan sosial orang tuanya, faktor ekonomi, dan agama berpengaruh pula terhadap hubungan antarsiswa atau antarkelompok di sekolah, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam konteks sekolah faktor yang paling menonjol mempengaruhi terjadinya stratifikasi sosial adalah pengelompokan siswa berdasarkan atas jurusan, seperti kelompok siswa yang termasuk golongan IPA, kelompok siswa yang termasuk golongan IPS, Bahasa, Budaya, dan lain-lain.

Di antara kelompok-kelompok yang ada bisa saja terjadi kerja sama yang baik, dan sebaliknya bisa juga terjadi konflik di antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahrendorf (dalam Poloma, 1992:131) yang menganggap bahwa masyarakat adalah bersisi ganda, yakni di satu sisi memiliki dimensi kerja sama, dan di sisi lain juga ada dimensi konfliknya. Hal ini mengandung arti bahwa segala peristiwa yang dialami oleh masyarakat manusia dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, dan dapat pula dianalisis dengan perspektif konflik. Persoalannya, meski pun Dahrendorf adalah tokoh penganut fungsionalisme struktural, dan sebagai ahli teori konflik, lalu pertanyaannya seberapa jauh mereka telah berpisah dengan mazhab fungsionalisme (Weingart, 1969:151—165). Akan tetapi yang jelas, Dahrendorf telah

melahirkan kritik penting terhadap pendekatan fungsionalisme struktural yang sempat dominan dalam tradisi sosiologi, yakni mengenai kegagalannya dalam menganalisis masalah konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dahrenrorf menegaskan bahwa proses konflik sosial itu, merupakan kunci bagi struktur sosial untuk lebih memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan mengacu pada perspektifnya Dahrenrorf di atas, maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh guru atau pihak sekolah dalam memperbaiki hubungan antarkelompok yang terjadi di sekolah. Untuk memperbaiki hubungan antarkelompok siswa di sekolah guru atau pihak manajemen sekolah dapat menempuh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, guru atau manajemen sekolah dapat menggugah perasaan atau sikap anak-anak dengan berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang sangat mendasar (fundamental). Misalnya, dengan mengetengahkan konsep keadilan, sikap keberagaman yang universal, konsep kesamaan manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Contoh, guru dapat menerangkan bahwa pada hakikatnya harkat dan martabat manusia adalah sama di hadapan Tuhan, yang membedakannya adalah sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun yang menganggap orang lain itu, rendah, tidak berharga, tidak mulia, hanya karena melihat tampilan fisiknya. *Kedua*, dengan cara memberikan informasi kepada peserta didik bahwa perbedaan-perbedaan rasial dan kultural yang ada pada diri setiap manusia, bukanlah disebabkan karena faktor genalogis, melainkan karena dipelajari dan karena lingkungan budaya masing-masing.

Ketiga, dengan menyadarkan para siswa bahwa dalam pergaulan sebaiknya lebih melihat unsur peramaan dibandingkan

perbedaan di antara mereka, sebab dengan demikian para siswa dapat menyadari bahwa kekurangan yang dimiliki oleh seseorang dapat ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki orang lain dan begitu sebaliknya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menggugah pikiran para siswa bahwa pada dirinya selalu ada kelebihan dan kekuarangan yang harus saling melengkapi satu sama lainnya. *Keempat*, guru atau pihak manajemen sekolah juga dapat memberikan informasi kepada para siswanya bahwa sekecil apapun peran yang dimainkan seseorang, tetap mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup kelompok itu sendiri. Sebab pada hakikatnya tidak ada orang yang sempurna terlahir ke dunia ini. Dalam istilah Balinya ada sebuah adagium yang mengatakan "*tan hana wong swasta ayu nulus*" artinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karenanya, manusia satu dengan manusia lainnya akan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Kelima, selain dengan mengakar pada nilai-nilai kehidupan sosial dan nilai-nilai keagamaan, untuk menggugah pikiran dan perasaan para siswa agar dapat menghargai keberadaan orang atau kelompok lain juga dapat dilakukan dengan mengacu pada persoalan yuridis. Dalam konteks ini guru atau pihak manajemen sekolah harus mampu menjelaskan bahwa setiap manusia Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam undang-undang. Mislanya, pasal 27 (1) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya".

Jadi, berdasarkan beberapa langkah yang telah diuraikan di atas guru atau pihak manajemen sekolah dapat memperbaiki hubungan antarindividu maupun antarkelompok yang ada di

lingkungan sekolah dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kehidupan sosial, nilai-nilai agama, dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun, pada kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat untuk memperbaiki hubungan antarindividu ataupun antarkelompok apalagi yang sudah terlanjur mengalami konflik, tidaklah semudah yang diomongkan. Sebab adakalanya manusia di muka bumi ini yang bermuka ganda, yakni di satu sisi mereka berpegang pada orma-norma agama, dan undang-undang, sementara di sisi lain mereka tetap *memiliki* prasangka negatif terhadap orang lain, sehingga terhadap orang-orang semacam ini sulit untuk disadarkan.

4. Terjadinya Prasangka Antarkelompok dalam Masyarakat atau di Sekolah

Menurut Hogg (2002) kata prasangka (*prejudice*) secara etimologi berasal dari bahasa Latin dari akar kata *prae* yang berarti sebelum dan *judicium* yang berarti keputusan. Lebih lanjut menurut Hogg bahwa prasangka merupakan sikap sosial atau keyakinan kognitif yang merendahkan, ekspresi dari perasaan yang negatif, rasa bermusuhan atau perilaku diskriminatif kepada anggota dari suatu kelompok sosial tertentu sebagai akibat dari keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Definisi senada dijelaskan pula dalam *Chambers English Dictionary*, yang menegaskan bahwa prasangka adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh seseorang tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu (Coki Sidari, dalam <https://www.kumpulanpengertian.com/17/11/2015>. Diakses, 6 Februari 2022).

Jadi, memberi penilaian atau memberi pandangan terhadap sesuatu, sebelum sesuatu itu dipahami atau diketahui secara pasti kebenarannya, inilah yang disebut prasangka yang dalam bahasa

Inggrisnya disebut *prejudice*. Pada umumnya prasangka itu ditujukan kepada individu atau kelompok yang berbeda dengan diri atau kelompoknya. Namun, berdasarkan teori sosiologi perbedaan itu, tidak selalu menjadi dasar terjadinya prasangka. Misalnya, perbedaan kebudayaan tidak selalu menjadi dasar terjadinya prasangka terhadap pendukung kebudayaan tersebut. Demikian pula perbedaan warna kulit juga tidak selalu menjadi dasar bagi terjadinya prasangka.

Berangkat dari gagasan tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia pada esensinya tidak selalu menginginkan persamaan, melainkan dalam hal-hal tertentu manusia juga menginginkan perbedaan yang ditandai oleh keinginannya untuk mencari sesuatu yang baru. Misalnya, dua orang sarjana yang berlainan kebangsaan, dan warna kulitnya akan merasa lebih dekat dengan teman yang sama-sama sarjana, dibandingkan dengan seorang buruh kasar yang meskipun memiliki kebangsaan dan warna kulit yang sama. Satu analogi lain yang dapat dipadankan dalam konteks ini, misalnya dalam satu kelompok yang sama, banyak juga diantara anggotanya yang memiliki perberdan-perbedaan individu. Demikian sebaliknya, antara dua orang dari kelompok yang berbeda dapat menumbuhkan rasa persahabatan yang mendalam atas dasar persamaan.

Prasangka yang terjadi di dalam masyarakat, baik antarindividu maupun antarkelompok bisa jadi memiliki level yang lebih tinggi dari prasangka yang terjadi antarindividu atau antarkelompok yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan stratifikasi sosial (pelapisan sosial) yang ada di lingkungan masyarakat jauh lebih kompleks sifatnya dibandingkan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan internal sekolah. Demikian pula kepentingan masyarakat umum juga jauh lebih kompleks dibandingkan kepentingan siswa-siswa sekolahan. Sebab selain

persoalan stratifikasi sosial, di lingkungan masyarakat umum juga terdapat berbagai ideologi atau kepentingan, baik menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Misalnya, di masyarakat berkembang berbagai ideologi, seperti ideologi kapitalis, ideologi agama, ideologi marxis, dan ideologi politik.

Menurut Kaisiepo (1985:ix) di balik ideologi-ideologi politik yang memberi legitimasi terhadap sistem politik itu sendiri, sebenarnya tersimpan bahaya manipulasi terhadap kebebasan dan hak-hak asasi individu manusia. Oleh karena itu, terhadap setiap ideologi apapun namanya, masyarakat harus bersifat kritis, jika tidak mau menjadi objek politik semata yang dimanipulir. Realitas tersebut memberi gambaran yang jelas bahwa kehidupan masyarakat memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dimensi kehidupan siswa di sekolah.

Untuk mengantisipasi agar prasangka tidak mengarah pada terjadinya hubungan negatif antarindividu maupun antarkelompok di lingkungan sekolah, maka guru dapat menjadikan nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai agama sebagai basis penyadaran siswa untuk tidak berprasangka negatif terhadap teman atau kelompok lainnya. Misalnya, melalui pembelajaran materi ajar tertentu guru dapat menyelipkan pesan-pesan moral, dan pesan-pesan agama untuk menyadarkan para siswa bahwa apapun bentuk sikap dan perilaku yang dijalankan oleh seseorang, cepat atau lambat pasti akan ada hasil yang diterimanya, sebagai wujud *pahala* dari *karma* yang dilakukan. Baik-buruknya pahala yang diterima seseorang tentu sangat tergantung pada baik-buruknya perbuatan (*karma*) yang dilakukan orang bersangkutan. Menurut pandangan Hindu *karma phala* itu merupakan bagian dari ajaran *panca sradha* yang sangat

diyakini oleh umat Hindu sebagai hukum sebab akibat yang tidak pernah ingkar janji.

Oleh sebab itu guru harus berani dan mampu menyadarkan peserta didiknya atas kebenaran dari hukum *karma phala* tersebut. Penanaman nilai-nilai *karma phala* pada masyarakat Hindu di Bali, di era 1960-an lumrah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau nenek-kakek kepada cucunya melalui ceritra dongeng menyalang mereka tidur. Menurut Giddens (2003) pendidikan dengan media dongeng sangat bermanfaat untuk mengembangkan hubungan murni (*pure relationship*), yakni komunikasi emosional berdimensi cinta dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Misalnya, ceritra rakyat Bali (dongeng Bali), di dalamnya selalu terselip ajaran etika-hitam putih yang menggambarkan secara gamblang mengenai ajaran baik-buruk yang dikaitkan dengan konsep *karma phala*.

Kisah yang biasa digambarkan dalam ceritra rakyat Bali adalah berupa dialektika atau pergulatan aktor yang baik dengan aktor yang jahat (tidak baik), yang biasanya di akhir ceritra dikisahkan bahwa aktor yang memerankan kebaikan akan mendapat pahala yang positif, sementara aktor yang memainkan peran jahat akan memperoleh pahala yang negatif. Oleh karena itu, penggunaan dongeng sebagai media pendidikan secara otomatis memberi peluang kepada penuturnya untuk menanamkan kearifan tradisional atau kerifan sosial dengan menekankan etika hitam-putih dalam konteks *karma phala* (Atmadja, 2010:33—34).

Dengan demikian apat ditegaskan bahwa terjadinya prasangka, baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, sebenarnya bermula dari adanya anggapan negatif terhadap orang lain atau kelompok lain, yang belum tentu kebenarannya. Prasangka yang terjadi di masyarakat berdimensi jauh lebih kompleks

dibandingkan dengan prasangka yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan dalam kehidupan masyarakat umum terdapat berbagai stratifikasi sosial, ideologi, dan dimensi-dimensi lainnya yang dapat mempengaruhi kompleksitas hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat. Sementara di lingkungan sekolah, dimensi-dimensi kehidupan sosial para siswa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan dimensi-dimensi kehidupan masyarakat umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, dalam membina keperibadain para siswa sekolah, guru tetap harus memperhatikan hubungan yang terjadi, baik antarindividu maupun antarkelompok siswa sekolah, agar dapat mencegah secara dini terjadinya prasangka negatif di kalangan siswa. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh guru, agar perkembangan karakter siswa ke depan dapat berjalan secara wajar, sehingga dari rahim lembaga pendidikan dapat lahir putera-puteri bangsa yang bermartabat yang dalam konteks Hindu disebut anak yang *suputra*.

5. Proses Terjadinya Prasangka antar Kelompok dalam Masyarakat

Proses terjadinya prasangka antarkelompok dalam masyarakat sebenarnya berawal dari munculnya prasangka dari diri seorang pribadi. Misalnya, dua orang anggota masyarakat yang mempunyai status sosial yang sama, yakni sama-sama miskin tanpa pekerjaan dan sama-sama berasal dari status sosial yang rendah. Dalam rangka mencari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan mereka, kedua orang tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Orang pertama, mencari penyebab kemiskinannya dengan menyalahkan orang lain, sedangkan orang kedua dalam mencari akar permasalahan atas kemiskinan yang dialaminya dilakukan dengan menyalahkan dirinya sendiri. Misalnya, tingkat pendidikannya rendah, kurang mempunyai pengalaman, kurang berusaha, kurang

kerja keras, dan lain-lain. Berangkat dari ilustrasi tersebut dapat ditegaskan bahwa prasangka sangat berkaitan dengan kepribadian seseorang.

Ketika seseorang mencari akar permasalahan yang dihadapinya dilakukan dengan cara menyalahkan orang lain, maka hal inilah yang dapat menimbulkan prasangka terhadap orang lain. Kemudian bila prasangka pribadi ini *diekspose* ke dalam kelompok, maka berkembanglah menjadi prasangka antarkelompok yang sebenarnya bermula dari prasangka pribadi. Untuk memahami adanya perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua orang dalam ilustrasi di atas, dapat dilacak melalui akar pemikiran Paulo Freire (1970) yang mengatakan bahwa kesadaran manusia dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni (1) kesadaran magis (*magical consciousness*); (2) kesadaran naif (*naïve consciousness*); dan (3) kesadaran kritis (*critical consciousness*). Kesadaran magis mengandung arti bahwa, di dalam manusia mencari akar permasalahan yang menimpa dirinya, mereka tidak mampu melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya yang menyebabkan dirinya mengalami kemiskinan. Dalam melacak permasalahan yang dihadapinya manusia cenderung berorientasi pada kekuatan di luar diri manusia itu sendiri (menggunakan) pendekatan magis. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa di dalam mencari akar permasalahan yang dihadapi manusia di dalam menjalani kehidupannya lebih banyak menggunakan pendekatan di luar kemampuan diri manusia itu sendiri, baik natural maupun supranatural. Ketika teori perubahan sosial yang digunakan untuk menganalisis suatu sebab-musabab ketidakberdayaan masyarakat dalam menjalani kehidupannya di dalam masyarakat, maka hal tersebut menurut pandangan Freirean, disebut sebagai teori sosial *fatalistik*. Artinya, ketika suatu teori sosial tidak mampu melihat kaitan antara struktur sosial dengan sistem

sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga mengandung arti bahwa, dalam memecahkan permasalahan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinannya, masyarakat secara dogmatik menerima 'kebenaran' dari teoritisasi tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Kedua, adalah kesadaran naif, yakni sebuah kesadaran yang lebih melihat 'aspek manusia' sebagai akar penyebab ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kemiskinan dalam hidupnya. Menurut kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, dan *need for achievement* dianggap sebagai penentu dalam menganalisis permasalahan sosial yang dihadapinya. Dengan mengacu pada narasi di atas, dan jika menggunakan paradigma kesadaran naif sebagai alat analisisnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat atau faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh masyarakat adalah karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Misalnya, karena mereka malas, tidak memiliki jiwa kewirausahaan, atau tidak memiliki budaya pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat yang memiliki kesadaran naif, dalam mencari akar permasalahan yang dihadapi biasanya dengan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam arti mereka tidak mampu melihat bahwa sebenarnya sistem dan struktur sosial yang dibuat oleh manusia itu sendirilah yang mempengaruhi ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Menurut teori perubahan sosial, paradigma semacam ini disebut paradigma perubahan reformatif, bukan paradigma perubahan transformatif.

Ketiga, adalah kesadaran kritis, yakni sebuah kesadaran yang lebih melihat bahwa aspek sistem dan struktur sosial sebagai sumber masalah bagi manusia dalam melihat penyebab kemiskinan

suatu masyarakat. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* (menyalahkan korban) dalam menganalisis permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, akan tetapi lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta bagaimana kaitan tersebut berakibat pada masyarakat. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan, dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana struktur itu bekerja, dan bagaimana mentransformasikannya (Fakih, 2003:31—33).

BAB VI

Struktur Sosial Sekolah, Tujuan, Peran dan Kedudukan Kepala Sekolah dan Guru

A. Pengertian Struktur Sosial Sekolah

Struktur sosial menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip (<https://www.detik.com/edu/18/11/2021>) adalah kerangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur dalam masyarakat. Sementara Sanderson (1993:61) menegaskan bahwa struktur sosial adalah apa yang dilakukan orang secara aktual, bukan apa yang mereka katakan mereka lakukan, bukan pula apa yang mereka pikirkan mereka lakukan atau apa yang mereka pikir harus mereka lakukan. Berangkat dari kedua pengertian struktur sosial di atas, maka yang dimaksud struktur sosial sekolah adalah sebuah kerangka yang menggambarkan kaitan atau hubungan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat sekolah, seperti kepala sekolah, guru, pegawai, *cleaning service*, dan siswa. Dalam konteks struktur sosial terdapat sistem kedudukan dan peranan setiap unsur yang bersifat hierarkhis, yakni dari kedudukan yang paling tinggi yang memegang kekuasaan paling banyak, sampai kedudukan yang paling rendah.

Dalam sebuah struktur sosial tiap-tiap unsur mempunyai peranan dan kedudukan masing-masing, dan dapat menjalankan

peran dan fungsinya sesuai kedudukan yang dimiliki. Adanya struktur sosial di lingkungan sekolah dapat mencegah munculnya berbagai konflik sosial, sehingga kelancaran jalannya pendidikan dapat diwujudkan. Kedudukan dalam sebuah struktur sosial juga dapat menentukan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Misalnya, bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan guru, hubungan guru dengan muridnya, dan hubungan guru dengan pegawai, dan seterusnya. Apa yang diharapkan oleh kepala sekolah terhadap perilaku gurunya, apa yang diharapkan oleh guru terhadap perilaku siswanya, dan begitu pula sebaliknya. Contoh dalam kedudukannya sebagai seorang guru misalnya, ia mengharapkan suatu kelakuan tertentu dari para siswanya, terlepas dari karakter pribadinya sebagai individu, apakah dia termasuk orang malas, keras, pandai, atau rajin.

Jadi, struktur sosial yang dibentuk di sekolah akan menentukan status dan peran seseorang dalam menjalankan organisasi sekolah. Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa peran merupakan konsekuensi atau akibat kedudukan atau status seseorang. Misalnya, seorang kepala sekolah harus mampu dan berani memberikan perintah, instruksi dan seklaigus mengontrol kinerja bawahannya. Secara organisatoris, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa senantiasa diharapkan dapat mematuhi instruksi kepala sekolah, sehingga prganisasi sekolah dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Hanya saja, yang perlu dipahami dalam konteks kedudukan dan peran seseorang dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi sekolah adalah cara-cara orang untuk memainkan peran dan kedudukanya berbeda satu sama lainnya, sesuai kepribadian orang bersangkutan.

Peran dan kedudukan seseorang dalam organisasi sekolah sebenarnya bertalian dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya sesuai peran dan kedudukan yang diembannya. Misalnya, seseorang yang berkedudukan sebagai guru ia mempunyai kewajiban untuk mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didiknya untuk belajar, mematuhi peraturan sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, dan lain-lain. Sementara di sisi lain dia berhak mendapat imbalan dari kewajiban tersebut berupa upah atau gaji. Selain itu, guru juga berhak menyuruh peserta didiknya untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan bila perlu disertai *reward and fanishment*. Langkah-langkah ini menurut Danim (2005:53) disebut sebagai sebuah kepemimpinan, yakni tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinir dan memberi arahan kepada kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam organisasi tertentu untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Hal senada disampaikan oleh McFarland (dalam Danim, 2005:53) bahwa kepimpinan sebagai suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berangkat dari kedua pengertian tentang kepemimpinan di atas, dan jika dikaitkan dengan peran dan kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi, maka dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa sifat kepemimpinan seseorang sangat mempengaruhi keberhasilan orang tersebut dalam memainkan peran dan kedudukannya dalam organisasi bersangkutan. Misalnya, seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan transformasional, dalam arti memiliki sifat kepemimpinan yang mampu mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda, maka orang bersangkutan

besar kemungkinannya akan dapat membawa organisasi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Contoh dalam kepemimpinan transformasional seorang pemimpin mampu mentransformasikan visi organisasinya ke arah tindakan nyata (realita), demikian pula dia mampu mengubah potensi yang ada di lingkungan organisasinya menjadi sesuatu yang bersifat aktual, mampu mengubah hal-hal yang bersifat laten menjadi manifes dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan struktur sosial di sekolah, semua elemen yang membangun struktur tersebut, sebenarnya mempunyai peran dan kedudukan masing-masing. Bila semua organ yang duduk dalam struktur sosial sekolah dapat memainkan peran dan kedudukannya dengan baik, maka niscaya organisasi itu akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, apabila seorang kepala sekolah sebagai manejer sekolah mampu menerapkan kaidah kepemimpinan transformasional, maka dia akan mampu mengubah energi sumber daya sekolah, baik manusia, interumen, maupun situasi menjadi hal-hal yang bersifat aktual, sehingga tujuan-tujuan reformasi sekolah segera dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah struktur sekolah dalam membawa organisasinya menuju cita-cita yang diinginkan, sangat tergantung pada kemampuan setiap organ yang ada dalam struktur tersebut untuk memainkan peran dan kedudukannya masing-masing. Misalnya, keberhasilan organisasi sekolah untuk mencapai cita-citanya sangat ditentukan oleh komitmen guru dalam mengemban tugasnya, kepuasan guru dalam bekerja, kepemimpinan kepala sekolah, kerja sama antarelemen yang membangun struktur tersebut, dan kultur akademik yang dibangun secara bersama-sama oleh struktur itu sendiri. Jadi, intinya sebuah organisasi sekolah akan

dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bila organ-organ yang membentuk struktur tersebut mampu memainkan peran dan kedudukannya masing-masing. Sebaliknya jika organ-organ yang membentuk struktur itu, tidak mampu memainkan peran masing-masing, maka tujuan organisasi sekolah sulit dapat dicapai dengan baik.

B. Tujuan Dibentuknya Struktur Sosial Sekolah

Sebagaimana dipahami bersama bahwa dalam sebuah struktur sosial terdapat kedudukan dan peranan dari tiap-tiap organ yang ada dalam struktur tersebut dan cenderung bersifat hierarkhis. Artinya, semua organ yang ada dalam struktur sosial tertentu mempunyai kedudukan yang berjenjang, yakni mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, semua mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dalam struktur sosial sekolah, kedudukan tiap-tiap organ juga bersifat hierarkhis (berjenjang), yakni kepala sekolah mempunyai kedudukan dan posisi yang paling tinggi kemudian di bawahnya adalah wakil kepala sekolah, guru, TU, sampai pesuruh sebagai organ yang paling rendah (Nasution, 2009:72).

Tujuan dibentuknya struktur sosial di sekolah adalah untuk mengukuhkan keberadaan (kedudukan) sekolah tersebut, dalam arti dengan struktur sosial yang ada sekolah dimungkinkan untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dikatakan demikian sebab kedudukan dan status seseorang dapat menentukan posisi dan peran yang harus dimainkannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan. Status atau kedudukan seseorang apakah dia berada di atas atau di bawah kedudukan orang lain akan mempengaruhi perannya.

Terkait hal tersebut, maka peranan dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsekuensi atau akibat dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang. Misalnya, seseorang yang berkedudukan sebagai kepala sekolah, maka dia memiliki peranan untuk menentukan berbagai kebijakan sekolah, dan sekaligus dapat mempengaruhi peranan wakil kepala sekolah, guru, TU, bahkan

pesuruh sekolah melalui kewenangannya untuk memberikan instruksi atau perintah kepada bawahannya. Demikian sebaliknya, wakil kepala sekolah, guru, TU, dan pesuruh sekolah wajib mematuhi instruksi kepala sekolah, dan begitu seterusnya. Namun, cara dan mekanisme seseorang membawakan peranannya berbeda antara satu orang dengan orang lainya tergantung seninya masing-masing. Seni yang dimaksud dalam konteks kepemimpinan adalah lebih mengarah pada suatu "nilai seni" yang memandang bahwa kesenian adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Hal ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjunjung tinggi nilai seni, maka orang bersangkutan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi pula untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Sebab secara teori orang-orang seperti itu, lebih suka menghadapi keadaan sekitar melalui ekspresi diri dan menghindari keadaan yang bersifat interpersonal. Jadi, secara singkat dapat ditegaskan bahwa sifat-sifat manusia seni adalah hidup bersahaja, senang dengan keindahan, gemar mencipta, dan mudah bergaul dengan siapa saja (Suda, 2006:167—168).

Selain karena seni dan karakter yang dimiliki seorang pemimpin dapat membedakan perannya dalam sebuah organisasi, kondisi dan kultur yang dianut masyarakat di mana organisasi itu berada juga ikut berpengaruh. Misalnya, masyarakat Indonesia yang masih bersifat feodal di mana peran pemimpin masih sangat menentukan, maka peran kepala sekolah sebagai pemimpin pun masih sangat menentukan jalannya roda kehidupan organisasi sekolah (Tilaar, 2009:21). Dengan mengacu pada uraian di atas, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa peran dan kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi, ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor karakter (kepribadian) orang bersangkutan, faktor seni kepemimpinan yang dimiliki, dan budaya

yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat di mana organisasi sekolah itu berada.

Namun, perlu ditegaskan dalam uraian ini bahwa apa pun faktor yang mempengaruhi peran dan kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi, yang jelas tujuan dibentuknya struktur sosial di lingkungan sekolah adalah untuk menegakan dan memperkuat keberadaan sekolah itu sendiri sebagai sebuah organisasi. Dikatakan demikian sebab dengan adanya struktur sosial di lingkungan sekolah, membuat tugas dan kewenangan setiap organ yang membentuk struktur itu menjadi jelas. Misalnya, kedudukan seseorang sebagai guru, maka kewajibannya adalah mendidik para siswa agar tumbuh dan berkembang menjadi insan yang cerdas dan berbudi pakerti luhur, serta berhak untuk memberikan instruksi kepada para siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Apabila ada peserta didik yang menolak atau tidak mengindahkan instruksi tersebut, maka guru berhak memberikan hukuman atau *fanishment*, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, bagi siswa yang bisa mengerjakan tugas dengan baik dan cepat guru juga berhak memberikan *riward*, sehingga ada keinginan bagi siswa bersangkutan untuk mengulangi perbuatan yang baik tersebut. Hal ini sangat terkait dengan pembentukan karakter para siswa di sekolah agar menjadi anak yang baik dan berkepribadian.

Berbicara pembangunan karakter (*caracter bulding*) memang selalu menawarkan diskusi menarik, terutama dalam diskursus modernitas. Modernisasi sebagai sebuah arus kebudayaan di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan prinsip-prinsip individualisme, pragmatisme, dan hedonisme. Individualisme mengandung arti manusia tidak lagi memahami dirinya dalam konteks diri komunal, melainkan dalam konteks diri individualistik.

Atau dalam bahasa lainnya, manusia tidak melihat masyarakat atau komunitas sebagai yang utama, dengan individu sebagai produknya, melainkan masyarakat hanya dianggap sebagai kumpulan individu-individu bebas yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, maka terjadilah pergeseran komunitas *gemeinschaft* menjadi masyarakat agregatif/*gesellschaft* (Atmadja, 2010:85). Selanjutnya, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mementingkan hal-hal yang bersifat praktis (*practicality*), dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses finansial (Dewey, 2001:23—28). Sedangkan sifat hedonisme bagi masyarakat luas sering dikaitkan dengan sifat boros, suka menghambur-hamburkan uang, dan hanya berpikir tentang kebahagiaan duniawi. Untuk menghindari jangan sampai masyarakat sekolah terlalu jauh terjebak pada hal-hal yang bersifat individualis, pragmatis, dan hedonis, maka peran masing-masing organ yang membentuk struktur sekolah itu menjadi sangat penting. Dalam praktiknya peran masing-masing organ dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan dan peranan setiap organ dalam sebuah struktur sosial, selalu memiliki dimensi timbal balik. Misalnya, guru hanya bisa menjalankan perannya dengan baik, yakni menyuruh para siswanya agar rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik, bila para siswanya mau mengikuti suruhan guru tersebut. Sebaliknya, bila para siswa tidak mengindahkan instruksi yang diberikan oleh guru kepadanya, maka peran dan kedudukan guru tidak akan bermakna apa-apa. Artinya, dengan peran dan kedudukannya tersebut, guru berhak memerintah para siswanya untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik, dan sebagai timbal baliknya para siswa berkewajiban untuk mematuhi perintah dan instruksi yang diberikan

oleh guru bersangkutan. Dengan mengacu pada uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa peranan adalah serangkaian hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dalam hubungan antarindividu. Dalam arti hak adalah kewenangan yang diberikan untuk melakukan sebuah tindakan yang kemudian menimbulkan kewajiban bagi pihak lain yang menjadi objek bagi perlakuan hak itu sendiri.

Kedudukan seseorang dalam struktur sosial sekolah umumnya diperoleh oleh seseorang kerana usahanya sendiri melalui kualifikasi pendidikan. Artinya, seseorang yang karena kualifikasi pendidikannya mereka dipandang cakap untuk menduduki sebuah kedudukan tertentu, mereka bisa meraihnya. Berbeda dengan kedudukan dalam struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat umum. Dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat umum, sebuah kedudukan tidak selalu bisa didapati melalui kualifikasi pendidikan. Misalnya, untuk bisa menjadi raja dalam sebuah pemerintahan yang berbentuk kerajaan tidak bisa diraih melalui kualifikasi pendidikan. Sebab kedudukan sebagai raja harus diperoleh melalui keturunan atau kelahiran. Hanya mereka yang lahir di lingkungan istana kerajaan saja yang bisa mendapatkan kedudukan sebagai raja. Sementara orang-orang kebanyakan dalam arti yang lahir di luar garis keturunan raja tidak akan mungkin bisa menempati kedudukan sebagai raja.

Akan tetapi tidak demikian halnya dalam struktur sosial masyarakat modern, di dalam masyarakat modern tidak ada demarkasi yang jelas untuk membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kelas. Artinya, posisi sosial dalam kehidupan masyarakat modern tidak didasarkan atas keturunan nenek moyangnya atau leluhurnya, melainkan ditentukan atas dasar prestasi kerja. Oleh karena itu dalam masyarakat modern setiap

individu dididik untuk bekerja dengan otak dan dengan fisik secara serentak, sehingga kehidupan intelektual dan kehidupan praktis dapat saling mengisi satu sama lain.

C. Kedudukan dan Peran Kepala Sekolah dalam Struktur Sosial Sekolah

Telah dipahami bahwa kedudukan seseorang dalam sebuah struktur sosial, akan menentukan posisi orang bersangkutan dalam satu komunitas sosial tertentu dan akan berpengaruh pula terhadap hubungannya dengan orang lain di lingkungan komunitas tersebut. Misalnya, dalam struktur sosial sekolah kedudukan seorang kepala sekolah akan mempengaruhi perilaku bawahannya, seperti wakil kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, pesuruh, dan juga para siswa sekolah bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan kepala sekolah dalam sebuah satuan pendidikan, yakni (1) kedudukan kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di sekolahnya secara keseluruhan, dan (2) kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin formal pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, baik sebagai pengelola pendidikan maupun sebagai pemimpin formal pendidikan, kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri.

Terkait kedudukannya itu, maka kepala sekolah dapat dikatakan sebagai motor penggerak, penentu, dan pendorong tercapainya tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh setiap institusi pendidikan adalah berjenjang, mulai dari yang bersifat sangat umum sampai yang sangat spesifik dan dapat diukur serta dievaluasi yang selanjutnya disebut kompetensi. Ada pun tujuan-tujuan pendidikan tersebut dapat diklasifikasi menjadi empat macam, yakni: (1) Tujuan pendidikan nasional (TPN); (2) Tujuan institusi (TI); (3) Tujuan

Kurikuler (TK); dan (4) Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran.

Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir yang harus dicapai oleh setiap proses pendidikan dan dijadikan pedoman oleh setiap institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, setiap lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal dalam menyelenggarakan proses pendidikan harus senantiasa berorientasi pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam undang-undang pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku ideal sesuai falsafah hidup suatu bangsa yang dirumuskan oleh sebuah negara dalam bentuk undang-undang.

Selanjutnya tujuan institusional adalah tujuan kelembagaan, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga (institusi) pendidikan. Atau dapat pula dikatakan bahwa tujuan institusional adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tertentu. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa tujuan institusional ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan dasar, menengah, dan lembaga pendidikan tinggi.

Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bidang studi atau tujuan yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran Pancasila tentu memiliki tujuan kurikuler yang berbeda dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan berbeda pula dengan tujuan mata pelajaran Sejarah, dan begitu seterusnya. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan kurikuler merupakan kualifikasi yang

harus dimiliki oleh seorang siswa setelah mereka selesai mempelajari suatu mata pelajaran tertentu.

Sementara tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus, di antara tujuan-tujuan pendidikan yang lain, yakni tujuan yang hendak dicapai oleh setiap satu kali tatap muka (setiap satu unit *lesson*). Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa tujuan instruksional adalah kualifikasi yang hendak dimiliki oleh setiap siswa setelah selesai mempelajari satu pokok bahasan tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan ini biasanya dirumuskan oleh guru pengajar masing-masing bidang studi, dengan alasan karena guru yang paling memahami atmosfer akademik yang ada di lingkungan sekolah bersangkutan, termasuk karakteristik para siswanya. Untuk memahami lebih jelas tentang hubungan setiap klasifikasi tujuan pendidikan dari tujuan pendidikan nasional sampai tujuan instruksional dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 5.1
Arah Penjabaran dan Pencapaian Tujuan Pendidikan

Dengan mengacu pada gambar bagan di atas dapat dinarasikan bahwa tujuan pendidikan nasional yang masih bersifat sangat umum dalam praktik pembelajaran harus dijabarkan ke dalam tujuan pendidikan yang lebih spesifik, yakni ke dalam tujuan institusional atau tujuan kelembagaan. Selanjutnya, tujuan institusional dijabarkan lagi ke dalam tujuan yang lebih spesifik, yakni ke dalam tujuan kurikuler, yakni tujuan yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran. Demikian pula tujuan kurikuler harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembelajaran atau ke dalam tujuan instruksional, sehingga dengan mudah dapat diukur dan dievaluasi tahap pencapaiannya. Berdasarkan uraian tentang kedudukan kepala sekolah dan upaya pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas seorang kepala sekolah sangatlah berat. Oleh karena itu seorang kepala sekolah sebelum ditetapkan sebagai kepala sekolah haruslah memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2007 sebagai berikut.

Kepala sekolah/Madrasah harus memiliki kualifikasi umum sebagai berikut. (1) memiliki kualifikasi akademik sarjana strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (2) pada saat diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 57 tahun; (3) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (4) memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan

kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Selain kualifikasi umum, seseorang yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah/Madrasah juga dituntut memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut.

1. Kepala TK/RA harus memiliki kualifikasi khusus antara lain: (1) Berstatus sebagai guru TK/RA; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan (3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
2. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI) harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut. (1) Berstatus sebagai guru SD/MI; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan (3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut. (1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan (3) Memiliki sertifikat sebagai kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
4. Kepala sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut. (1) Berstatus sebagai guru SMA/MA; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan (3) Memiliki sertifikat pendidik sebagai Kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) harus memiliki kualifikasi khusus

- sebagai berikut. (1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan (3) Memiliki sertifikat sebagai Kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
6. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB, SMPLB, dan SMALB) harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut. (1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan (3) Memiliki sertifikat kepala SDLB/SMPLB/SMALB.
 7. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut. (1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai kepala sekolah; (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan (3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

D. Kedudukan dan Peran Guru dalam Struktur Sosial Sekolah

1. Kedudukan Guru dalam Struktur Sekolah

Guru merupakan salah satu elemen penting dari sebuah organisasi sekolah, sebab tanpa guru proses pembelajaran di sekolah tidak akan pernah terjadi. Namun, demikian kalau dilihat dari segi kedudukannya guru mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari kepala sekolah dalam struktur sosial sekolah. Konsekuensi dari kedudukannya tersebut, guru harus hormat dan patuh pada instruksi kepala sekolah dalam kaitannya dengan tugas kelembagaan. Demikian pula sebagai konsekuensi dari kedudukannya tersebut, guru dalam meniti jenjang kariernya sangat tergantung pada kedudukan kepala sekolah. Dikatakan demikian sebab ketika guru mau naik pangkat, maka ia harus mendapat disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah. Dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa masa depan guru dipengaruhi oleh relasi guru bersangkutan dengan kepala sekolahnya. Atau dengan bahasa lainnya, dapat dikatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai pegawai yang secara struktur berada di bawah garis komando kepala sekolah. Hal ini membuat kedudukan guru dalam struktur sekolah menjadi lebih rendah dari kedudukan seorang kepala sekolah. Demikian pula petugas inspeksi yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja sekolah, dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada guru dan kepala sekolah dalam struktur sosial sekolah.

Bahkan, seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kedudukan antar guru bidang studi pun dalam struktur sosial sekolah kini dianggap tidak sama. Dalam arti guru

yang mengampu mata pelajaran tertentu dianggap lebih tinggi kedudukannya dalam struktur sosial sekolah dibandingkan dengan guru yang mengampu mata pelajaran lain. Misalnya, guru bidang studi MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dianggap menduduki posisi yang lebih terhormat dibandingkan dengan guru yang mengampu mata pelajaran Agama, PKK, dan Pendidikan Olahraga yang tidak termasuk mata ujian dalam tes masuk perguruan tinggi. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat akademik di lingkungan masyarakat sekolah telah lahir "kasta baru" dunia pendidikan.

Artinya, di lingkungan masyarakat sekolah ternyata ada juga stratifikasi sosial yang didasarkan atas kemampuan para siswa dalam menguasai bidang ilmu tertentu. Misalnya, anak-anak yang menguasai bidang ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dianggap memiliki "kasta" yang lebih tinggi dari pada anak-anak yang menguasai bidang ilmu Sosial atau ilmu Humaniora lainnya, termasuk anak-anak yang menguasai bidang ilmu agama. Selain itu, kedudukan seorang guru di dalam struktur sosial sekolah juga ditentukan oleh masa kerja guru bersangkutan. Dalam arti, semakin lama masa kerja seorang guru, kedudukannya dianggap semakin tinggi dalam sebuah struktur sosial sekolah dan begitu sebaliknya, makin pendek masa kerja seorang guru kedudukannya dianggap semakin rendah. Jadi, dalam konteks ini, masa kerja dan pengalaman mengajar ikut menentukan kedudukan seorang guru dalam struktur sosial sekolah.

2. Peranan Guru dalam Hubungannya dengan Proses Pembelajaran

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di ruang kelas guru dapat memainkan berbagai peran, di antaranya guru dapat

berperan sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator, sebagai pengelola pembelajaran, sebagai demonstrator, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai evaluator. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, maka guru harus mampu memainkan peran-peran sebagaimana telah diuraikan pada uraian di atas. Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran yang harus dimainkan oleh guru ikutilah uraian berikut.

a. Guru sebagai Sumber Belajar

Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam menguasai materi ajar yang akan diajarkan kepada para siswanya. Baik tidaknya *performance* guru dalam proses pembelajaran di ruang kelas sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya penguasaan guru atas materi ajar yang akan diajarkannya. Guru seharusnya mampu menyederhanakan materi ajar yang ada dalam berbagai referensi ke dalam sajian yang simpel, menarik, dan mudah dipahami oleh para siswa. Bukan sebaliknya guru justru meninggikan konsep yang diajarkan, sehingga sulit dipahami oleh para peserta didik. Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi para siswa di sekolah. Akan tetapi bagaimana pun majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran guru sebagai sumber belajar tetap dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Sebab adakalanya berbagai konsep, proposisi, atau teori yang ada dalam berbagai referensi yang menjadi sumber bacaan para siswa tidak serta merta dapat dipahami oleh para siswa itu sendiri. Hal ini semua sangat tergantung pada kemampuan literasi yang dimiliki tiap-tiap siswa untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami berbagai konsep yang ada dalam berbagai buku referensi yang menjadi pegangan para siswa.

Ketika para siswa tidak mampu memahami, mengkaji, dan menganalisis berbagai konsep, proposisi, dan teori yang ada dalam buku-buku bacaan siswa disinilah tugas guru untuk menjelaskan dan menyederhanakan konsep-konsep tersebut. Dengan demikian guru harus tetap meng-*update* pengetahuan yang dimilikinya dengan selalu membaca lebih banyak referensi dari para siswanya. Dengan banyaknya ketersediaan sumber belajar saat ini, yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, ada kalanya siswa lebih dulu mengetahui informasi yang akan diajarkan guru kepadanya. Oleh sebab itu agar tidak ketinggalan informasi, guru harus banyak membaca referensi, baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian, jurnal, buku ajar, dan juga melacaknya dari internet. Selain itu, guru juga harus dapat memetakan materi ajar yang akan diajarkannya, misalnya dengan cara menentukan mana yang termasuk materi inti (*core*) yang wajib dipelajari para siswa dan mana materi tambahan. Dengan demikian guru dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai sumber belajar. Jadi, dalam kaitannya dengan peran guru sebagai sumber belajar, guru harus memahami bahwa saat ini dirinya bukan satu-satunya sumber belajar yang dapat dijadikan rujukan oleh para siswa dalam belajar, melainkan hanya salah satu sumber belajar dari sekian banyaknya sumber belajar yang tersedia bagi para siswa sekolah.

b. Guru sebagai Fasilitator

Guru sebagai fasilitator dapat dimaknai bahwa dalam proses pembelajaran guru dapat berperan sebagai pihak yang harus dapat memfasilitasi atau memberi pelayanan untuk memudahkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Dalam kaitannya dengan peran guru sebagai fasilitator, yang perlu dipahami oleh guru adalah bagaimana caranya agar mereka mampu menyajikan materi pelajaran dengan

baik, sehingga mudah dipahami oleh para siswanya. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah bagi seorang guru, sebab dalam menghadapi siswa dengan berbagai karakter dan berbagai kemampuan, serta dengan tipe belajar yang juga bermacam-macam tentu diperlukan strategi dan metode mengajar yang tepat. Selain itu, menurut Sanjaya (2008:23) tuntutan pembelajaran di era teknologi modern ini adalah guru harus memperlakukan siswa sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek belajar. Atau dengan istilah lainnya proses pembelajaran saat ini harus berorientasi pada siswa dan bukan pada guru. Jadi dalam proses pembelajaran guru hendaknya dapat memainkan perannya sebagai fasilitator dengan baik, yakni mampu memfasilitasi siswa dalam hal belajar, sehingga para siswa dengan mudah dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru.

Agar guru dapat memainkan perannya sebagai fasilitator dengan baik, maka guru harus mampu memahami beberapa hal terkait dengan fasilitasi proses pembelajaran, seperti penggunaan berbagai media pembelajaran dan memberi arahan kepada para siswa untuk mendapatkan sumber belajar yang baik. Misalnya, guru harus memahami berbagai jenis media dan cara memanfaatkannya dengan baik dalam proses pembelajaran. Hal ini penting sebab belum tentu suatu media pembelajaran cocok digunakan untuk semua pokok bahasan. Oleh karena itu, guru harus kreatif dan inovatif dalam menentukan dan memilih media pembelajaran yang tepat untuk setiap pokok bahasan yang akan diajarkannya. Demikian pula dengan pemilihan sumber belajar, guru harus mampu menunjukan kepada para siswanya sumber belajar yang cocok dengan materi ajar yang akan diajarkannya.

Terkait dengan peran guru sebagai fasilitator, maka guru harus trampil dalam merancang berbagai media pembelajaran, sehingga

dapat memfasilitasi para siswa dalam belajarnya dengan memanfaatkan media pembelajaran secara baik dan tepat. Selain itu guru juga dituntut mampu untuk mengorganisasikan berbagai jenis media pembelajaran, sehingga dapat memudahkan siswa dalam hal belajar. Hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dikuasai oleh guru sebagai fasilitator adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan para siswa dalam proses pembelajaran. Sebab kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya dalam proses pembelajaran sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan guru sebelumnya. Dengan demikian tugas guru sebagai fasilitator juga sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru.

c. Guru sebagai Pengelola Pembelajaran

Pembelajaran adalah sebuah interaksi yang terjadi antara guru, siswa, dan seprangkat media pembelajaran dalam suatu kurun waktu tertentu dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran (*learning manajer*) guru harus mampu menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi berlangsungnya sebuah proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Devais (dalam Sanjaya, 2008:24) bahwa dalam sebuah proses pembelajaran guru acapkali melupakan hakikat pembelajaran sesungguhnya adalah belajar siswa bukan mengajar guru. Oleh karena itu, sering ditemui guru dalam sebuah proses pembelajaran sangat asyik dengan aktivitasnya sendiri, yakni melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada para siswanya tanpa mempedulikan apakah ilmu yang ditrenfernya itu dimngerti atau tidak oleh para siswanya. Ketika guru bertindak seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran model tersebut berpusat pada guru, dan buan berpusat pada siswa. Padahal proses pembelajaran

yang baik adalah proses pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (*student based learning*).

Menurut Sanjaya (2008:24) sebagai pengelola pembelajaran guru mempunyai empat fungsi umum, yakni: (1) merencanakan tujuan pembelajaran; (2) mengorganisasikan berbagai sumber belajar, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya; (3) memimpin proses pembelajaran yang dilakukan, seperti memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa dalam hal belajar; (4) mengawasi segala sesuatu terkait dengan berlangsungnya proses pembelajaran itu sendiri. Apapun fungsi yang harus dilaksanakan guru, pada akhirnya akan bermuara pula pada tujuan akhir yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran, yakni terjadinya perubahan perilaku pada diri peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Perubahan yang diharapkan mencakup tiga domain, yakni perubahan menuju ke tingkat yang lebih baik dalam bidang pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan perilaku (*psikomotorik*). Jadi, secara esensi perubahan yang diinginkan dari sebuah proses pembelajaran adalah perubahan perilaku secara individual, meskipun pembelajaran dilakukan secara klasikal.

d. Guru sebagai Demonstrator

Selain tiga peran yang harus dimainkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya, peran guru untuk mempertunjukkan segala sesuatu kepada para siswanya juga tidak kalah pentingnya. Sebab dengan cara mendemonstrasikan (mempertunjukkan) sesuatu kepada para peserta didik, dapat membantu guru dalam mengongkritkan sesuatu yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata (kongkrit) kepada para siswa, sehingga siswa dengan mudah dapat memahami berbagai

pesan yang disampaikan oleh guru dalam sebuah proses pembelajaran. Terkait dengan persoalan demonstrasi atau peran guru sebagai demonstrator, ada dua hal pokok yang harus dipahami oleh guru antara lain: *Pertama*, sebagai seorang demonstrator guru harus mampu mendemonstrasikan atau menampilkan sikap-sikap yang terpuji di depan para siswanya. Sebab dalam kaitannya dengan peran guru sebagai demonstrator ada sebuah adagium yang menyatakan "guru adalah sosok yang harus ditiru dan digugu". Jika kemudian guru menampilkan sikap-sikap yang tidak terpuji di depan para siswanya, maka bukan tidak mungkin sikap guru demikian akan ditiru dan diikuti oleh siswa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa hampir dalam setiap aspek kehidupannya guru sering dipandang sebagai sosok ideal bagi setiap siswanya. Biasanya apa pun yang dilakukan oleh guru akan senantiasa dijadikan rujukan oleh siswanya dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, guru dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai model atau teladan bagi para siswanya dalam bertingkah laku.

Kedua, pemahaman kedua tentang peran guru sebagai demonstrator adalah guru harus mampu mendemonstrasikan sesuatu di depan kelas terkait dengan upaya untuk mengongkritkan materi ajar yang bersifat abstrak ke tindakan yang lebih nyata (kongkrit). Misalnya, guru ketika menjelaskan cara untuk membuat sarana upacara keagamaan, misalnya membuat *sanggah cucuk* atau membuat *klatkat*, guru tidak boleh hanya menjelaskan cara-cara membuat sanggah cucuk atau cara-cara membuat klatkat secara teori saja, melainkan guru juga harus mampu mempraktikkan bagaimana cara orang membuat *sanggah cucuk* atau *klatkat* dengan memperagakan di depan kelas. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa peran guru sebagai demonstrator yang pertama guru harus mampu tampil menjadi contoh yang baik di

depan para siswanya, dan yang kedua guru harus mampu mempratikan atau memperagakan sebuah aktivitas terkait dengan materi yang sedang dibawakannya. Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan para siswa untuk memahami materi yang diajarkan guru dalam sebuah proses pembelajaran.

e. Guru sebagai Pembimbing

Dalam sebuah proses pembelajaran guru hendaknya mampu bertindak sebagai pembimbing para siswanya yang sedang belajar. Dalam kaitannya dengan tugas guru sebagai pembimbing, guru harus memahami berbagai teori psikologi perkembangan yang dapat memberi arahan kepada guru atas upaya pembimbingan yang dilakukan terhadap para siswanya. Sehubungan dengan tahap perkembangan peserta didik, ada beberapa teori psikologi perkembangan yang harus dipahami oleh guru. Misalnya, *pertama*, teori Nativisme yang dikembangkan oleh Schopenhauer (di Jerman, 1788—1860), yang menegaskan bahwa anak sejak dilahirkan telah dilengkapi dengan bawaan atau bakat alami masing-masing yang sering disebut (kodrat). Istilah nativisme sebenarnya berasal dari kata *nativus* yang artinya pembawaan. Hal ini mengandung arti bahwa menurut teori Nativisme anak begitu dilahirkan mereka sudah dibekali bakat-bakat khusus atau bawaan masing-masing yang nantinya akan menentukan wujud kepribadian atau karakter anak-anak tersebut ke depannya. Dalam pengembangan teorinya ini, Schopenhauer sangat meyakini bahwa pengaruh lain dari luar diri anak tidak akan mampu mengubah bawaan anak terkait pembentukan kepribadiannya. Teori ini juga sering disebut teori Pessimisme (Paedagogik-Pessimistis), karena teori ini menolak premis dasar teori yang mengatakan bahwa perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh faktor luar. Selain itu, teori juga sering disebut teori Biologisme, sebab teori ini

menitikberatkan faktor biologis atau faktor keturunan (*genetic*) sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, dengan mengabaikan pengaruh dari luar diri anak itu sendiri.

Kedua, teori Empirisme dengan tokoh utamanya adalah Francis Bacon (Inggris, 561—1626) dan John Locke (Inggris, 1632—1704). Teori ini berpandangan bahwa anak sejak dilahirkan berada dalam kondisi kosong, bagaikan kertas putih bersih seperti meja lilin (*Tabula Rasa*). Berangkat dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa corak dan bentuk perkembangan anak selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman (empiris), termasuk pendidikan dan pengajaran. Jadi, dengan mengacu pada premis dasar teori empirisme di atas, dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa perkembangan kepribadian anak akan sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan, termasuk pendidikan dan pengajaran. Teori ini sering juga disebut teori *paedagogiek optimisme*, sebab teori ini sangat optimis bahwa lingkungan atau pengalaman sangat menentukan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak. Atau sering juga disebut teori yang berorientasi pada lingkungan (*enviromentalisme*), sebab keberhasilan dalam membina kepribadian anak sangat ditentukan oleh pengaruh lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang.

Ketiga, teori Konvergensi yang dikembangkan oleh Williams Stern dan dibantu oleh istrinya Clara Stren. Teori ini menekan bahwa perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang satu sama lainnya. Ada pun kedua faktor dimaksud adalah faktor bawaan (bakat) dan faktor lingkungan yang keduanya bersifat *interdependence* yang seolah-olah bertemu dan

memadu dalam satu titik. Artinya, perkembangan keperibadian anak akan dapat berjalan dengan baik apabila kedua faktor ini (bawaan dan lingkungan) saling bertemu satu sama lainnya. Misalnya, apabila seorang anak mempunyai bawaan (bakat) sebagai seorang penari, kemudian diberi sentuhan dengan pelajaran menari, maka perkembangan kemampuan anak dalam bidang menari akan berkembang sangat pesat. Sebaliknya, bila anak-anak tidak memiliki bawaan (bakat) sebagai seorang penari, kemudian diberi pelajaran menari, mereka akan sangat susah untuk memperoleh keahlian dalam bidang menari dan begitu seterusnya. Jadi, menurut teori Konvergensi perkembangan kepribadian atau kemampuan anak dalam suatu bidang tertentu akan dapat berkembang dengan pesat apabila anak tersebut, diberikan perlakuan atau pengalaman yang sesuai dengan bawaan atau bakat mereka yang dibawa sejak lahir (Ahmadi, 1991:20—21). Oleh karena itu, guru atau orang tua sebaiknya tidak memaksakan anak-anaknya untuk menguasai suatu bidang ilmu tertentu, apabila anak-anak memang tidak mempunyai kemampuan bakat) dalam bidang tersebut.

Selain tiga teori psikologi yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya masih banyak teori psikologi yang perlu dipahami oleh seorang guru, ketika guru berperan sebagai pembimbing. Hal ini penting sebab guru akan dapat berperan sebagai pembimbing yang baik apabila, guru memiliki pemahaman tentang karakter anak-anak yang sedang dibimbingnya. Selain itu, guru juga harus memahami gaya dan kebiasaan belajar yang dimiliki tiap-tiap siswa, sehingga dengan pemahaman hal-hal tersebut, guru tidak akan pernah memaksakan kehendak tentang bagaimana caranya mempelajari suatu bidang ilmu tertentu, dan tidak akan pernah memaksakan kehendak agar semua anak-anaknya dapat mengerti apa yang mereka ajarkan. Sebab jika mengacu pada beberap teori psikologi

perkembangan di atas, dapat dipahami setiap anak memiliki bawaan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu setiap anak juga memiliki cara dan gaya belajar yang berbeda satu sama lainnya, sehingga guru juga tidak dapat memaksakan keinginannya agar anak mengikuti metode belajar yang ditawarkan oleh guru berasngkutan, karena setiap anak memiliki cara dan gaya belajar yang berbeda pula. Berangkat dari uraian tersebut dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa betapa pentingnya guru memahami teori-teori psikologis dalam upayanya melakukan pembimbingan kepada para peserta didiknya.

Selain penting memahami berbagai teori psikologi, guru di dalam melakukan pembimbingan juga harus mampu merencanakan tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dalam melakukan proses bimbingan. Hal ini sangat logis, sebab guru baru akan bisa melakukan proses bimbingan dengan baik manakala guru sebelum membimbing telah membuat sebuah perencanaan, mengenai target yang ingin dicapai atas bimbingan yang dilakukannya. Hal ini berhubungan pula dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan faktor psikologis serta aspek fisiologis siswa yang kesemuanya itu telah terkandung dalam kurikulum, sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran itu berakhir.

f. Guru sebagai Motivator

Sebelum sampai pada bahasan tentang guru sebagai motivator ada baiknya, dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan motivasi. Menurut Kartono (1985:157) motivasi berarti sebab, alasan dasar, atau dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Dengan mengacu pada terminologi motivasi sebagaimana

dikatakan Kartono, dapat ditegaskan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau perbuatan tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan banyak pula perbuatan yang dilakukan seseorang yang bukan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang. Misalnya, karena keinginan untuk merasa berguna, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, dan karena keinginan untuk pencapaian status sosial tertentu.

Dalam konteks pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah proses pembelajaran itu dilakukan. Dikatakan demikian sebab adakalanya siswa di sekolah kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang rendah, tetapi bisa jadi disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar siswa itu sendiri, sehingga tidak ada upaya untuk mengerahkan kemampuannya untuk memberdayakan potensi yang mereka miliki. Berangkat dari kenyataan tersebut, dapat dideskripsikan bahwa anak-anak yang berprestasi rendah dalam bidang akademik, belum tentu disebabkan oleh kemampuan akademiknya yang rendah, tetapi boleh jadi disebabkan kurangnya motivasi atau dorongan bagi mereka untuk belajar.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Hilgard sebagaimana dikutip Sanjaya (2008:29) bahwa motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut tergerak hatinya untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan yang membuat seseorang tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu aktivitas, termasuk aktivitas belajar yang disebabkan karena sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, ini disebut motivasi internal. Sebaliknya, ada pula orang yang tergerak hatinya untuk melakukan suatu aktivitas, karena didorong

oleh sesuatu yang datangnya dari luar diri orang bersangkutan, ini yang disebut motivasi eksternal. Dari kedua jenis motivasi tersebut, yang lebih kuat dan lebih bertahan lama dorongannya adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri orang bersangkutan, sementara motivasi yang datangnya dari luar diri anak sifatnya sementara, sebab ketika dorongan tidak ada lagi, maka keinginan anak untuk melakukan sesuatu menjadi memudar.

Motivasi erat pula kaitannya dengan kebutuhan, dikatakan demikian sebab acap kali motivasi seseorang itu muncul karena adanya kebutuhan. Misalnya, ketika seseorang membutuhkan sesuatu barang dan barang itu bisa didapat dengan cara membeli, maka seseorang akan termotivasi untuk bekerja yang bisa menghasilkan uang. Sebab dengan cara bekerja dia akan bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya akan barang yang diperlukan. Terkait dengan peran guru sebagai motivator, maka guru harus memahami apa yang menjadi kebutuhan para siswanya, sehingga dengan pemahaman tersebut guru mampu memberikan motivasi sesuai kebutuhan siswa itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran, sebab proses pembelajaran akan berhasil dengan baik, jika para siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam hal belajar. Sebaliknya, bila motivasi belajar anak redah, maka hampir dapat dipastikan proses pembelajaran yang dilakukan akan gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, peran guru sebagai motivator mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya guru mewujudkan tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Agar guru dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru bersangkutan. Misalnya, sebelum guru menjelaskan materi

pelajaran terlebih dahulu perlu diperjelas tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam arti ke mana siswa itu akan dibawa harus jelas arahnya, sehingga anak-anak dapat memahami tujuan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran yang sedang dilakukan tersebut. Hal ini penting sebab dengan dipahaminya tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, maka motivasi siswa untuk mempelajari materi yang diajarkan oleh guru akan tumbuh dengan baik, apalagi materi yang diajarkan berhubungan dengan kebutuhan siswa. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa motivasi selalu berhubungan dengan kebutuhan. Dengan demikian semakin erat kaitan antara materi yang diajarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa, maka akan semakin tinggi pula minat siswa untuk mempelajari materi tersebut.

Selain memperjelas tujuan yang hendak dicapai, guru juga dapat memotivasi siswa dengan cara membangkitkan minat siswa untuk belajar. Caranya, hubungkan materi ajar yang akan diajarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Atau dalam bahasa lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi ajar yang akan diajarkan, guru dapat menghubungkan materi ajar yang akan diajarkan dengan pengalaman hidup yang sedang dialami oleh para siswa (pembelajaran kontekstual). Selain itu, guru juga dapat menggunakan strategi pembelajaran bervariasi dalam menyajikan materi ajar, sehingga anak-anak tidak bosan, karena strategi pembelajaran yang digunakan bersifat monoton.

Hal lain yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa dalam hal belajar, adalah dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan para siswa. Guru tidak

perlu membuat-buat kewibawaan dalam proses pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran menjadi sangat formal. Guru sebaiknya bersikap sewajarnya, agar para siswa merasa nyaman, senang, dan bebas dari rasa takut dalam mengikuti pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Dengan suasana yang nyaman, tenang, dan menyenangkan para siswa akan dapat belajar dengan rileks, santai, dan bermakna, sehingga tujuan pembelajaran dengan mudah dapat dicapai.

Bukan hanya itu, untuk dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dengan baik, guru juga perlu memberikan pujian (*reward*) yang wajar kepada siswa yang memperoleh keberhasilan, dan sebaliknya memberikan *fanishment* bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Pujian yang diberikan kepada siswa yang berhasil bisa diberikan dalam bentuk kata-kata verbal, dan dapat pula diberikan dalam bentuk non-verbal. Pujian dalam bentuk kata-kata verbal, misalnya dapat disampaikan dalam bentuk kata-kata, "bagus", hebat, ya jawaban anda benar, dan seterusnya. Sedangkan pujian dalam bentuk non-verbal dapat dilakukan dengan bahasa isyarat, misalnya dengan mengacungkan jempol, dengan sikap mengangguk, dan dapat pula dilakukan dengan memberikan senyum yang wajar, dan sebagainya.

Masih dalam kaitannya dengan peran guru sebagai motivator, yakni guru dapat pula memotivasi para siswanya dengan memberikan penilaian yang objektif terhadap pekerjaan siswa. Hal ini penting sebab adakalanya siswa semangat belajar, karena mereka ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ketika para siswa ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka dengan sendirinya mereka akan termotivasi untuk belajar dengan yang rajin, untuk mewujudkan keinginanya tersebut. Selain itu pemberian nilai yang cepat dan tepat

juga dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Oleh karenanya guru harus mampu memberi penilaian secepatnya dan seobjektif mungkin terhadap pekerjaan siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Selain memberikan penilaian secara cepat dan tepat, pekerjaan siswa juga perlu diberikan komentar oleh guru, sebab dengan demikian siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Selain itu, guru juga harus mampu menciptakan persaingan yang sehat di antara para siswa dan sekaligus menciptakan suasana agar para siswa mau bekerja sama satu sama lainnya. Hal ini penting sebab dengan kerja sama yang baik di antara mereka, maka besar kemungkinannya akan tumbuh sikap untuk saling bekerja sama antara siswa satu dengan siswa lainnya. Dengan adanya suasana yang kondusif untuk saling bekerja sama di antara mereka maka, kemungkinan akan timbulnya persaingan yang sehat di antara mereka juga akan terbuka lebar. Ketika di antara mereka telah timbul rasa persaingan yang sehat dalam hal belajar, maka kemungkinan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal juga akan terbuka lebar.

g. Guru sebagai Evaluator

Selain beberapa peran yang harus dijalani guru dalam proses pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, peran guru sebagai evaluator juga tidak kalah pentingnya harus diperhatikan oleh guru. Berkaitan dengan peran guru sebagai evaluator, ada dua hal pokok yang perlu dipahami guru, yakni *pertama*, evaluasi dilakukan untuk mengetahui mengetahui berhasil atau tidaknya para siswa dalam memahami serangkaian materi yang telah diajarkan guru sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. *Kedua*, evaluasi juga memiliki tujuan mengetahui berhasil tidaknya guru dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya siswa dalam memahami berbagai materi ajar yang telah disampaikan guru dalam kurun waktu tertentu merupakan hal yang cukup penting dilakukan, sebab melalui evaluasi tersebut guru dapat mengetahui apakah siswa yang telah menerima pembelajaran selama ini sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Apabila kompetensi yang ditetapkan guru telah berhasil dicapai oleh para siswanya, maka kepadanya sudah pantas diberikan materi baru. Akan tetapi bila kompetensi yang ditetapkan belum berhasil dicapai oleh para siswa, maka perlu dilakukan *remedial teaching*, agar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai benar-benar terwujud.

Dalam praktiknya banyak guru yang keliru menafsirkan evaluasi yang dilakukan terhadap keberhasilan siswanya dalam menyelesaikan sebuah program pembelajaran. Guru acapkali menganggap bahwa evaluasi itu sama dengan hasil tes yang dilakukan guru pada setiap akhir sebuah program pembelajaran. Padahal sesungguhnya tes itu hanya merupakan salah satu alat evaluasi. Sebab untuk menentukan keberhasilan seorang siswa dalam menyelesaikan sebuah program pembelajaran dapat diukur dengan berbagai alat evaluasi. Misalnya, si A baru dapat dikatakan menguasai seluruh program pembelajaran bila mereka telah diuji coba berdasarkan serangkaian alat evaluasi, seperti berdasarkan hasil tes ia mendapat skor yang bagus, berdasarkan hasil wawancara dia juga sangat menguasai materi yang diwawancarakan, dan yang terpenting berdasarkan hasil observasi dia benar-benar mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Jadi, sebagai evaluator guru harus benar-benar memahami prinsip-prinsip evaluasi, sehingga dalam menilai apakah siswanya

memang sudah memperoleh kompetensi yang diharapkan atau belum dapat diwujudkan secara objektif. Kelemahan yang dialami para guru dalam melakukan evaluasi selama ini adalah dalam menentukan keberhasilan siswa guru cenderung hanya bersandar pada hasil tes yang dilakukannya secara tertulis. Akibatnya, keberhasilan pembelajaran hanya diukur berdasarkan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal yang biasa diberikan dalam sebuah tes. Padahal untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah proses pembelajaran itu dilakukan tidak sesederhana itu, melainkan harus diukur berdasarkan berbagai alat evaluasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selain evaluasi itu ditujukan untuk mengukur keberhasilan para siswa dalam memahami serangkaian program yang telah ditetapkan oleh guru, evaluasi juga dilakukan untuk mengukur keberhasilan guru dalam menjalankan kinerjanya. Misalnya, evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang direncanakan atau belum, atau apakah guru dalam menjalankan proses pembelajaran telah mengacu pada empat kompetensi dasar yang harus dijalankannya atau belum, dan seterusnya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan guru sebenarnya lebih banyak dimaksudkan untuk melakukan perbaikan atas berbagai kelemahan yang telah dilakukan guru selama melakukan proses pembelajaran.

3. Hubungan Guru dengan Murid dalam Proses Pembelajaran

Dalam sebuah proses pembelajaran terjadinya interaksi antara guru dengan murid merupakan hal yang biasa. Namun, perlu dipahami bahwa terdapat status yang tidak sama antara guru dengan murid, sehingga dalam melakukan interaksi terdapat kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang harus diindahkan oleh seorang siswa. Misalnya,

dalam berinteraksi dengan guru, siswa harus menghormati gurunya dan harus menggunakan kata-kata yang sopan dalam berkomunikasi. Selain itu secara umum guru diakui memiliki status yang lebih tinggi dari para siswanya, dan karenanya guru dapat menuntut muridnya untuk menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan tersebut. Artinya, guru dalam hubungannya dengan siswa dapat menuntut siswanya agar datang ke sekolah tepat waktu, agar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, dan meminta agar siswanya rajin belajar dan hormat pada orang yang lebih tua dari dirinya.

Dalam memaknai hubungan antara guru dengan murid, ada semacam ketimpangan yang terjadi, di mana hanya pada diri siswa diharapkan terjadi perubahan perilaku sebagai bentuk hasil belajar. Padahal sesungguhnya dalam setiap interaksi yang terjadi antara guru dengan murid akan terjadi perubahan perilaku pada kedua belah pihak. Misalnya, pada siswa akan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku akibat berbagai materi ajar yang diberikan melalui proses pembelajaran. Sementara pada diri guru juga terjadi perubahan perilaku, yakni dalam bentuk bertambahnya wawasan dan pengalaman guru pada setiap kali melakukan proses pembelajaran. Bedanya, kalau perubahan perilaku yang dialami oleh para siswa harus ditunjukkan sebagai bukti dari keberhasilannya dalam mengikuti proses pembelajaran, sedangkan perubahan perilaku yang dialami guru tidak harus ditunjukkan di hadapan publik. Suatu hal yang juga penting diperhatikan, baik oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri dalam berinteraksi adalah adanya perbedaan status antara guru dengan murid. Artinya, guru dengan murid tetap harus berjarak dalam hal berinteraksi, dan hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kewibawaan guru di mata para siswanya.

Berjarak dimaksud di sini bukan dalam arti feodalisme, melainkan dalam berinteraksi dengan gurunya, murid harus tetap menyadari dirinya sebagai seorang siswa, sehingga ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar dalam hal bergaul dengan guru. Dalam arti siswa dalam berinteraksi dengan gurunya tetap harus berpegang pada etika sopan-santun, tetap hormat pada guru, dan menghargai guru sebagai orang yang dituakan. Dalam proses interaksi antara guru dengan murid, terutama dalam proses pembelajaran di ruang kelas, proses interaksi yang baik adalah interaksi yang bersifat multi arah, bahkan yang diharapkan adalah komunikasi lebih banyak terjadi dari pihak siswa. Sebab menurut pendekatan pedagogisme proses pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berbasis pada siswa (*student based learning*). Menurut Sanjaya (2008:135) dalam standar proses pendidikan, pembelajaran harus didesain untuk mengaktifkan siswa belajar, dan bukan untuk mengaktifkan mengajar guru. Artinya, dalam proses pembelajaran siswa harus ditempatkan sebagai objek dan seklaigus sebagai subjek belajar, sehingga yang diharapkan lebih aktif dalam setiap proses pembelajaran adalah siswa bukan guru.

Hal ini penting, sebab menurut penganut aliran konstruktivistik bahwa pada dasarnya setiap individu sejak dilahirkan sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak-anak sebagai subjek belajar, akan menjadi pengetahuan bermakna (*meaning full*), sementara pengetahuan yang didapat secara terberi tidak akan menjadi pengetahuan bermakna, melainkan hanya untuk diingat sementara kemudian dilupakan. Proses pengonstruksian pengetahuan bagi anak-anak menurut Piaget sebagaimana dikutip Sanjaya (2008:123—124) dapat dilakukan melalui proses asimilasi dan

akomodasi terhadap skema yang sudah ada. Skema adalah struktur kognitif yang terbentuk melalui proses pengalaman, sedangkan asimilasi adalah proses penyempurnaan skema yang telah terbentuk, dan akomodasi adalah proses perubahan skema

Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, sebab baik dalam pendekatan konstruktivistik maupun dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa sama-sama menekankan pada upaya untuk memberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya kepada para siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya melalui upaya mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajarinya, serta menghubungkannya dengan situasi yang sedang terjadi di sekitar dirinya. Hal penting yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran konstruktivistik ini adalah bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan agar dapat mendorong para siswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang dibangunnya tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

4. Hubungan Guru dengan Kepala Sekolah dan Guru Lainnya

Hubungan antara guru dengan kepala sekolah dapat dilihat dari dua perspektif, yakni hubungan guru dengan kepala sekolah dalam konteks kedinasan (hubungan formal), dan hubungan guru dengan kepala sekolah dilihat dari aspek personal (hubungan informal/hubungan pribadi). Misalnya, guru sebagai petugas pendidikan, tentu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai seorang guru, seperti tugas-tugas yang dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada guru dapat dilihat pada Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut ketentuan pasal 20 UU No.14 tahun 2005, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,

guru berkewajiban (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Visi Media, 2007:68—69).

Secara lebih nyata tugas dan kewajiban guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menyelenggarakan ulangan dan sekaligus memeriksa ulangan para siswa, mengabsensi murid, menghadiri rapat guru, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi anggota panitia HUT sekolah, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, secara kedinasan (secara formal) guru senantiasa berada di bawah pengawasan kepala sekolah. Pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja guru-guru senantiasa berkaitan pula dengan pemberian penilaian kepala sekolah terhadap *konduite* guru, dalam hubungannya dengan kenaikan pangkat guru bersangkutan. Hal demikian berakibat hubungan guru dengan kepala sekolah menjadi bersifat hierarkhis, sehingga menuntut guru harus hormat dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan instruksi atasannya (baca: kepala sekolah). Adanya kondisi demikian tentu terbuka peluang bagi kepala sekolah untuk bertindak otoriter kepada para gurunya dan sikap semacam ini dapat menjelma pula dalam sikap otoriter guru

terhadap para siswanya. Sebab menurut Foucault (dalam Suda, 2009:37) tidak ada pengetahuan tanpa efek kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dengan mengacu pada premis dasar teori relasi kuasa-pengetahuan yang dikembangkan Michael Foucault di atas, dan jika dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala sekolah, maka dalam kepemimpinannya bisa jadi kepala sekolah bertindak otoriter kepada para gurunya. Hal ini disebabkan kepala sekolah dianggap memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan para guru lainnya, sehingga mereka pun dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari para guru. Dari situ kemudian dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa makin tinggi kekuasaan seseorang, maka pengetahuannya pun dianggap semakin tinggi pula, demikian sebaliknya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka mereka juga dianggap memiliki kekuasaan yang semakin tinggi pula. Dengan demikian, maka para guru harus tunduk dan hormat kepada kepala sekolahnya. Padahal secara realitas sebagian besar guru menginginkan kepemimpinan seorang kepala sekolah yang bersifat demokratis, dalam arti setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, meski pun dalam kondisi tertentu seorang kepala sekolah diharapkan berani bertindak tegas dengan penuh otoritas.

Kemudian secara personal hubungan antara guru dengan kepala sekolah dapat berlangsung secara wajar, sebagaimana hubungan antara guru yang satu dengan guru lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya, memang sulit membedakan hubungan guru dengan kepala sekolah yang bersifat personal dengan hubungan yang bersifat kedinasan. Sebab adakalanya otoritas kepala sekolah seakan tetap melekat dan berefek terhadap semua dimensi

kehidupan guru, sehingga sangat sulit membedakan hubungan yang bersifat personal dengan hubungan yang bersifat kedinasan. Bahkan hubungan yang bersifat hierarkhis dan formal antara guru dengan kepala sekolah sering masih dirasakan oleh guru ketika kepala sekolah itu sudah memasuki masa purna bhakti. Hal ini sangat manusiawi, mengingat manusia selain sebagai makhluk *homo socius*, yakni makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya (tanpa teman), menurut Spranger (dalam Susetyo, 2005:54) manusia juga merupakan makhluk *homo religious*, yakni makhluk yang mengorientasikan perjalanan hidupnya dalam nilai tertinggi, yaitu nilai Ilahi. Hal inilah yang membuat guru atau manusia pada umumnya selalu menaruh rasa hormat kepada orang yang dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi, orang yang lebih tua umurnya, dan orang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal tertentu.

Sementara hubungan antara guru dengan guru yang lainnya cenderung bersifat horizontal, dalam arti tidak ada perbedaan status antara guru yang satu dengan guru lainnya dalam suatu jenjang pendidikan tertentu, misalnya sesama guru S, sesama guru SP, dan seterusnya, sehingga dalam hal bergaul mereka tidak terlalu ada perbedaan selain perbedaan antara senior dengan para junior. Dalam kaitannya dengan hubungan antara guru yang satu dengan guru lainnya, umumnya mereka saling memahami satu sama lainnya, sehingga mereka dengan mudah dapat memelihara kedudukan dan peranannya sebagai guru. Selain itu, fleksibilitas hubungan antara guru satu dengan guru lainnya bisa terjadi, karena profesi guru selama ini masih dianggap sebagai profesi kehormatan, sehingga profesi guru tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang. Akan tetapi kedudukan sebagai guru sering juga dipandang sebagai posisi sosial untuk menentukan

status sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jabatan guru sering dipandang sebagai jabatan mulia dengan jargonya "guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa".

5. Kedudukan Guru dalam Masyarakat

Jika dicermati secara detail kedudukan guru dalam masyarakat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, dan juga berbeda dari satu jaman ke jaman berikutnya. Misalnya, di Indonesia kedudukan guru sebelum perang dunia II sangat terhormat. Pasalnya, hanya sedikit orang yang dapat terpilih untuk memasuki sekolah guru pada saat itu. Bukan hanya itu, jabatan guru memang selalu mendapat posisi terhormat dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sebab profesi guru memiliki kaitan erat dengan idealisme pembangunan bangsa. Artinya, di pundak gurulah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya sesuai yang dicita-citakan bangsa diletakan. Meski harus diakui bahwa harapan ideal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tidak selamanya sesuai dengan kenyataan (Nasution, 2009).

Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru itu sendiri, di mana tidak sedikit guru yang menjadikan profesinya tersebut sebagai wahana untuk menafkahi keluarganya. Akibatnya, tidak jarang pendidikan oleh guru itu sendiri dianggap sebagai alat kebenaran untuk mencari keuntungan ekonomi. Dari situlah munculnya gagasan mengenai kapitalisasi pendidikan, yang intinya memandang pendidikan dianggap sebagai komoditas yang layak "dijualbelikan" di pasar, yang menurut Piliang (2004:355) disebut merkantilisme pengetahuan dalam bidang pendidikan. Lebih lanjut menurut Piliang adanya ekspansi sistem kapitalisme ke dalam dunia pendidikan telah menciptakan bertautnya logika pendidikan dengan logika kapitalisme (*logics of capitalism*). Adanya kondisi demikian

berakibat pendidikan menjelma menjadi mesin kapitalisme (*capitalist machine*), yakni pendidikan dianggap sebagai alat kebenaran untuk mencari keuntungan secara ekonomi.

Berangkat dari gagasan tersebut, kedudukan guru dalam masyarakat tidak serta merta dapat disejajarkan dengan profesi lainnya, seperti tukang bangunan, pekerja pabrik, dan pekerja industri lainnya. Akan tetapi profesi guru dalam masyarakat tetap dipandang istimewa, sebab tugas guru sangat berkaitan dengan harapan-harapan ideal dari masyarakat, yakni terwujudnya sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian halnya dengan negara Amerika Serikat, masyarakat juga menuntut kelakuan guru harus berbeda dengan profesi lainnya. Di era 1930-an guru-guru di Amerika Serikat, terutama guru wanita dilarang main kartu, merokok, minum-minuman beralkohol, dan berdansa. Guru wanita yang dianggap baik adalah guru yang rajin beribadah, dan berdedikasi penuh terhadap pekerjaannya. Jika dicermati lagi kedudukan guru dalam masyarakat dari jaman ke jaman berikutnya, memang mengalami sedikit dinamika. Misalnya, pada jaman Hindu kuno kedudukan guru dalam masyarakat sangat strategis dan sangat dihormati. Sebab gurulah yang dianggap satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Dalam sistem pendidikan Hindu kuno para muridlah yang harus datang ke tempat tinggal gurunya yang sering disebut *guru kula* atau sering juga disebut universitas hutan. Di dalam *guru kula* atau *asram* inilah para siswa (*sisya*) harus melayani gurunya dalam menyiapkan segala kebutuhan hidupnya, seperti mencari air untuk minuman, kayu apai untuk memasak, mencari sayur-sayuran, menyapu halaman, dan lain-lain sebagai rasa *bhakti* siswa ke pada *dang* gurunya.

Sebaliknya, guru harus memberikan ilmu pengetahuan kepada para siswanya tanpa sikap diskriminasi antara siswa yang kaya dengan siswa yang miskin (Sandika, 2011:12—13).

Namun, di era modernisme saat ini kedudukan guru relatif menurun jika dibandingkan dari jaman-jaman sebelumnya. Di jaman pemerintahan kolonial Belanda misalnya, kedudukan seorang kepala SD yang jaman itu disebut kepala H.I.S. dianggap sangat tinggi, sebab hanya sedikit orang Indonesia yang bisa menduduki jabatan tersebut. Berbeda dengan kedudukan kepala sekolah dasar (SD) saat ini, tidak lagi dipandang sebagai kedudukan tinggi, sebab selain sudah banyak orang Indonesia yang bisa menduduki jabatan tersebut, banyak lagi jabatan lain dari profesi lain yang dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukan seorang kepala sekolah dasar. Berangkat dari kenyataan tersebut, dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa semakin lama kedudukan guru dalam masyarakat semakin mengalami penurunan. Meskipun kedudukan guru dalam masyarakat tidak lagi sepopulis pada jaman-jaman sebelumnya, akan tetapi perilaku guru dalam masyarakat masih selalu menjadi sorotan masyarakat luas. Misalnya, ketika salah seorang guru berperilaku menyimpang, dalam arti tidak sesuai dengan harapan ideal masyarakat, maka seketika itu pula guru akan menjadi sorotan masyarakat bersangkutan. Sebab secara ideal guru selalu diharapkan menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Namun, di sisi lain jika meminjam gagasan Surya (2003:153), maka dapat dipahami bahwa sebenarnya guru lebih banyak mendapat perlakuan sebagai objek administrasi dan birokrasi, dibandingkan pemberdayaannya sebagai insan pendidikan yang selalu termarjinalkan dan kurang berkembang. Memang berbagai

upaya pembaharuan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah melalui perbaikan sarana, peraturan, kurikulum, dan sebagainya tetapi belum memprioritaskan guru sebagai pelaksana pendidikan di tingkat instruksional, terutama dari aspek kesejahteraannya. Padahal rekomendasi Unesco dan ILO yang disebut *Recomendation Concerning the Status of Teacher*, yang khusus dibuat untuk dijadikan rujukan oleh setiap negara dalam memberikan penghargaan terhadap status dan martabat guru, secara tegas menyebutkan bahwa kesejahteraan guru itu penting diperhatikan oleh negara. Adapun isi rekomendasi tersebut mencakup empat hal, yakni (1) gaji guru; (2) jaminan sosial; (3) perlindungan profesi, dan (4) pemenuhan hak dan kewajiban.

BAB VII

Penutup

Telah disinggung pada uraian di bab sebelumnya bahwa sosiologi pendidikan pertama kali dikenalkan dalam sebuah perkuliahan di Amerika Serikat pada tahun 1907. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1914 mata kuliah ini telah disajikan tidak kurang dari 16 lembaga pendidikan tinggi. Mengingat dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran tentang Sosiologi Pendidikan telah berhasil diterbitkan pada tahun 1917, dan jurnal Sosiologi Pendidikan yang diberi judul "*Journal of Educational Sociology*" pertama kali diterbitkan pada tahun 1927. Karena pada tahun-tahun tersebut dunia diliputi oleh suasana perang, akhirnya setelah berakhirnya perang dunia II barulah ada sebuah lembaga pendidikan guru yang berhasil mendirikan *Departement of Educational Sociology* atau Jurusan Sosiologi Pendidikan.

Memang pada awal munculnya istilah sosiologi pendidikan, minat para ilmuwan sosial terhadap keberadaan bidang ilmu ini cukup besar. Namun, dalam perkembangannya di antara tahun 1926—1947 perkembangan bidang ilmu sosiologi pendidikan ini mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan adanya anggapan sejumlah kalangan yang menilai bahwa bagi mahasiswa di lembaga pendidikan keguruan lebih cocok diberikan kuliah sosiologi umum dibandingkan sosiologi pendidikan secara khusus. Selain itu, ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari mata kuliah

sosiologi yang yang diajarkan di beberapa lembaga pendidikan tinggi, ternyata hanya sedikit persamaannya antara yang diberikan di lembaga pendidikan satu dengan di lembaga pendidikan lainnya. Jadi, dalam perkembangannya bidang ilmu sosiologi pendidikan ini senantiasa mengalami pasang surut yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik menyangkut faktor eksternal (lingkungan di mana pendidikan sosiologi pendidikan itu dikembangkan) maupun menyangkut aspek internal bidang ilmu sosiologi itu sendiri yang meliputi konstruksi keilmuannya, yakni menyangkut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Althusser, Louis, 1984. *Tentang Ideologi, Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nengah Bawa Atmadja, 2019. *Sosiologi Korupsi Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arniati, Ida Ayu Komang, 2008. *Pandangan Gender pada Smrti dalam Perkembangan Modern*. Surabaya: Paramita.
- Arsana, I Gusti Ketut, Ida Bagus Mayun, Sagung Putri Sukerni, 1994. Dalam Dhana (ed.) *Pembinaan Budaya dalam Keluarga Daerah Bali*. Hasil Penelitian disampaikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai budaya Bali.
- Arta, I Gede Ketut, I Ketut Suda, dan Ida Bagus Dharmika, 2020. *Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, dan Agama*. Denpasar, UNHI PRESS.
- Assegaf, Rahman, ABD, 2004. *Pendidikan Tanpa kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Atmadja, Nengah Bawa, dan Anantawikrama Tungga Atmadja, 2008. *Sekolah + (Bertaraf Internasional, Unggulan, Favorit) = Biaya Mahal = Komersialisasi Pendidikan*. Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Komersialisasi Pendidikan, di Bali TV Denpasar, tahun 2008.
- Atmadja, Nengah Bawa, 2010. *Ajeg Bali Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.

- Baal, Van, 1988. Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970). J. Priy, terj. Jakarta: PT Gramedia.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1995. "Kebudayaan Bali". Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Koentjaraningrat, 1995:286—306). Jakarta: Djambatan.
- Barnadib, Imam, 1983. Pendidikan Baru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Barnadib, Imam, 1983a. Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bastian, Redi Aulia, 2002. Reformasi Pendidikan. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Bourdieu, Piere, 1990. (Habitus X Modal) +Ranah = Praktik. Ricard Harker, Cheelen Mahar, Chris Wilkes, (ed.,) (Pipit Maizer, trj.) Yogyakarta: Jalasutra.
- Buckori, Mochtar, 1999. Transformasi Pendidikan. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Budiana, I Nyoman, 1995. Aspek Sosiologis Sistem Kewarisan Hindu, Suatu Studi tentang Perilaku Pembagian Harta Kekayaan dalam Sistem Kewarisan Hindu di Bali. Hasil Penelitian disampaikan pada Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- Budiman, H. 1997. Pembunuhan yang Selalu gagal: Modenisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Baniel Bell. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahar, Ratna, Wilis, 2011. Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Erlangga.
- Damsar, 2015. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmaningtyas, 2005. Pendidikan Rusak-Rusakan. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal 1992. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- Dewey, John, 1961. *Philosophy of Education*. Littlefeld Adams & co New Jersey.

- Dewey, John, 2001. *Agama Pragmatis Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesiatra.
- Dwipayana, Ari A.A.G.N., 2001. *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Lepra Pustaka Utama.
- Cristianto, P. Raharjo. 1987. "Konsepsi Erich Fromm". Dalam *Jawa Post*, Edisi, Sabtu, 22 Desember 1987.
- Fakih, Mansour, 2003. *Runtuhnya Teori Pembanunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- FM. Fokus Media, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Fokus Media.
- Freire Paulo, 2002. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. (Agung Prihantoro dan Agung Arif Fudiartanto trj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galtung, J. 1988. "Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian". Mochtar Lubis (ed.) *Menggapai Dunia Damai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Giddens, Antony, 2003. *Beyond Left and Right (tarian "Ideologi Alternatif di atas Pusaran Sosialisme dan Kapitalisme")*. (Imam Khoiri, terj.) Yogyakarta: IRCiSoD.
- Guritno, Tatang, 2021. "Catatan KPAI: 17 Kasus Perundangan dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Terjadi Sepanjang 2021". (Dalam *Kompas.com/29/12/2021*. <https://nasional.kompas.com/diakses> 1 Februari 2022.
- Hasbullah, Jousairi, 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Hassan Fuad, 2004. "Pendidikan adalah Pembudayaan". Dalam Widiastono (ed.) *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hogg, MA, & Vaughan, GM. 2002. *Social Psychology (3rd edition)*. London: Prentice Hall.

- <https://nasional.kompas.com/> "Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar". Dalam Kompas.com/24/06/2021.
- [https://www.kompas.com /skola/read/2021/](https://www.kompas.com/skola/read/2021/). "Pengertian, Dampak, dan Contoh Teori Labeling". Dalam Kompas.com/20/08/2021.
- <https://disperin.semarangkota.go.id/news/03/10/2019>. "Mengenal Society 5.0 Masyarakat 5.0"
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/24/4/2019>. "Ini Pentingnya Kesetaraan Gender untuk sebuah Negara". Dalam Kompas.com/24/4/2019. Diakses, 3 Februari 2022.
- Idi Abdullah, 2014. *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Depok: Rajawali Press.
- Irawan Ade, Agus Sunaryanto, Febri Hendry, dan Luky Djani, 2006. *Buruk Wajah Pendidikan Dasar*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Jena, Jeremias, 2002. "Pendidikan sebagai Kontrol Sosial dan Kebebasan Individu, Diskursus mengenai Pendidikan Menurut Plato". Dalam *Majalah Filsafat Driyarkara* tahun XXV No. 4 hal, 52—68. 2002 seksi Senat Mahasiswa STF Driyarkara, Jakarta.
- Kaisiepo, Manuel, 1985. "Sistem Politik, Ideologi, dan Ancaman terhadap Kebebasan Manusia". *Kata Pengantar Buku Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial*, dari Karl, R. Popper hingga Peter L. Beger. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Khairuddin, H. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Koentjaraningrat, 1980. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat, 2021. "Struktur Sosial: Definisi Para Ahli, Ciri-ciri, dan Unsur Pembentuknya" (dalam <https://www.detik.com/edu/18/11/2021>).
- Liotard, Jean Francois, 1984. *The Post Modern Condition: A Report on Knowledge*. G. Benington dan B. Masumi, trj. (Mineapolis,

- Minnesota: University of Minnesota Press). Edisi pertama diterbitkan di Prancis pada tahun 1979.
- Lie, Anita, Takim Andriono, dan Sarah Prasasti, 2014. *Menjadi Sekolah Terbaik: Praktik-Praktik strategis dalam Pendidikan*. Jakarta: Tanoto Foundation.
- Manan, Imran, 1989. *Antropologi Pendidikan Suatu Pengantar*. Terjemahan. Jakarta: Dirjen Tenaga Kependidikan.
- Martono, Nanang, 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah, sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Piere Bourdieu, Dominasi Kelas, dan Kapitalisasi Gaya Baru Melalui Buku Pelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martono, Nanang, 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Heru, 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Om Viṣṇupāda A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 1986. *Bhagavad-Gita Menurut Aslinya*.
- Pilian, Yasraf, Amir, 1998. *Dunia yang Dilipat realitas menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme*. Bandung : Misan.
- Piliang, Amir Yasraf, 2004. *Dunia yang Dilipat Tamsya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Poloma, M. Margaret, 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali bekerja sama dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada (YASOGAMA), Yogyakarta.
- Pustaka Widyatama, 2012. *Buku Pintar UUD 1945 & Amandemen (untuk pelajar dan umum)*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Raho, B. 2014. *Sosiologi*. Yogyakarta: Moya Zam-Zam.

- Ruocek, Joseph S., dan Roland L. Warren, 1984. Pengantar Sosiologi. (Penerjemah, Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1986. Bhagavad-Gita Menurut Aslinya. Jakarta: Tim Penterjemah Bhagavad-Gita menurut Aslinya.
- Sanderson, K Stephen, 1993. Sosiologi Makro, sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Edisi Kedua, Jakarta: Raja Wali.
- Sandika I Ketut, 2011. Pendidikan Menurut Veda. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sanjaya, Wina, 2008. Strategi Pembelajaran, Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sanjaya, Wina, 2008a. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana PrenadanMedia Group.
- Sidari, Coki, 2015. "Pengertian Prasangka Menurut Ahli" (dalam <https://www.kumpulanpengertian.com/>). Diakses 6 Februari 2022.
- Suda, I Ketut, 2006. "Interaksi Belajar Mengajar, sebagai Ilmu, Teknologi, dan Seni. Dalam Jurnal Ekspresi Jurnal Penelitian dan Penciptaan Seni, Vol. 6, No. 2 Oktober 2006. Hal 167—178.
- Suda, I Ketut, 2008. Anak dalam Pergulatan Industri Kecil dan Rumah Tangga di Bali. Yogyakarta: Aksara Indonesia.
- Suda, I Ketut, 2009. "Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual". Dalam Harian BisiBali (KMB) Edisi Rabu 25 Maret 2009.
- Suda, I Ketut, 2009a. Merkantilisme Pengetahuan dalam Pendidikan. Surabaya: Paramita.
- Suda, I Ketut, 2017. Kastanisasi Pendidikan, Ketika Pelajaran Agama Terpinggirkan. Denpasar: Program Pascasarjana UNHI bekerjasama dengan Percetakan Bali.
- Suda, I Ketut, 2018. Membentuk Karakter Anak Melalui Seni Melukis: Studi Analisis pada "I Wayan Gama Painting School" di Desa

- Keliki, Tegallalang, Gianyar. Denpasar: P.T. Japa Widya Duta bekerja sama dengan Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Suda I Ketut, 2013. Domestikasi Kekerasan Simbolik di Sekolah (Sebuah Kajian Sosiologi Pendidikan). Disampaikan pada acara Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, 20 Desember 2013.
- Sudarwan Danim, 2005. Menjadi Komunitas Pembelajar, Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suhartono, Suparlan, 2008. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta> AR-RUZZ MEDIA GROUP.
- Sunarto, Kamanto, 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surya, H. Mohamad, 2003. Percikan Perjangan Guru. Semarang Aneka Ilmu.
- Susetyo Benny, 2005. Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Stephen. K Sanderson, 1993. Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Svalastoga, K., 1989. Difrensiasi Sosial. (Alimandan, terj.). Jakarta: Bina Akasara.
- Tilaar, H.A.R. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia.
- Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., 2009. Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Weingart, Peter, 1969. "Beyond Parsons: A Critic of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory". *Social Forces* (Desember:151—165).

Yunus M., Firdaus, 2007. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire
Y.B.

Mangunwijaya. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Visi Media, 2007. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Visi Media.